



DEPARTEMEN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA

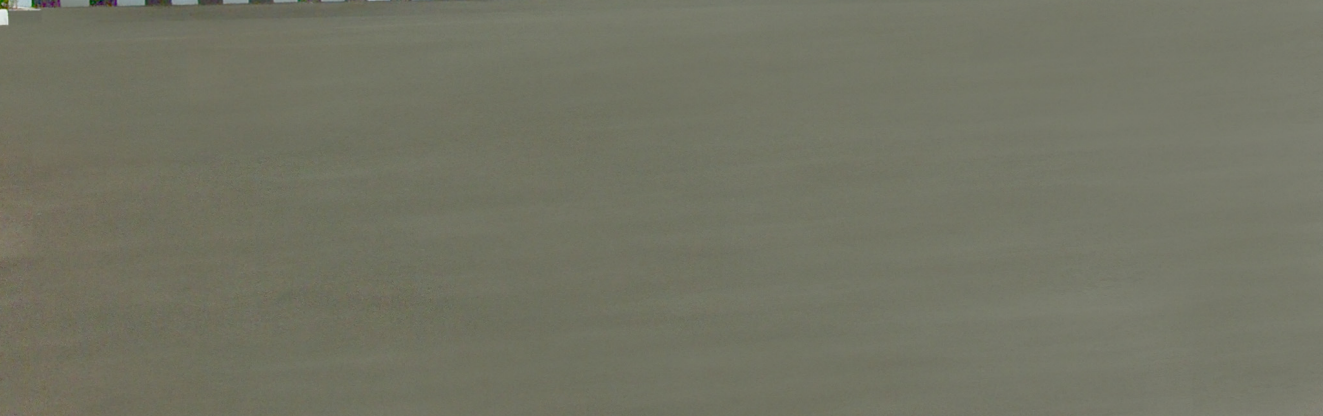


BUKU PUTIH  
PERTAHANAN  
INDONESIA  
**2008**





**DEPARTEMEN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**





**DEPARTEMEN PERTAHANAN RI**

---

Copyright © 2008, Departemen Pertahanan Republik Indonesia  
ISBN 978-979-8878-04-6

---

**Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008**



DEPARTEMEN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  
NOMOR : Per/03/M/II/2008

TENTANG

BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara diselenggarakan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Menteri Pertahanan menyusun buku putih pertahanan yang disebarluaskan kepada masyarakat umum baik domestik maupun internasional untuk menciptakan saling percaya dan meniadakan potensi konflik.

- Mengingat :
1. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
  3. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
  4. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor : Per/01/M/VIII/2005, tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan Republik Indonesia.
  5. Buku Putih Pertahanan Negara Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA 2008

Pasal 1

Mengesahkan Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 ini sebagai pernyataan kebijakan pertahanan secara menyeluruh untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Pasal 2

Hal-hal yang tercantum dalam Buku Putih Pertahanan tahun 2003 sejauh tidak bertentangan dengan isi Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Februari 2008

---

MENTERI PERTAHANAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juwono Sudarsono', written in a cursive style.

JUWONO SUDARSONO





## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, "Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008" yang merupakan salah satu dari produk-produk strategis di bidang pertahanan telah dapat diselesaikan. Penyusunan buku ini, dibuat di tengah berlangsungnya era globalisasi, dan perkembangan konteks strategis yang mudah berubah. Indonesia, merupakan bagian dari masyarakat dunia, tak dapat mengelak tuntutan perubahan tersebut. Termasuk dalam sejumlah maraknya isu keamanan yang berimplikasi terhadap kehidupan nasional. Oleh karena itu, guna menghadapi sejumlah isu keamanan. Pemerintah melaksanakan fungsi pertahanan dalam rangka penegakan kedaulatan nasional, menjaga keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi keselamatan bangsa dari setiap ancaman. Dari luar maupun dalam negeri.

"Buku Putih" ini merupakan suatu rumusan pernyataan dan kebijakan pertahanan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan fungsi pertahanan negara.

Dengan terbitnya Buku Putih ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan segenap lapisan masyarakat Indonesia dalam memahami secara jelas kebijakan pertahanan negara. Buku ini, juga penting bagi Indonesia dalam menjalin kerjasama internasional. Mengingat, sikap keterbukaan,

khususnya tentang kebijakan pertahanan negara adalah salah satu upaya dalam rangka membangun rasa saling percaya dengan negara lain.

Saya selaku pimpinan Departemen Pertahanan Republik Indonesia menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas bimbingan dan petunjuk-Nya Buku Putih ini dapat diterbitkan sesuai rencana. Tidak lupa saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyiapan Buku Putih ini. Saya yakin, peran serta tersebut merupakan Dharma Bhakti bagi Bangsa dan NKRI yang kita banggakan dan cintai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah Nya kepada seluruh Bangsa Indonesia.

Jakarta, 18 Februari 2008

Menteri Pertahanan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juwono Sudarsono', written in a cursive style.

Juwono Sudarsono



# DAFTAR ISI

<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang Pemutakhiran Buku Putih .....	1
Esensi Pemutakhiran Buku Putih .....	4
<b>LINGKUNGAN KEAMANAN STRATEGIS INDONESIA .....</b>	<b>6</b>
Tinjauan Umum .....	6
Kondisi Keamanan Global.....	8
Terorisme dan Pola Penanganannya .....	10
Isu Senjata Pemusnah Massal.....	11
Peningkatan Kebutuhan Energi Dunia Serta Dampaknya terhadap Keamanan Global.....	11
Isu Ancaman Keamanan Lintas Negara.....	13
Dampak Pemanasan Global .....	13
Bencana Alam .....	14
Kondisi Keamanan Regional .....	15
Konflik Eksternal dan Internal .....	15
Keamanan Maritim.....	16
Kondisi Keamanan Dalam Negeri.....	17
Nasional.....	18
Provinsial .....	23
Lokal .....	25
<b>HAKIKAT DAN PENGGOLONGAN ANCAMAN.....</b>	<b>27</b>



Ancaman Militer .....	27
Ancaman Nirmiliter .....	31

## **KONSEPSI PERTAHANAN NEGARA ..... 39**

Kepentingan Nasional .....	39
Hakikat Pertahanan Negara .....	43
Tujuan Pertahanan Negara. ....	44
Sistem Pertahanan Negara.....	45
Fungsi Pertahanan Negara.....	46
Spektrum Konflik.....	49
Kepentingan Strategis Pertahanan Indonesia.....	51
Kepentingan Strategis yang Bersifat Permanen .....	52
Kepentingan Strategis yang Bersifat Mendesak .....	53
Kepentingan Strategis di bidang Kerja sama Pertahanan.....	58
Sasaran Strategis Pertahanan Negara .....	60
Terselenggaranya pertahanan negara untuk menangkal segala bentuk ancaman dan gangguan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan seluruh bangsa Indonesia.....	61
Terselenggaranya pertahanan negara untuk menghadapi perang dari agresi militer oleh negara asing.....	62
Terselenggaranya pertahanan negara untuk menanggulangi ancaman militer yang mengganggu eksistensi dan kepentingan NKRI. ....	62
Terselenggaranya pertahanan negara dalam menangani ancaman nirmiliter yang berimplikasi terhadap kedaulatan Negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa Indonesia. ....	63



Terselenggaranya pertahanan negara untuk mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional. .... 64

## **KEBIJAKAN STRATEGIS PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA. 65**

Penangkalan.....	65
Menghadapi Ancaman Militer .....	66
Menghadapi Agresi Militer .....	68
Lapis Diplomasi .....	69
Lapis Perlawanan Rakyat Tidak Bersenjata .....	70
Lapis Pertahanan Militer .....	71
Menghadapi Ancaman Militer Berbentuk Bukan Agresi.....	71
Menangani Pelanggaran Wilayah.....	72
Mengatasi Gerakan Separatisme dan Pemberontakan Bersenjata.....	73
Menghadapi Ancaman Nirmiliter .....	81
Menghadapi Ancaman Berdimensi Ideologi .....	82
Menghadapi Ancaman Berdimensi Politik .....	84
Menghadapi Ancaman Berdimensi Ekonomi .....	87
Menghadapi Ancaman Berdimensi Sosial Budaya.....	89
Menghadapi ancaman Berdimensi Berbasis Teknologi dan Informasi .....	90
Menghadapi Ancaman Berdimensi Keselamatan Umum.....	92
Pertahanan Militer dalam Menghadapi Ancaman Nirmiliter Bersifat Lintas Negara .....	94

## **PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN NEGARA ..... 97**

Bagian Kesatu.....	97
Garis Besar Pembangunan Jangka Panjang .....	97



## DEPARTEMEN PERTAHANAN RI

---

Bidang Pertahanan Negara .....	97
Kondisi Umum Pertahanan Negara .....	97
Tantangan yang Dihadapi .....	99
Arah Pembangunan Jangka Panjang Bidang Pertahanan Negara...	102
Bagian Kedua .....	107
Reformasi Pertahanan Negara .....	107
Bagian Ketiga .....	116
Pembangunan Kapabilitas Pertahanan Negara .....	116
Kerangka Pokok Kapabilitas Pertahanan Negara .....	116
Pengorganisasian Kekuatan Pertahanan.....	116
Strategi Perancangan Kapabilitas Pertahanan Negara. ....	119
Pertahanan Militer .....	119
Pertahanan Nirmiliter .....	133
Standar Kesejahteraan Prajurit .....	138
Bagian Keempat.....	140
Kerja Sama di Bidang Pertahanan.....	140
Umum.....	140
Kerja sama di bidang pertahanan di Kawasan Asia Tenggara .....	140
Kerja sama di Bidang Pertahanan dengan Thailand. ....	143
Kerja Sama di Bidang Pertahanan dengan Malaysia .....	144
Kerja sama di Bidang Pertahanan dengan Singapura .....	144
Kerja sama di Bidang Pertahanan dengan Filipina.....	145
Kerja sama di Bidang Pertahanan dengan Brunei .....	145
Kerja sama di Bidang Pertahanan dengan Anggota ASEAN Lainnya	146
Kerja sama di bidang pertahanan di luar ASEAN .....	146
Kerja sama di Bidang Pertahanan dengan Amerika Serikat.....	146
Kerja sama di Bidang pertahanan dengan Australia .....	147
Kerja sama di Bidang Pertahanan dengan Cina. ....	148



## DEPARTEMEN PERTAHANAN RI

---

---

Kerja sama di bidang pertahanan dengan India .....	148
Kerja sama di bidang pertahanan dengan Korea Selatan.....	149
Kerja sama di Bidang Pertahanan dengan Jepang .....	149
Kerja sama di Bidang Pertahanan dengan Rusia.....	150
Kerja sama di bidang pertahanan dengan Uni Eropa.....	150
Kerja sama Pertahanan di bidang Penanganan Bencana Alam .....	151
Tugas Perdamaian Dunia .....	152
Bagian Kelima.....	156
Pembangunan Industri Pertahanan.....	156
Menuju Kemandirian Sarana Pertahanan.....	156
Mewujudkan Industri Pertahanan Dalam Negeri.....	159
Kerja sama Dalam Pengembangan Industri Pertahanan .....	161
<b>ANGGARAN PERTAHANAN.....</b>	<b>163</b>
Dukungan Anggaran Pertahanan Saat ini .....	163
Proyeksi ke Depan .....	164







## BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA TAHUN 2008

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Buku Putih

Pada tahun 2003, untuk pertama kalinya sejak era Reformasi, Departemen Pertahanan meluncurkan Buku Putih Pertahanan yang berjudul *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad XXI*. Buku Putih tersebut telah menjadi media untuk mengkomunikasikan kebijakan pemerintah Indonesia di bidang pertahanan negara kepada masyarakat, baik domestik maupun internasional. Masyarakat pada umumnya memberikan tanggapan yang cukup positif terhadap Buku Putih tersebut dan menjadi salah satu referensi yang digunakan oleh berbagai kalangan.

Buku Putih tersebut juga banyak memberikan kontribusi dalam rumusan materi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam lingkup domestik, buku tersebut banyak memberikan kontribusi dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pertahanan negara dalam konteks demokrasi. Dalam konteks hubungan antarbangsa, Buku Putih tersebut menjadi media yang cukup efektif dalam membangun rasa saling percaya dengan negara-negara lain, baik pada tataran regional maupun supraregional. Singkatnya, keberadaan Buku Putih itu cukup efektif dan bermanfaat dalam mengkomunikasikan kepentingan nasional di bidang pertahanan.



Setelah lebih dari empat tahun *Buku Putih Edisi Pertama* tersebut diluncurkan, telah terjadi banyak perubahan. Pada bulan Oktober 2004 pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat legitimasi dari rakyat Indonesia dan pengakuan dunia internasional untuk memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam periode pemerintahan lima tahun, dari tahun 2004 sampai dengan 2009. Bersamaan dengan itu, Presiden membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Sejak itu, kepemimpinan beserta berbagai kebijakan yang terkait, termasuk Departemen Pertahanan, diminta melakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, baik di tingkat global, regional maupun nasional. Perubahan yang terjadi tersebut telah menghadirkan banyak perubahan dalam kebijakan dan arah penyelenggaraan pertahanan Indonesia. Sejalan dengan itu, penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia 2005--2024 telah menghadirkan suatu perubahan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. RPJP tersebut memuat, antara lain, Pokok-Pokok Pembangunan Pertahanan Jangka Panjang 20 Tahunan sampai dengan 2024. Perubahan tersebut mendorong perlunya melakukan pemutakhiran Buku Putih.

Perkembangan penting lain adalah reformasi pertahanan negara. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, banyak langkah konkret telah dilakukan, terutama di lingkup Departemen Pertahanan dan TNI. Materi Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia tersebut, selain merupakan produk Reformasi yang disusun dalam suasana yang sangat kondusif dan dibahas secara terbuka juga mencerminkan sinergi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatur TNI dalam kerangka negara hukum dan nilai-nilai demokrasi.



Kerja sama pertahanan menjadi salah satu substansi penting yang berkembang dalam kurun waktu empat tahun ini. Bencana alam tsunami di Aceh dan Nias pada tanggal 26 Desember 2004 telah membawa perubahan yang besar dalam desain kerja sama pertahanan Indonesia. Kalau di masa lalu lingkup kerja sama pertahanan lebih berorientasi pada aspek-aspek militer yang bersifat tradisional, seperti latihan bersama atau pendidikan bidang militer, ke depan akan lebih fleksibel dengan cakupan aspek-aspek nirmiliter kekuatan militer dapat dilibatkan. Aspek-aspek nirmiliter dimaksud di antaranya adalah penanggulangan dampak bencana alam atau bantuan kemanusiaan yang memerlukan penanganan segera.



Perkembangan penting lain dalam kerja sama pertahanan terjadi dalam peningkatan hubungan dengan beberapa negara, baik dalam lingkup regional maupun di luar kawasan. Dalam lingkup regional, kerja sama pertahanan dilaksanakan antara lain dalam pengamanan Selat



Malaka melalui forum Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN, serta usaha-usaha untuk mewujudkan Masyarakat Keamanan ASEAN, sedangkan kerja sama pertahanan di luar kawasan juga mengalami peningkatan dengan membangun kemitraan strategis di Kawasan Asia Pasifik dan beberapa anggota *Forum Regional ASEAN (ARF)*. Selama empat tahun terakhir juga terjadi peningkatan kerja sama pertahanan dengan beberapa negara yang diwujudkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pertahanan secara bilateral dan dialog pertahanan.

### **Esensi Buku Putih**

Substansi yang dalam Buku Putih edisi kali ini adalah pemutakhiran kebijakan pertahanan dalam konteks perubahan yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan fungsi pertahanan negara. Konteks perubahan, seperti yang diuraikan di atas mencakupi dinamika lingkungan strategis, baik global, regional maupun dalam konteks nasional, provinsi, dan lokal.

Dinamika konteks global dan regional telah mempengaruhi proses perubahan yang merambah tidak saja dalam kehidupan masyarakat dalam lingkup nasional, tetapi juga sampai pada lingkup provinsi dan lokal. Upaya bangsa-bangsa mewujudkan perdamaian dunia masih diperhadapkan pada isu-isu keamanan di beberapa kawasan, baik yang berdimensi keamanan tradisional maupun konflik internal yang berskala besar. Sebagai bagian dari komunitas internasional, bangsa Indonesia menyelenggarakan pertahanan negara dalam nuansa keterbukaan (*transparansi*) sebagai perwujudan dari prinsip Indonesia yang cinta damai dan hidup berdampingan secara harmonis dengan negara-negara



lain. Dalam rangka mewujudkan komitmennya Indonesia secara aktif mengambil peran dalam mengusahakan perdamaian dunia, antara lain, dengan mengirimkan pasukan/kontingen ke beberapa wilayah konflik, serta aktif bersama-sama dengan negara-negara lain untuk mencari solusi terbaik dalam mencegah dan menangani isu-isu keamanan global dan regional.

Ciri era globalisasi adalah frekuensi interaksi tetap yang makin intensif. Dalam konteks tersebut pelibatan pertahanan negara dalam hubungan antar negara akan lebih meningkat dari waktu-waktu sebelumnya. Esensi Buku Putih pertahanan negara adalah Kebijakan Pertahanan Indonesia dalam mengelola pertahanan negara serta pandangan bangsa Indonesia di bidang pertahanan dalam memosisikan diri dalam konteks global dan regional. Atas dasar itu, Buku Putih Pertahanan menjadi media yang sangat penting dalam membangun saling percaya dengan negara-negara di dunia, sekaligus memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pertahanan.

Seiring dengan perkembangan global yang menghadirkan hakikat ancaman yang beragam dan kompleks antara ancaman militer dan ancaman nirmiliter semakin disadari bahwa pertahanan negara tidak cukup didekati dari aspek militer semata. Pendekatan pertahanan negara ke depan memerlukan pendekatan secara nirmiliter yang terpadu dengan pendekatan secara militer. Dengan demikian, pembangunan pertahanan militer dan nirmiliter harus dilaksanakan secara bersama-sama sehingga menghasilkan suatu kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang memiliki efek penangkalan dalam menjaga eksistensi dan keutuhan NKRI.



## LINGKUNGAN KEAMANAN STRATEGIS INDONESIA

### Tinjauan Umum

Stabilitas keamanan lingkungan strategis menjadi bagian dari kepentingan nasional Indonesia sehingga Indonesia berkepentingan untuk mencermati perkembangan situasi yang mengancam perdamaian dunia dan stabilitas regional agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat. Indonesia juga menyadari bahwa keamanan nasionalnya menjadi bagian dari kepentingan strategis negara-negara lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan fungsi pertahanan negara Indonesia diarahkan untuk mewujudkan stabilitas keamanan nasional yang kondusif bagi stabilitas regional dan global.

Lima negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, Cina, Rusia, Prancis, dan Inggris masih menjadi kekuatan yang memiliki pengaruh besar terhadap keamanan dunia dan kawasan. Selain negara-negara tersebut, juga terdapat kekuatan kolektif kawasan yang terus menunjukkan kinerjanya, yakni Uni Eropa dan ASEAN. Uni Eropa merupakan kekuatan kolektif yang terdiri atas negara-negara di Eropa yang umumnya maju di bidang ekonomi, teknologi dan militer, sedangkan ASEAN sebagai kekuatan kolektif di Kawasan Asia Tenggara terus berusaha membangun soliditas sesama anggota, bahkan memperluas kemitraannya dengan negara-negara di luar kawasan.

Dinamika lingkungan keamanan strategis tersebut mengisyaratkan tantangan yang besar dan kompleks bagi pertahanan negara dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Ancaman yang dihadapi pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan negara,



keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa semakin berkembang menjadi multidimensional, fisik dan nonfisik, serta berasal dari luar dan dari dalam negeri.

Dalam *Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2003* dinyatakan bahwa ancaman invasi atau agresi militer negara lain terhadap Indonesia diperkirakan kecil kemungkinannya. Dengan mencermati perkembangan lingkungan keamanan strategis Indonesia pasca-2003, pada saat ini dan dalam beberapa tahun akan datang belum terdapat indikasi suatu ancaman militer konvensional yang mengarah ke wilayah Indonesia. Namun, kondisi yang kondusif ini tidak lalu membuat Indonesia mengabaikan kesiapsiagaannya dalam membangun kemampuan bangsa untuk melindungi NKRI. Oleh karena itu, di sektor pertahanan negara harus terus dipersiapkan dengan memadukan kemampuan pertahanan militer dan nirmiliter untuk menangkal setiap kemungkinan ancaman serta apabila kondisi memaksa, mampu menghadapi segala perubahan situasi.

Dinamika interaksi global juga berimplikasi terhadap tantangan keamanan nasional dengan mengemukakan isu-isu keamanan baru yang berdimensi ancaman keamanan lintas negara. Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas ancaman keamanan lintas negara menunjukkan angka yang cukup signifikan dan telah mengancam ketenangan dan kenyamanan hidup manusia. Bagi Indonesia ancaman keamanan lintas negara menjadi salah satu tantangan untuk ditanggulangi secara serius dengan menggunakan pendekatan lintas lembaga, baik secara nirmiliter maupun militer.

Indonesia juga menempatkan isu-isu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan teknologi-informasi ke dalam lingkup pertahanan



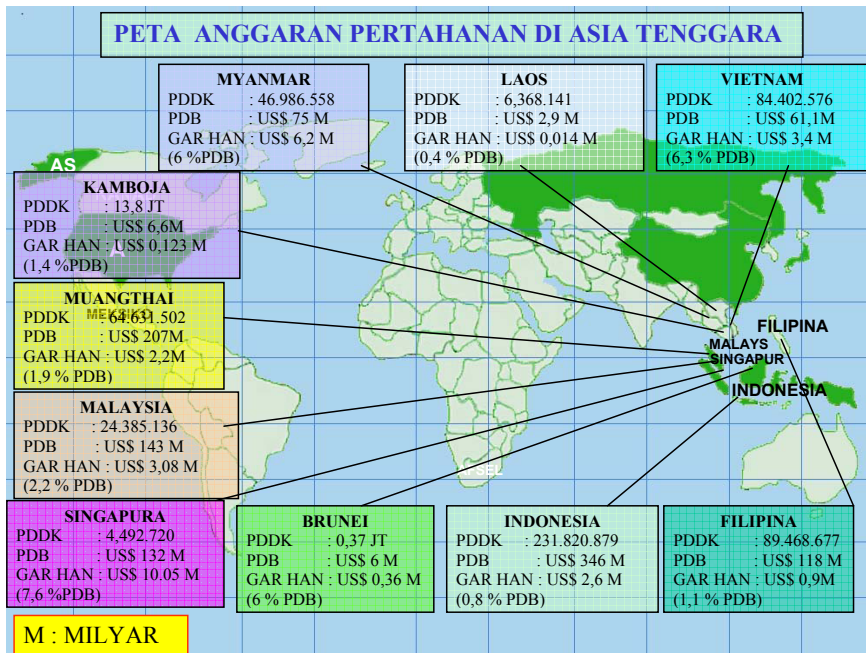
negara berdimensi nirmiliter. Isu-isu tersebut dalam skala tertentu dapat berkembang menjadi isu-isu pertahanan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan, dan kehormatan bangsa. Atas dasar itu, konsepsi pertahanan Indonesia dikembangkan untuk memberdayakan fungsi-fungsi nirmiliter dalam mewujudkan kondisi dalam negeri yang stabil yang memberikan efek tangkal terhadap setiap kemungkinan ancaman.

## Kondisi Keamanan Global

Isu global, seperti penguatan nilai-nilai demokrasi, penegakan hak asasi manusia, dan lingkungan hidup masih menjadi indikator yang mempengaruhi pola hubungan internasional, terutama hubungan antarnegara baik dalam skala bilateral maupun yang lebih luas. Isu-isu







tersebut bahkan sering pula dijadikan ukuran dalam membangun kerja sama pertahanan antarnegara. Implikasi perkembangan lingkungan global tersebut menghadirkan keberagaman permasalahan yang kompleks dan berakumulasi dalam kondisi ketidakpastian dengan derajat yang cukup tinggi.

Di bidang pertahanan dan keamanan kecenderungan perkembangan global mempengaruhi karakteristik ancaman dengan munculnya isu-isu keamanan baru yang memerlukan penanganan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif. Isu-isu keamanan tersebut, antara lain, adalah terorisme, ancaman keamanan lintas negara, dan proliferasi senjata pemusnah massal. Munculnya isu-isu keamanan baru tidak terlepas dari globalisasi, kemajuan teknologi informasi, identitas primordial, serta penguatan peran aktor non-negara. Bagi negara-negara berkembang,



isu keamanan baru banyak dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang kebanyakan masih berada dalam kategori miskin, bodoh, dan terbelakang.

### *Terorisme dan Konsep Penanganan Global.*

Serangan teroris 11 September 2001 telah mengubah paradigma tentang keamanan global. Terorisme menjadi ancaman yang sangat mengemuka sehingga konsep keamanan di setiap negara mengalami perubahan secara mendasar dari konsep lama yang lebih mengedepankan pendekatan konvensional kepada konsep baru yang lebih komprehensif. Nuansa penanganan isu terorisme telah mempengaruhi hubungan antarnegara dengan semakin menguatnya kerja sama di bidang pertahanan yang menempatkan penanganan isu terorisme sebagai agenda utama.

Di bidang penyelenggaraan pertahanan, isu terorisme membawa beberapa implikasi. Sebagai ancaman nyata, terorisme mengancam jiwa manusia dan mengancam kehormatan negara. Sebagai ancaman nyata, terorisme menghadirkan ketidakpastian tentang kapan dan di mana aksi terorisme akan terjadi sehingga menuntut kesiapsiagaan kekuatan nasional untuk menghadapinya. Dalam perspektif pertahanan negara, terorisme menjadi ancaman keselamatan bangsa sehingga menjadi bagian dari tugas dan fungsi pertahanan negara.

Meskipun terorisme menjadi ancaman global, dalam pola penanganannya, masing-masing negara berbeda dalam memilih instrumen negara yang menanganinya. Hal ini sering menjadi problematik dalam penyusunan kebijakan pertahanan karena adanya sensitivitas politik dan hukum di balik penanganan terorisme, terutama dalam penggunaan instrumen militer.



### *Isu Senjata Pemusnah Massal*

Pengembangan dan penyebaran senjata pemusnah massal juga menjadi salah satu isu keamanan global yang utama. Pengembangan dan penyalahgunaan senjata pembunuh massal, seperti senjata nuklir, biologi, dan kimia, secara langsung atau tidak langsung dapat mengancam keamanan dunia dan menjadi malapetaka yang dahsyat bagi umat manusia dan lingkungan hidup. Adanya sejumlah negara yang memiliki senjata nuklir mendorong kekhawatiran tentang penyalahgunaannya yang dapat mengancam perdamaian dunia. Pada sisi lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat dan mengglobal memudahkan manusia untuk menemukan formula atau cara untuk melakukan proliferasi senjata pemusnah massal. Kemudahan ini dapat pula dimanfaatkan oleh kelompok teroris dan separatis untuk mengembangkan senjata pembunuh massal.

Indonesia memiliki komitmen untuk menentang setiap usaha proliferasi senjata pemusnah massal, yang sejalan dengan komitmen untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas nuklir. Indonesia bahkan tidak akan mengembangkan senjata nuklir, kecuali untuk maksud damai, seperti untuk pembangkit tenaga listrik tenaga nuklir, keperluan medis, dan penelitian.

### *Peningkatan Kebutuhan Energi Dunia Serta Dampaknya terhadap Keamanan Global*

Isu keamanan energi dalam dekade terakhir ini semakin mengemuka dan diperkirakan akan berdampak terhadap keamanan global dalam tahun-tahun yang akan datang. Kebutuhan masyarakat



dunia akan energi minyak dan gas bumi yang terus meningkat, sementara ketersediaannya semakin terbatas, berimplikasi secara politik, ekonomi, dan keamanan.

Kebangkitan ekonomi di negara-negara yang mempunyai pengaruh besar terhadap keamanan kawasan dan keamanan global ikut mendorong meningkatnya kebutuhan energi secara global. Sifat energi minyak dan gas bumi yang tidak dapat diperbaharui, lambat laun akan semakin langka, sementara kebutuhan dunia terus meningkat. Kondisi, seperti itu menyebabkan krisis energi di masa-masa datang akan semakin serius dan dapat menjadi sumber konflik antarnegara. Meningkatnya ketergantungan energi dan terbatasnya sumber daya minyak dan gas bumi telah mengakibatkan kenaikan harga minyak dan gas berada jauh di atas harga yang wajar. Harga minyak yang terus menaik telah mengakibatkan kenaikan semua kebutuhan pokok manusia dan berdampak signifikan terhadap stabilitas perekonomian secara global.

Bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, kenaikan harga minyak bumi membawa dampak terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan terutama menambah beban pada anggaran dan belanja negara. Pada lingkup masyarakat, kenaikan harga minyak dunia berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa yang tidak seimbang dengan daya beli masyarakat. Kenaikan dapat berpotensi mendorong gejolak sosial apabila kenaikan tersebut tidak dapat dikelola secara tepat. Terbatasnya sumber daya energi minyak mendorong kekhawatiran munculnya persaingan baru di berbagai kawasan yang dipicu oleh kebutuhan untuk mengamankan penguasaan sumber energi.



### *Isu Ancaman Keamanan Lintas Negara*

Kondisi keamanan global diwarnai oleh meningkatnya intensitas ancaman keamanan asimetris dalam bentuk ancaman keamanan lintas negara. Aksi perompakan, penyelundupan senjata dan bahan peledak, penyelundupan wanita dan anak-anak, imigran gelap, pembalakan liar, pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba), perdagangan manusia serta pencurian ikan merupakan bentuk ancaman keamanan lintas negara yang paling menonjol pada dekade terakhir.

Meningkatnya aksi ancaman keamanan lintas negara tersebut telah mempengaruhi kebijakan keamanan global dan pertahanan negara-negara besar yang menempatkan isu-isu tersebut sebagai isu keamanan bersama. Bagi Indonesia ancaman keamanan lintas negara telah sangat merugikan kepentingan nasional sehingga merupakan suatu prioritas untuk ditangani, termasuk bekerja sama dengan sejumlah negara sahabat.

### *Dampak Pemanasan Global*

Salah satu fenomena baru yang dihadapi umat manusia di dunia adalah pemanasan global yang terjadi karena efek rumah kaca akibat dari perusakan lingkungan hidup yang terus berlanjut dan emisi gas buang industri yang sulit dikendalikan. Pemanasan global tersebut telah mengakibatkan perubahan iklim secara ekstrem yang melanda hampir semua negara.

Perubahan musim yang tidak menentu, serta perusakan lingkungan



hidup yang terus berlanjut, membawa dampak serius terhadap kehidupan manusia, antara lain terjadinya kelaparan, kemiskinan, kelangkaan sumber daya air, gangguan kesehatan, serta menimbulkan bencana alam. Fenomena global tersebut apabila tidak dapat ditangani secara baik akan berdampak luas sehingga dapat menjadi isu keamanan yang serius dan melanda bangsa-bangsa di dunia. Salah satu dampak pemanasan global adalah naiknya permukaan air laut di daerah tropis, seperti Indonesia. Dalam hal ini beberapa pulau di Indonesia berpotensi akan tenggelam, serta ancaman gelombang pasang di sejumlah wilayah di Indonesia yang akan berdampak pada kegiatan pelayaran dan kehidupan para nelayan serta keamanan masyarakat di wilayah pesisir.

### *Bencana Alam*

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat telah membawa implikasi terhadap degradasi lingkungan hidup. Salah satu dampaknya berupa bencana alam yang melanda sejumlah negara yang menimbulkan kerusakan dahsyat terhadap infrastruktur dan harta benda serta menelan korban jiwa yang cukup besar. Negara-negara di dunia makin menyadari pentingnya kerja sama untuk mengatasi dampak bencana alam, dan menjadi agenda forum internasional untuk dipecahkan bersama. Kesadaran masyarakat internasional dalam penanggulangan dampak bencana alam ini akan mempengaruhi pola kerja sama pertahanan di masa-masa datang.

Posisi geografi dan geologi Indonesia, yang terletak pada cincin gunung berapi dan pertemuan sejumlah lapisan kerak bumi sangat rawan terhadap bencana alam yang berupa gempa vulkanik dan tektonik, tsunami, banjir, serta tanah longsor. Perkembangan yang terjadi dalam



beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa frekuensi terjadinya bencana alam di Indonesia mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Kecenderungan ini mempengaruhi kebijakan pertahanan negara, baik penyiapan kekuatan maupun logistik dan prosedur penggunaan kekuatan.

### **Kondisi Keamanan Regional**

Berakhirnya Perang Dingin menciptakan ketidakpastian di Kawasan Asia Pasifik, yang sangat berkaitan dengan pola hubungan antarnegara serta peran dan intensi mereka di masa depan. Isu keamanan regional masih diliputi oleh konflik potensial, seperti klaim teritorial dan ketegangan militer peninggalan era tersebut. Konflik potensial tersebut dalam derajat tertentu menimbulkan krisis yang mengancam stabilitas keamanan kawasan dan Indonesia. Meskipun secara geografis terjadi jauh dari wilayah Indonesia, beberapa krisis di antaranya membawa dampak terhadap Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung.

Secara umum, isu keamanan kawasan yang menonjol adalah isu terorisme, ancaman keamanan lintas negara, dan konflik komunal. Sementara itu, dalam skala terbatas, di beberapa negara masih terdapat konflik antarnegara yang berbasis pada klaim teritorial.

#### *Konflik Eksternal dan Internal*

Salah satu isu keamanan regional yang masih mengemuka adalah konflik antarnegara yang berkaitan dengan klaim teritorial. Isu yang menonjol antara lain perselisihan wilayah Kashmir antara India dan Pakistan, permasalahan di Semenanjung Korea, Konflik antara Lebanon



dan Israel, masalah perdamaian Israel dengan Palestina, serta persoalan Cina-Taiwan. Di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya, klaim tumpang tindih perbatasan di kawasan Laut Cina Selatan tidak terlalu mengemuka pada saat ini. Namun, klaim ini tetap menjadi potensi konflik yang dapat melibatkan beberapa negara.

Selain potensi konflik antarnegara, isu menonjol lain adalah konflik dalam negeri yang berdimensi vertikal dan horizontal, yang masih terjadi di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Ancaman keamanan lintas negara, seperti terorisme, perompakan bersenjata, penangkapan ikan secara ilegal, merupakan isu keamanan kawasan yang sedang mengemuka. Di samping itu, terdapat pula konflik internal yang berbasis SARA, separatisme, dan radikalisme yang anarkis di beberapa negara di kawasan dan sekitarnya. Indonesia berada dalam kawasan yang kondisinya relatif mengalami isu-isu keamanan seperti disebutkan di atas. Indonesia tidak mungkin dapat hidup tenang dalam kawasan yang mengalami konflik karena dapat terkena limbah konflik, seperti gelombang pengungsian, peredaran senjata gelap, dan pelintasan perbatasan secara ilegal.

### *Keamanan Maritim*

Keamanan maritim adalah salah satu isu keamanan kawasan yang menonjol yang mendapat perhatian di Abad XXI. Menonjolnya isu tersebut terkait dengan fungsi wilayah maritim yang makin strategis dalam kepentingan negara-negara di dunia yang mendorong upaya untuk meningkatkan pengamanannya. Wilayah maritim masih menjadi urat nadi utama interaksi ekonomi global sehingga keamanan maritim merupakan isu krusial bagi banyak negara di dunia.





Di Kawasan Asia Tenggara, wilayah Selat Malaka tetap menjadi fokus masyarakat internasional karena lalu-lintas transportasi perdagangan dunia melalui perairan tersebut. Posisi strategis Selat Malaka telah mendorong keinginan negara-negara kekuatan utama untuk ikut berperan langsung dalam pengamanan Selat Malaka. Bagi Indonesia pengamanan langsung Selat Malaka merupakan hak kedaulatan bagi Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Namun demikian Indonesia mengakui kepentingan pengguna lainnya dan berpartisipasi dalam pengamanan tidak langsung dalam bentuk pembangunan kapasitas seperti pendidikan, pelatihan maupun berbagai informasi.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di antara Benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik, di satu sisi mempunyai posisi strategis sekaligus tantangan besar dalam mengamankannya. Sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki tiga ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dan beberapa *choke points* yang strategis bagi kepentingan global, seperti di Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Pengamanan ALKI serta seluruh *choke points* tersebut merupakan agenda strategis bagi kepentingan nasional Indonesia serta masyarakat internasional.

### **Kondisi Keamanan dalam Negeri**

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang didiami oleh lebih dari 300 suku bangsa membentuk kondisi yang sangat majemuk. Kondisi yang heterogen tersebut berimplikasi pula terhadap kategorisasi isu-isu keamanan sesuai dengan besarnya untuk dikelompokkan dalam isu keamanan yang berskala nasional, provinsi atau lokal.



### Nasional

Karakteristik geografis Indonesia mengandung tantangan yang multidimensi sehingga menuntut adanya strategi pertahanan negara yang tepat untuk mengamankan wilayah tersebut. Tugas untuk melindungi dan mengamankan Indonesia dengan karakteristik negara kepulauan mengisyaratkan tantangan yang kompleks dan berimplikasi pada tuntutan pembangunan dan pengelolaan sistem pertahanan negara untuk menghasilkan daya tangkal yang andal.

Dalam bidang pertahanan, terdapat sejumlah isu yang menonjol, di antaranya adalah isu perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, separatisme, terorisme, radikalisme yang anarkis, konflik komunal, bencana alam, dan kondisi politik pascareformasi.

#### *Isu Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar*

Indonesia masih mempunyai sejumlah persoalan batas wilayah, baik perbatasan darat maupun maritim yang hingga kini belum selesai. Berbagai permasalahan tersebut berhubungan langsung dengan kedaulatan negara yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah, antara lain melalui pendayagunaan fungsi pertahanan, baik fungsi pertahanan militer maupun nirmiliter secara terintegrasi demi mencapai hasil yang maksimal. Dalam menangani masalah perbatasan Indonesia akan tetap teguh mematuhi berbagai Hukum Internasional yang berlaku, termasuk UNCLOS tahun 1982.

Isu tentang pulau-pulau kecil terluar cukup beragam dan kompleks, di antaranya menyangkut eksistensi, status kepemilikan, konversi lingkungan, pengamanan dan pengawasannya. Eksistensi



pulau-pulau kecil terluar sangat vital dalam penentuan batas wilayah Indonesia. Pulau-pulau tersebut berfungsi sebagai titik pangkal penarikan batas wilayah NKRI dan menjadi isu pertahanan yang serius dalam konteks kedaulatan dan keutuhan wilayah. Sementara itu, upaya untuk mewujudkan kehadiran secara fisik dan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum maksimal. Di sisi lain kondisi pulau-pulau kecil terluar semakin kritis karena banyak yang tidak berpenghuni dan kondisi alamnya tidak layak untuk dihuni, antara lain tidak terdapat kandungan daya air tawar serta ruang hidup yang tidak cukup.

Dalam bidang pengamanan pulau-pulau kecil terluar berpotensi diperjualbelikan atau disewakan secara tidak sah kepada pihak atau warga negara asing. Dari beberapa kasus ditemukan beberapa pulau kecil yang dikelola oleh perorangan, bahkan ada yang dikelola oleh pihak asing. Praktik-praktik tersebut menjadi ancaman yang dikemudikan hari dapat menyulitkan pemerintah dan bangsa Indonesia.

### *Separatisme*

Gerakan separatis masih menjadi isu keamanan dalam negeri, baik dalam bentuk gerakan separatis politik maupun gerakan separatis bersenjata. Masih terdapat pihak-pihak yang berkeinginan untuk memisahkan diri dari NKRI dengan mengeksploitasi kelemahan penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Indonesia menempatkan separatisme sebagai ancaman yang serius karena secara langsung mengancam keutuhan wilayah NKRI dan mengancam keselamatan bangsa. Akar masalah separatisme terletak pada distribusi hak-



hak politik, ekonomi, dan distribusi keadilan yang tidak merata, yang menyebabkan kelompok tertentu merasa tidak nyaman untuk tinggal di dalam naungan NKRI. Selama akar masalah tersebut tidak dipecahkan, potensi separatisme akan selalu ada.

Bangsa Indonesia menyadari dan memiliki komitmen bahwa berada dalam wadah NKRI merupakan putusan politik yang tepat dan final. Sesuai dengan amanat undang-undang, pertahanan negara berfungsi untuk menjamin keutuhan wilayah NKRI. Namun, diakui usaha untuk mengatasi akar masalah separatisme belum dapat diwujudkan secara penuh antara lain akibat belum merata dan terpadunya pembangunan nasional.

### *Terorisme*

Bagi Indonesia, ancaman terorisme telah menjadi ancaman nyata. Sejak peristiwa pembajakan pesawat Garuda Indonesia Woyla dalam penerbangan dari Jakarta ke Bangkok pada tahun 1980, Indonesia mengalami beberapa kali



aksi terorisme. Sejak tahun 2000, telah terjadi sejumlah peristiwa aksi terorisme, bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang menderita korban aksi terorisme secara berturut-turut dalam skala besar, yaitu Bom Bali I (2002), bom Hotel Marriott (2003), bom di Kedutaan Australia, Jakarta (2004), dan bom Bali II (2005).

Upaya menumpas terorisme harus pula dilihat dari akar permasalahannya, yang menurut pengalaman Indonesia di antaranya



berupa kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Selain faktor itu, terdapat pula masalah lain yaitu ideologi kekerasan dari kelompok teroris. Dari hal-hal tersebut, penanggulangan terorisme juga merupakan bagian dari upaya menyeluruh dalam perang melawan ketidakamanan yang multidimensi dengan cakupan, antara lain dalam mengatasi kemiskinan, kerusakan lingkungan, penyakit pandemi, kebodohan, dan keterasingan.

Bagi Indonesia, aksi terorisme selain merupakan kejahatan kriminal luar biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan juga merupakan ancaman terhadap keamanan nasional. Dalam hal ini terorisme merupakan ancaman yang harus dihadapi oleh seluruh elemen bangsa tidak saja oleh polisi dan militer, tetapi juga oleh ilmuwan, ulama, dan tokoh-tokoh agama. Dari berbagai kasus terorisme juga terlihat karakter bahwa baik subjek maupun objek terorisme bersifat internasional, sekaligus domestik (intermestik). Oleh karena itu, Indonesia turut aktif menjalin kerjasama menanggulangi terorisme secara bilateral maupun multilateral.

### *Konflik Komunal*

Dalam *Buku Putih Pertahanan Tahun 2003*, konflik komunal pada umumnya berakar dari fanatisme suku, daerah, agama, golongan, kedewasaan berpolitik yang masih rendah, benturan kepentingan antar golongan, serta faktor ketidakadilan dalam penegak hukum. Indonesia mengalami beberapa konflik komunal yang menimbulkan korban dalam beberapa tahun terakhir. Konflik itu merupakan tantangan yang harus dicegah dan dipecahkan melalui pendekatan-pendekatan yang rasional dalam usaha membangun



nasionalisme serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemerintah telah berupaya mengatasi konflik-konflik tersebut dengan memadukan segala kemampuan sumber daya yang ada. Saat ini konflik tersebut telah dapat teratasi dengan baik, terbukti dengan terciptanya keharmonisan dan stabilitas di masyarakat. Langkah-langkah rehabilitasi sosial dan pembangunan kembali infrastruktur terus dilaksanakan oleh pemerintah. Kondisi yang harmonis dan kondusif ini diupayakan untuk terus dipelihara dan dipertahankan dengan pembinaan terus-menerus unsur-unsur di masyarakat agar secara aktif berpartisipasi dalam penciptaan kondisi yang menunjang stabilitas keamanan di daerah.

### *Radikalisme yang Anarkis*

Penanganan isu-isu global secara unilateral atau tidak seimbang sering menjadi pendorong bangkitnya gerakan radikalisme. Dalam perkembangannya gerakan radikalisme sering ditunggangi atau bergabung dengan kelompok separatis dan terorisme untuk melakukan aksi kejahatan atau tindakan anarkis. Gerakan radikalisme selalu mengganggu stabilitas keamanan sehingga perlu penanganan secara serius sesuai dengan hukum tanpa diskriminasi. Gerakan radikal berpotensi mengganggu kepentingan publik, baik masyarakat domestik maupun internasional, karena itu penanganannya sangat mendesak. Apabila penanganannya tidak serius, hal tersebut tidak saja merugikan citra bangsa Indonesia, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk kekuatan asing dengan dalih intervensi kemanusiaan.



### *Dinamika Politik*

Berbagai dinamika dan perubahan politik yang berkembang pada era Reformasi banyak mengalami perubahan dan cenderung mengarah kepada kondisi ketidakpastian yang semakin tinggi. Demokrasi yang berkembang seluas-luasnya belum diikuti dengan pengetahuan, kesiapan, dan kedewasaan masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi tersebut. Nuansa kebebasan yang ditandai dengan keran politik yang semakin terbuka lebar cenderung berkembang ke arah kebebasan tanpa batas.

Disadari bahwa sistem pemerintahan demokrasi merupakan sistem yang terbaik. Namun, demokrasi tidak senantiasa identik dengan efektif dan efisien. Karena itu sistem demokrasi yang dipilih rakyat Indonesia harus diisi dengan pemerintahan yang baik berdasarkan sejumlah prinsip, di antaranya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Dengan belajar dari berbagai negara yang berhasil pada era globalisasi, itu merupakan keniscayaan bagi Indonesia untuk tetap memegang teguh penegakan hak asasi manusia, lingkungan hidup, kesetaraan gender, kebijakan nondiskriminatif, kebebasan beragama dan penguasaan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Penggunaan prinsip-prinsip di atas diharapkan dapat digunakan untuk mengelola dinamika politik secara baik, termasuk isu-isu yang berdimensi pertahanan negara.

### Provinsial

Otonomi daerah merupakan kebijakan Pemerintah yang



diarahkan untuk percepatan dan pembangunan di daerah. Penerapan secara serentak dan menyeluruh tidak diikuti dengan kesiapan daerah sehingga menimbulkan sejumlah isu, antara lain, terkait dengan isu otonomi khusus, ketimpangan pembangunan di luar Pulau Jawa, dan tata ruang wilayah.

Sejak pemberlakuan otonomi daerah, sejumlah daerah berusaha menuntut Pemerintah Pusat untuk memberikan status otonomi khusus. Status tersebut cenderung diinterpretasikan sebagai hak untuk mengurus wilayah sendiri yang menyentuh bidang-bidang pemerintahan, hukum, agama, bahkan termasuk keamanan. Tuntutan tersebut apabila tidak dapat dikelola secara tepat dapat berkembang menjadi potensi konflik vertikal yang berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembangunan nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara daerah-daerah di luar Jawa mengalami ketimpangan yang cukup jauh. Akibatnya Pulau Jawa menjadi sasaran urbanisasi dalam jumlah besar yang tidak diimbangi dengan daya tampung dan tata ruang yang memadai. Kondisi tersebut ikut menambah ketimpangan pembangunan di daerah-daerah dan pada skala tertentu dapat menjadi isu stabilitas nasional.

Isu lain yang juga cukup menonjol adalah tata ruang wilayah. Penataan ruang wilayah yang diterapkan dalam pembagian kawasan-kawasan pembangunan mengandung potensi permasalahan yang kompleks. Dengan mengingat isu tata ruang terkait dengan ruang hidup dan kegiatan masyarakat serta bersifat lintas instansi, niscaya diperlukan penanganan yang seksama untuk dapat mempertemukan semua kepentingan, tanpa menimbulkan implikasi terhadap stabilitas nasional.





### Lokal

Pada tingkat lokal, gejala globalisasi semakin terasa dan telah menjangkau masyarakat yang berdomisili di pelosok. Kondisi tersebut telah mendorong terjadinya mobilitas penduduk, baik secara fisik, yakni melalui migrasi penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, maupun dalam wujud komunikasi antarmasyarakat yang makin mudah dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan informasi yang makin menjangkau rakyat biasa dan bersifat ramah bagi pengguna. Perkembangan ini mendorong berlangsungnya pertukaran nilai secara serta-merta yang sulit dibendung dan cenderung mempercepat berkembangnya pola hidup modern dengan ciri kehidupan yang bebas dan praktis yang tidak jarang bertentangan dengan nilai-nilai lokal.

Hal lain yang juga menonjol adalah timbulnya penguatan identitas lokal sebagai respons masyarakat dalam menyikapi pemberlakuan Otonomi Daerah. Penguatan identitas lokal banyak dimunculkan dalam kemasan isu putra daerah, hak adat, dan hak ulayat. Kondisi yang berkembang seperti ini sangat kontraproduktif dengan prinsip bangsa Indonesia, yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*. Penguatan identitas lokal yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menyulut konflik horizontal yang berdimensi suku, agama, ras dan antargolongan, serta antarkepentingan.

Tantangan yang tidak kalah signifikan adalah permasalahan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Dalam konteks pertahanan, aspek ini berdimensi pertahanan nirmiliter yang memerlukan penanganan dengan pendekatan multisektoral dan integratif.



Bencana alam selain menjadi tantangan yang berskala nasional, juga memiliki dimensi lokal. Baik departemen dan lembaga teknis pemerintah, lembaga-lembaga riset maupun perguruan tinggi, termasuk sumber dari luar negeri, memetakan bahwa hampir semua daerah di Indonesia rawan terhadap bencana alam dengan bentuk yang bervariasi, seperti tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, kelangkaan sumber daya air, dan kebakaran hutan. Upaya peningkatan infra struktur dan kemampuan peringatan dini, pencegahan dini, serta kesiapan tindak dalam tanggap darurat merupakan suatu keniscayaan.





## HAKIKAT DAN PENGGOLONGAN ANCAMAN

Persepsi Indonesia tentang ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Berdasarkan sifat ancaman, hakikat ancaman digolongkan ke dalam ancaman militer dan ancaman nirmiliter.

### **Ancaman Militer**

*Ancaman militer* adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal.

Agresi suatu negara yang dikategorikan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terendah. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Invasi berlangsung secara eskalatif, mulai dari kondisi politik yang terus memburuk, diikuti dengan persiapan-persiapan kekuatan militer dari negara yang akan melakukan invasi.



Agresi juga dapat berupa bombardemen, yakni penggunaan senjata dalam bentuk lain, blokade pelabuhan, pantai, wilayah udara atau seluruh wilayah negara, dan dapat pula berbentuk serangan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat, laut, dan udara. Keberadaan atau tindakan unsur kekuatan bersenjata asing dalam wilayah NKRI yang bertentangan dengan ketentuan atau perjanjian yang telah disepakati merupakan salah satu bentuk agresi yang mengancam kedaulatan negara dan keselamatan bangsa. Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain untuk melakukan agresi atau invasi terhadap NKRI digolongkan ke dalam ancaman agresi. Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah NKRI adalah pelanggaran kedaulatan negara yang dikategorikan sebagai bentuk agresi suatu negara.

Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah Indonesia oleh negara lain. Konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Ancaman militer dapat pula terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Pemberontakan tersebut pada dasarnya merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri, tetapi pemberontakan bersenjata tidak jarang disokong oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup atau tersamar.

Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal,



seperti DI/TII, PRRI, Permesta, Kahar Muzakar, serta G-30-S/PKI. Beberapa sejumlah aksi pemberontakan bersenjata tersebut tidak hanya mengancam pemerintahan yang sah, tetapi juga mengancam tegaknya NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pemberontakan bersenjata sebagai bentuk ancaman terhadap NKRI dalam beberapa dekade terakhir telah berkembang dalam bentuk gerakan separatisme yang pola perkembangannya, seperti api dalam sekam. Gerakan radikal di masa lalu, serta sisa-sisa G-30-S/PKI berhasil melakukan regenerasi dan telah bermetamorfosis ke dalam berbagai bentuk organisasi kemasyarakatan dengan memanfaatkan euforia Reformasi untuk masuk ke segala lini dan elemen nasional. Kecenderungan tersebut memerlukan kecermatan dengan membangun suatu kewaspadaan nasional dari seluruh komponen bangsa Indonesia untuk mengikuti perkembangan regenerasi dan metamorfosis kelompok-kelompok yang diuraikan di atas.

Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase sehingga harus dilindungi. Aksi-aksi sabotase tersebut didukung dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak lawan untuk merancang ancaman sehingga memiliki intensitas yang lebih tinggi dan kompleks. Fungsi pertahanan negara ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap objek-objek vital nasional dan instalasi strategis dari setiap kemungkinan aksi sabotase dengan mempertinggi kewaspadaan yang didukung oleh teknologi yang mampu mendeteksi dan mencegah secara dini.

Pada abad modern kegiatan spionase dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara



dari negara lain. Kegiatan spionase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tidak mudah dideteksi. Kegiatan tersebut merupakan bentuk ancaman militer yang memerlukan penanganan secara khusus dengan pendekatan kontraspijase untuk melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan dimanfaatkan oleh pihak lawan.

Aksi teror bersenjata merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa perikemanusiaan. Sasaran aksi teror bersenjata dapat menimpa siapa saja sehingga sulit diprediksi dan ditangani dengan cara-cara biasa. Perkembangan aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris pada dekade terakhir meningkat cukup pesat dengan mengikuti perkembangan politik, lingkungan strategis, dan Iptek.

Sejak terorisme internasional berkembang menjadi ancaman global, aksi teror bersenjata yang berskala lokal ikut pula mengadopsi pola dan metode terorisme internasional, bahkan berkolaborasi dengan jaringan-jaringan teroris internasional yang ada. Sejumlah aksi teror yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia menunjukkan adanya hubungan dengan jaringan teroris internasional, terutama jaringan teroris yang beroperasi di wilayah Asia Tenggara. Kondisi masyarakat dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan ekonomi rendah menjadi incaran para tokoh terorisme untuk memperluas jaringan dengan merekrut kader-kader baru.

Gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah yurisdiksi nasional Indonesia. Kondisi geografi Indonesia dengan wilayah perairan serta



wilayah udara Indonesia yang terbentang pada pelintasan transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara, berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara.

Bentuk-bentuk gangguan keamanan di laut dan udara yang mendapat prioritas perhatian dalam penyelenggaraan pertahanan negara meliputi pembajakan atau perompakan, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, penangkapan ikan secara ilegal, atau pencurian kekayaan di laut, termasuk pencemaran lingkungan.

Konflik komunal pada dasarnya merupakan gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi antarkelompok masyarakat. Dalam skala yang besar konflik komunal dapat membahayakan keselamatan bangsa sehingga tidak dapat ditangani dengan cara-cara biasa dengan mengedepankan pendekatan penegakan hukum belaka dan ditujukan untuk mencegah merebaknya konflik yang dapat mengakibatkan risiko yang lebih besar.

### **Ancaman Nirmiliter**

Ancaman nirmiliter pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum.



### *Ancaman Berdimensi Ideologi*

Meskipun sistem politik internasional telah mengalami perubahan, terutama setelah keruntuhan Uni Soviet sehingga paham komunis semakin tidak populer lagi, bagi Indonesia yang pernah menjadi basis perjuangan kekuatan komunis, ancaman ideologi komunis masih tetap merupakan bahaya laten yang harus diperhitungkan. Di masa lalu, Indonesia menjadi salah satu basis komunis yang beberapa kali melakukan kudeta untuk menumbangkan pemerintahan dan berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Walaupun ideologi komunis secara global tidak populer lagi, potensi ancaman berbasis ideologi masih tetap diperhitungkan. Bentuk-bentuk baru dari ancaman ideologi yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri, yakni metamorfosis dari penganut paham komunis yang telah melebur ke dalam elemen-elemen masyarakat, sewaktu-waktu dapat mengancam Indonesia. Usaha pihak-pihak tertentu melalui penulisan buku-buku sejarah dengan tidak mencantumkan peristiwa G-30-S/PKI dengan Dewan Revolusi, atau gerakan radikalisme yang brutal dan anarkis, memberikan indikasi bahwa ancaman ideologi masih potensial.

Buku Putih 2003 mengangkat gerakan kelompok radikal sebagai salah satu ancaman nyata. Motif yang melatarbelakangi gerakan-gerakan tersebut dapat berupa dalih agama, etnik, atau kepentingan rakyat. Pada saat ini masih terdapat anasir-anasir radikalisme yang menggunakan atribut keagamaan berusaha mendirikan negara dengan ideologi lain, seperti yang dilakukan oleh kelompok NII (Negara Islam Indonesia). Bagi Indonesia keberadaan kelompok tersebut merupakan ancaman terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengancam kewibawaan pemerintah sehingga harus ditumpas.





### *Ancaman Berdimensi Politik*

Ancaman berdimensi politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman berdimensi politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk-bentuk ancaman nirmiliter berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ke depan, bentuk-bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia, yang memerlukan peran dari fungsi pertahanan nirmiliter untuk menghadapinya.

Dalam perspektif pertahanan Indonesia, politik merupakan instrumen utama yang dapat menjadi penentu damai atau perang, yakni bahwa perang merupakan kelanjutan dari politik dengan cara lain. Ini membuktikan bahwa ancaman politik dapat menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan dapat menghancurkan suatu negara secara total. Ancaman berdimensi politik dapat menggunakan berbagai macam aspek sebagai kendaraan untuk menyerang suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ancaman berdimensi politik dapat bersumber dari luar dan dapat pula bersumber dari dalam negeri. Ancaman berdimensi politik yang berasal dari luar dapat dilakukan oleh aktor negara dan aktor yang bukan negara dengan menggunakan isu-isu global sebagai kendaraan untuk menyerang atau menekan Indonesia. Pelaksanaan penegakan HAM, demokratisasi, penanganan lingkungan hidup, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel selalu menjadi komoditas politik bagi masyarakat internasional untuk mengintervensi suatu negara; hal ini dirasakan pula oleh Indonesia.



Dari dalam negeri, pertumbuhan instrumen politik mencerminkan kadar pertumbuhan demokrasi suatu negara. Iklim politik yang berkembang secara sehat menggambarkan suksesnya proses demokrasi. Bagi Indonesia, faktor politik menjadi penentu kelanjutan sistem pemerintahan. Dalam sejarah Indonesia, pemerintahan negara sering mengalami pasang surut yang diakibatkan oleh gejolak politik yang sulit dikendalikan. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa mobilisasi massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Ancaman separatisme merupakan bentuk ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik (tanpa senjata) dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan instrumen militer. Sebaliknya, ancaman separatisme dengan bersenjata tidak jarang mengalami kesulitan sebagai akibat dari politisasi; penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan pendekatan operasi militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman berdimensi politik memiliki tingkat risiko yang besar yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa.

### *Ancaman Berdimensi Ekonomi*

Ekonomi tidak saja menjadi alat stabilitas dalam negeri, tetapi juga merupakan salah satu alat penentu posisi tawar setiap negara dalam hubungan antarnegara atau pergaulan internasional. Negara-negara



dengan kondisi perekonomian yang lemah sering menghadapi kesulitan dalam berhubungan dengan negara lain yang posisi ekonominya lebih kuat. Ekonomi yang kuat biasanya diikuti pula dengan politik dan militer yang kuat.

Ancaman berdimensi ekonomi berpotensi menghancurkan pertahanan sebuah negara. Pada dasarnya ancaman berdimensi ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Dalam konteks Indonesia, ancaman dari internal dapat berupa inflasi dan pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas, ketimpangan distribusi pendapatan dan ekonomi biaya tinggi, sedangkan secara eksternal, dapat berbentuk indikator kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, dan tingkat dependensi yang cukup tinggi terhadap asing.

### *Ancaman Berdimensi Sosial Budaya*

Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam, dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan, seperti separatisme, terorisme, kekerasan yang melekat-berurat berakar, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut lama kelamaan menjadi "kuman penyakit" yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Watak kekerasan yang melekat dan berurat berakar berkembang, seperti api dalam sekam di kalangan masyarakat yang menjadi pendorong konflik-konflik antarmasyarakat



atau konflik vertikal antara pemerintah pusat, dan daerah. Konflik horizontal yang berdimensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pada dasarnya timbul akibat watak kekerasan yang sudah melekat. Watak kekerasan itu pula yang mendorong tindakan kejahatan termasuk merusak lingkungan dan bencana buatan manusia. Faktor-faktor tersebut berproses secara meluas serta menghasilkan efek domino sehingga dapat melemahkan kualitas bangsa Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung telah mengakibatkan daya dukung dan kondisi lingkungan hidup yang terus menurun. Bersamaan dengan itu merebaknya wabah penyakit pandemi, seperti flu burung, demam berdarah, HIV/AIDS, dan malaria merupakan tantangan serius yang dihadapi di masa datang.

Ancaman dari luar timbul bersamaan dengan dinamika yang terjadi dalam format globalisasi dengan penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri sulit dibendung yang mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan dunia menjadi kampung global yang interaksi antarmasyarakat berlangsung dalam waktu yang aktual. Yang terjadi tidak hanya transfer informasi, tetapi juga transformasi dan sublimasi nilai-nilai luar secara serta merta dan sulit dikontrol. Sebagai akibatnya, terjadi benturan peradaban, lambat-laun nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa semakin terdesak oleh nilai-nilai individualisme. Fenomena lain yang juga terjadi adalah konflik berdimensi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, di samping konflik horizontal yang berdimensi etnoreligius masih menunjukkan potensi yang patut diperhitungkan. Bentuk-bentuk ancaman sosial budaya tersebut apabila tidak dapat ditangani secara tepat dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.



### *Ancaman Berdimensi Teknologi dan Informasi*

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pada dasarnya membawa manfaat yang besar bagi umat manusia. Seiring dengan kemajuan Iptek tersebut berkembang pula kejahatan yang memanfaatkan kemajuan Iptek tersebut, antara lain kejahatan siber, dan kejahatan perbankan.

Kondisi lain yang berimplikasi menjadi ancaman adalah lambatnya perkembangan kemajuan Iptek di Indonesia sehingga menyebabkan ketergantungan teknologi terhadap negara-negara maju semakin tinggi. Kondisi ketergantungan terhadap negara lain tidak saja menyebabkan Indonesia menjadi pasar produk-produk negara lain, tetapi lebih dari itu, sulit bagi Indonesia untuk mengendalikan ancaman berpotensi teknologi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan Indonesia.

Tantangan yang dihadapi tidak saja berupa ancaman teknologi dari luar negeri, tetapi juga pola sikap masyarakat dalam negeri dalam menghargai karya-karya teknologi anak bangsa. Pada dasarnya, Indonesia memiliki SDM yang kualitasnya berdaya saing tinggi dibandingkan dengan SDM negara-negara maju. Setiap tahun Indonesia mencetak juara-juara olimpiade sains (Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi), Indonesia juga memiliki tenaga-tenaga terampil di bidang teknologi tinggi, seperti eks PT DI (Dirgantara Indonesia) dan PT PAL (Peralatan Angkatan Laut), PT PINDAD (Perindustrian Angkatan Darat) dan-lain-lain, tetapi belum ada wadah yang menjamin kegairahan untuk membangun kemampuan bangsa di bidang teknologi, yang berakibat terjadinya arus "eksodus" tenaga ahli Indonesia ke luar yang menawarkan kehidupan yang lebih baik.



## *Ancaman Berdimensi Keselamatan Umum*

Secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dikawasan rawan bencana, baik bencana alam, keselamatan transportasi, maupun bencana kelaparan. Bencana yang dapat terjadi di Indonesia dan merupakan ancaman bagi keselamatan umum dapat terjadi murni bencana alam, misalnya gempa bumi, meletusnya gunung berapi, dan tsunami. Bencana yang disebabkan oleh ulah manusia, antara lain tidak terkontrolnya penggunaan obat-obatan dan bahan kimia lain yang dapat meracuni masyarakat, baik secara langsung maupun kronis (menahun), misalnya pembuangan limbah industri atau limbah pertambangan lainnya. Sebaliknya, bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam yang dipicu oleh ulah manusia, antara lain bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan bencana lainnya.



Bencana alam berakibat baik langsung maupun tidak langsung mengancam keselamatan masyarakat. Selain itu, keamanan transportasi merupakan salah satu dimensi keselamatan umum yang cukup serius di Indonesia. Dewasa ini kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi semakin tinggi sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, antara lain berupa penurunan tarif penumpang yang berdampak terhadap keselamatan. Keselamatan transportasi juga disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta masih lemahnya kepatuhan aparat dalam penegakan hukum dan aturan.



## KONSEPSI PERTAHANAN NEGARA

### Kepentingan Nasional

Pada hakikatnya kepentingan nasional Indonesia adalah tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kepentingan nasional tersebut diwujudkan dengan memperhatikan tiga kaidah pokok, yakni *tata kehidupan, upaya pencapaian tujuan, serta sarana yang digunakan*. Tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia mencerminkan kesatuan tata nilai yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berketuhanan Yang Maha Esa yang menjunjung tinggi kebinekaan yang ditunjukkan dalam interaksi sosial yang harmonis. Pembangunan nasional merupakan upaya untuk mencapai tujuan nasional yang pelaksanaannya secara berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara. Sebaliknya, sarana yang digunakan dalam mewujudkan tujuan nasional adalah seluruh potensi dan kekuatan nasional yang didayagunakan secara menyeluruh dan terpadu.

Lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional yang terus berkembang dalam suatu dinamika yang sangat tinggi menuntut penyesuaian diri dengan hakikat perubahan yang terjadi. Atas dasar itu, kepentingan nasional Indonesia disusun dalam tiga kategori: kepentingan nasional yang bersifat mutlak, kepentingan nasional yang bersifat vital, dan kepentingan nasional yang bersifat penting.

Kepentingan nasional yang bersifat mutlak adalah tetap tegaknya



Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi pertahanan negara wajib menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. NKRI dengan wilayah terdiri atas 17.504 buah pulau sebagai satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus tetap dijaga keberadaannya dan keutuhannya. Posisi Indonesia yang strategis memiliki implikasi pertahanan yang besar. Keutuhan wilayah NKRI tidak saja menjadi kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga menjadi bagian strategis yang mempengaruhi kepentingan nasional sejumlah negara di dunia. Wilayah Indonesia yang utuh dan stabil akan menjadi syarat mutlak terselenggaranya pembangunan nasional untuk menyejahterakan rakyat, sekaligus bagi terwujudnya stabilitas kawasan yang mengitari Indonesia. Indonesia tidak akan membiarkan setiap usaha yang akan mengganggu eksistensi dan integritas NKRI. NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang wilayahnya dari Sabang sampai Merauke, merupakan keputusan final yang harus dijaga dan dipertahankan.

Kepentingan nasional Indonesia yang bersifat vital menyangkut keberlanjutan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang *Bhinneka Tunggal Ika*, sejahtera, adil dan makmur, serta demokratis. Kondisi objektif Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia merupakan tantangan untuk mengembangkan pertahanan Indonesia ke depan. Dengan penduduk yang sudah mencapai lebih dari 230 juta jiwa, serta karakteristik yang sangat pluralistik dalam SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk membangun kohesi nasional dalam ikatan persatuan dan kesatuan bangsa. Indikator terwujudnya kohesi nasional serta rasa persatuan dan kesatuan bangsa ditunjukkan dalam kehidupan sosial dan interaksi antar warga masyarakat yang harmonis.





Dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia, konflik yang bersumber SARA berpotensi cukup besar dan menjadi tantangan bagi perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa. Akar masalah yang menjadi penyulut konflik yang bernuansa SARA adalah kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan. Persatuan dan kesatuan bangsa tidak terwujud dengan sendirinya. Kehidupan masyarakat yang harmonis hanya dapat terwujud melalui usaha yang bersifat menyeluruh dan menyentuh aspek kesejahteraan, yakni pendidikan, peningkatan taraf hidup, serta aspek penegakan hukum yang diberdayakan secara maksimal untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Oleh karena itu, pluralistik bangsa Indonesia harus dapat dikelola secara sungguh-sungguh dalam suatu pendekatan pembangunan nasional yang berorientasi pada pembangunan manusia Indonesia yang sejahtera, adil, dan berdaya saing.

Kepentingan nasional Indonesia yang utama adalah kepentingan yang terkait dengan perdamaian dunia dan stabilitas regional. Lingkungan strategis Indonesia adalah regional dan global dengan segala dinamikanya. Indonesia juga tidak terlepas dari limpahan sejumlah konflik di dunia. Oleh karena itu, Indonesia akan tetap mengambil peran aktif bersama-sama dengan bangsa lain melalui usaha-usaha yang bermartabat untuk mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pada saat ini masih terdapat beberapa kawasan di dunia yang masih dilanda konflik, baik konflik antarnegara maupun konflik internal. Penggunaan kekuatan militer untuk memaksakan perdamaian hanya dapat menyelesaikan permasalahan di atas permukaan dan sesaat, tetapi menimbulkan efek penderitaan jangka panjang yang bersifat multidimensi



terhadap suatu bangsa. Indonesia melalui Dewan Keamanan PBB akan mendorong usaha-usaha penyelesaian damai terhadap setiap konflik dan mencegah penggunaan kekuatan untuk memaksakan perdamaian. Selain itu, sebagai anggota Gerakan Non-Blok, yang sekaligus anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), Indonesia akan memainkan peran dalam peningkatan kerja sama dengan negara-negara anggota lainnya yang berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat masing-masing, maupun pencegahan dan resolusi konflik secara damai dan bermartabat.

Pada lingkup regional, peran Indonesia sebagai anggota ASEAN, dalam upaya untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai kawasan yang aman, stabil, dan sejahtera menjadi modalitas dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia. Dalam rangka itu kerja sama bilateral dengan sesama anggota ASEAN sangat penting untuk dikembangkan secara lebih konkret dan menyentuh permasalahan-permasalahan yang nyata-nyata dihadapi. Dalam kerangka itu, perwujudan tiga pilar ASEAN, yakni masyarakat ekonomi ASEAN, masyarakat budaya ASEAN, dan masyarakat keamanan ASEAN, menjadi komitmen bangsa Indonesia untuk mewujudkannya secara bersama oleh seluruh anggota ASEAN bagi masa depan ASEAN yang lebih baik dan berdaya saing. Terwujudnya tiga pilar ASEAN tersebut akan mempromosikan stabilitas dan kemakmuran kawasan Asia Tenggara yang memberikan efek positif bagi kawasan lain dan dunia.

Bersamaan dengan usaha mewujudkan tiga pilar ASEAN, penguatan hubungan dengan negara lain dalam kerangka ASEAN Plus Enam dan Forum Regional ASEAN (ARF) sangatlah penting. Bersama dengan negara-negara mitra ASEAN yang umumnya mempunyai pengaruh besar pada kawasan dan dunia, akan terwujud suatu sinergi yang memberikan



efek bagi percepatan tercapainya stabilitas dan keamanan Asia Tenggara, sekaligus mempromosikan stabilitas dan keamanan Asia Pasifik.

### **Hakikat Pertahanan Negara**

Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.

Upaya pertahanan yang bersifat semesta adalah model yang dikembangkan berdasarkan pertimbangan strategis bukan karena alasan ketidakmampuan dalam membangun pertahanan yang modern. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi, model tersebut tetap dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing.

Sistem Pertahanan Negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Ciri kewilayahan merupakan gelar kekuatan pertahanan yang tersebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografi sebagai satu kesatuan pertahanan.



### Tujuan Pertahanan Negara

Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Tujuan pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan negara mencakupi upaya untuk menjaga sistem ideologi negara dan sistem politik negara. Dalam menjaga sistem ideologi negara, upaya pertahanan negara diarahkan untuk mengawal dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia. Setiap usaha untuk mengganti ideologi Pancasila akan berhadapan dengan instrumen pertahanan negara yang setiap saat siap sedia membela dan mempertahankannya, sedangkan dalam menjaga sistem politik negara, upaya Pertahanan Negara diarahkan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan negara yang demokratis, stabil, bersih, dan berwibawa serta mengandung tata nilai. Pemerintahan yang stabil, bersih dan berwibawa memungkinkan terselenggaranya pembangunan nasional dengan baik.

Sebaliknya, pemerintahan yang tidak stabil tidak saja mengganggu kelancaran pembangunan nasional, bahkan dapat mengakibatkan masa depan Indonesia menjadi tidak menentu. Tata nilai bangsa Indonesia terangkum dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yaitu bangsa Indonesia yang menegara dalam wadah NKRI yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hukum, hak asasi manusia dan lingkungan hidup serta bukan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan. Setiap gangguan yang berdimensi SARA, demokrasi, HAM, dan tindakan perusakan lingkungan hidup juga menjadi urusan pertahanan negara.

Upaya menjaga keutuhan NKRI didasarkan pada pandangan



bangsa Indonesia yang menempatkan NKRI sebagai putusan final yang harus tetap dipelihara dan dipertahankan. Setiap usaha pemisahan diri atau yang bertujuan mengubah dan memecah belah NKRI merupakan ancaman yang akan dihadapi dengan sistem pertahanan negara.

Menjamin keselamatan bangsa merupakan hal fundamental dalam penyelenggaraan fungsi pertahanan negara untuk melindungi warga dari segala bentuk ancaman. Upaya menjamin keselamatan bangsa mencakup pula upaya pertahanan negara dalam menghadapi setiap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Dimensi keselamatan bangsa juga mencakup kewajiban untuk melaksanakan penanggulangan dampak bencana alam, kerusuhan sosial, mengatasi tindakan terorisme, ancaman keamanan lintas negara serta penegakan keamanan di laut dan udara Indonesia.

### **Sistem Pertahanan Negara**

Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI dengan segala isinya sebagai satu kesatuan pertahanan.

Bagi Indonesia, penyelenggaraan pertahanan negara bukan semata-mata ditujukan untuk perang, melainkan juga untuk mewujudkan perdamaian, menjamin keutuhan NKRI, mengamankan kepentingan nasional, serta menjamin terlaksananya pembangunan nasional. Pertahanan yang efektif adalah pertahanan yang mampu menghadirkan suasana aman dan damai di mana kehidupan masyarakat berjalan secara



normal, dan hubungan dengan sesama negara baik di kawasan maupun di luar kawasan berlangsung secara harmonis dan saling menghargai.

Fungsi pertahanan Indonesia diselenggarakan dengan Sistem Pertahanan Semesta. Konsepsi pertahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter. Fungsi pertahanan militer yang diemban oleh TNI meliputi operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Inti pertahanan nirmiliter, yaitu pemberdayaan sumber daya nasional, yang meliputi fungsi kekuatan pertahanan nirmiliter dan pertahanan sipil.



## **Fungsi Pertahanan Negara**

Sistem pertahanan negara Indonesia memiliki tiga fungsi, yakni fungsi penangkalan, fungsi penindakan, dan fungsi pemulihan.

*Fungsi penangkalan* merupakan keterpaduan usaha pertahanan untuk mencegah atau meniadakan niat dari pihak tertentu yang ingin menyerang Indonesia. Fungsi penangkalan dilaksanakan dengan strategi penangkalan yang bertumpu pada instrumen penangkalan berupa



instrumen politik, ekonomi, psikologi, teknologi, dan militer. Instrumen politik menempatkan diplomasi sebagai lini terdepan pertahanan negara, bersinergi dengan faktor-faktor politik lainnya yang saling memperkuat. Instrumen ekonomi melalui pertumbuhan yang sehat dan cukup tinggi akan mewujudkan pencapaian tujuan nasional, yakni masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan serta berdaya saing baik pada lingkup regional maupun global. Instrumen psikologis yang diemban oleh semua komponen pertahanan dalam mengembangkan kemampuan dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan media komunikasi, teknologi, serta faktor-faktor psikologis lainnya bagi terwujudnya daya tangkal psikologis secara efektif. Psikologis berintikan faktor-faktor nonfisik berupa tata nilai serta segenap pranata sosial yang didayagunakan dalam mewujudkan motivasi, tekad, dan jiwa juang. Instrumen teknologi dibangun secara bertahap dan berlanjut melalui pengembangan industri pertahanan dalam negeri bagi terwujudnya kemandirian dalam penyediaan alat utama sistem persenjataan yang berdaya saing dengan produk-produk negara lain. Instrumen militer, yakni TNI sebagai Komponen Utama pertahanan negara harus mampu mengembangkan strategi militer dengan efek daya tangkal yang tinggi, serta profesional dalam melaksanakan setiap tugas operasi, baik OMP maupun OMSP.

*Fungsi penindakan* merupakan keterpaduan usaha pertahanan untuk mempertahankan, melawan, dan mengatasi setiap tindakan militer suatu negara yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta menjamin keselamatan bangsa dari segala ancaman. Fungsi penindakan dilaksanakan melalui tindakan preemptif, perlawanan, sampai dengan mengusir musuh keluar dari wilayah Indonesia.

Tindakan preemptif merupakan bentuk penindakan terhadap



pihak lawan yang nyata-nyata akan menyerang Indonesia dengan cara mengerahkan kekuatan pertahanan untuk melumpuhkan pihak lawan yang sedang dalam persiapan untuk menyerang Indonesia. Tindakan preemptif dilaksanakan di wilayah pihak lawan atau di dalam perjalanan sebelum memasuki wilayah Indonesia.

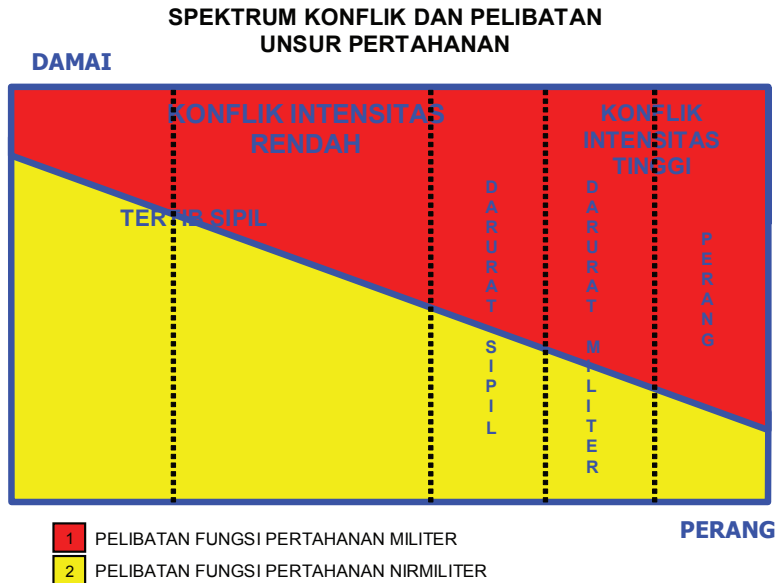
Tindakan perlawanan merupakan bentuk penindakan terhadap pihak lawan yang sedang menyerang Indonesia atau telah menguasai sebagian atau seluruh wilayah Indonesia dengan cara mengerahkan seluruh kekuatan negara baik secara militer maupun nirmiliter. Tindakan perlawanan diselenggarakan dengan sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta melalui pengerahan kekuatan pertahanan yang berintikan TNI didukung oleh segenap kekuatan bangsa dalam susunan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.

*Fungsi Pemulihan* merupakan keterpaduan usaha pertahanan negara yang dilaksanakan baik secara militer maupun nirmiliter, untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu sebagai akibat kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, atau serangan separatis, konflik vertikal atau horizontal, huru-hara, serangan teroris, atau bencana alam. TNI bersama dengan instansi pemerintahan lainnya serta masyarakat melaksanakan fungsi pemulihan sebagai wujud pertahanan semesta yang utuh.

### **Spektrum Konflik**

Baik hubungan antarnegara maupun dinamika sosial politik dalam negeri selalu berkembang dalam kondisi pasang surut yang diilustrasikan sebagai kondisi yang eskalatif atau spontan antara damai





dan perang. Konflik adalah kondisi terganggunya hubungan antarnegara yang berkembang dalam spektrum negatif paling rendah hingga paling tinggi berupa perang terbuka. Konflik dapat pula terjadi di dalam negeri, terutama pada tingkat provinsi atau lokal, yakni yang melibatkan dua kelompok masyarakat atau lebih.

Pemahaman terhadap spektrum konflik menjadi dasar dalam pencegahan konflik, pengelolaan konflik, keikutsertaan dalam tugas-tugas perdamaian dunia dan bantuan kemanusiaan, serta bantuan kemampuan pertahanan negara pada departemen atau otoritas sipil lainnya. Dalam spektrum ancaman yang eskalatif dan berkembang ke arah yang mengancam keamanan nasional, diperlukan suatu mekanisme pelibatan unsur-unsur kekuatan nasional secara tepat. Dalam perspektif pertahanan negara, unsur-unsur kekuatan nasional tersebut dikelompokkan dalam



dua pendekatan fungsi, yakni fungsi pertahanan nirmiliter dan fungsi pertahanan militer.

Dalam kondisi ketika spektrum ancaman masih berupa konflik intensitas rendah, penanganannya mengedepankan pendekatan fungsional, yang dalam dimensi pertahanan diperankan oleh fungsi pertahanan nirmiliter. Fungsi pertahanan militer dalam kondisi keamanan dimaksud mengambil peran sebagai unsur bantuan manakala diperlukan oleh unsur-unsur pertahanan nirmiliter. Dalam menghadapi konflik intensitas rendah, seperti pemberontakan bersenjata, konflik komunal yang meluas, kerusakan yang berlarut dan dalam skala besar yang mengganggu keamanan publik, serta kelangsungan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat, pelibatan fungsi pertahanan militer diperlukan. Pelibatan fungsi pertahanan militer (TNI) dalam konteks ini merupakan lingkup pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP). Dalam penanganan ancaman atau gangguan keamanan nasional yang terjadi di suatu wilayah atau daerah yang penanganannya dengan cara-cara biasa atau penanganan secara fungsional tidak efektif lagi, bahkan diperkirakan akan menimbulkan korban yang besar atau kerusakan infrastruktur dan properti yang parah, atas putusan politik pemerintah fungsi pertahanan militer dapat dilibatkan.

Apabila ancaman meningkat dan berkembang ke arah situasi yang gawat dan status keamanan bergeser dari Tertib Sipil menjadi Darurat Sipil, keterlibatan fungsi pertahanan militer, yakni TNI, semakin besar dan dalam kerangka pelaksanaan OMSP. Dalam keadaan Darurat Militer, demi kepentingan nasional dan efektivitas pelaksanaan penanganan darurat militer sebagaimana diatur oleh undang-undang, fungsi-fungsi pertahanan nirmiliter dapat dialihkan sementara kepada TNI selama pemberlakuan darurat militer. Dalam hal ini TNI tetap melaksanakan



tugas OMSP untuk konteks pelaksanaan di dalam negeri. Dalam keadaan perang, yakni dalam konflik dengan negara lain, seluruh kekuatan bangsa melaksanakan pertahanan militer yang susunannya TNI sebagai kekuatan utama melaksanakan OMP, dibantu oleh seluruh kekuatan nasional sebagai Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang mencerminkan sistem pertahanan semesta. Model tersebut menunjukkan bahwa baik pertahanan nirmiliter maupun pertahanan militer, yakni TNI, memiliki ruang pelibatan dalam konteks keamanan nasional di antara dua titik ekstrem, yakni damai dan perang.

### **Kepentingan Strategis Pertahanan Indonesia**

Pertahanan negara diselenggarakan untuk mewujudkan kepentingan nasional. Kepentingan strategis pertahanan Indonesia merupakan bagian dari kepentingan nasional dalam menjamin tegaknya NKRI dengan segala kepentingannya. Pertahanan negara memiliki peran dan fungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri.

Berdasarkan perkiraan ancaman serta kepentingan nasional Indonesia, kepentingan strategis pertahanan negara meliputi kepentingan strategis yang bersifat permanen, kepentingan strategis yang bersifat mendesak, dan kepentingan strategis di bidang kerja sama pertahanan.

#### *Kepentingan Strategis yang Bersifat Permanen*

Kepentingan strategis pertahanan negara yang bersifat permanen adalah perwujudan satu kesatuan pertahanan untuk menjaga dan



melindungi kedaulatan negara serta keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman, baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Kepentingan strategis pertahanan tersebut dicapai melalui usaha membangun dan membina daya tangkal negara dan bangsa serta kemampuan menanggulangi setiap ancaman, baik yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri, langsung atau tidak langsung. Pembangunan pertahanan yang berdaya tangkal merupakan kehormatan bangsa Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat untuk menyejajarkan diri dengan bangsa lain. Pertahanan Indonesia dipersiapkan sejak dini dengan sistem pertahanan, tanpa mempermasalahkan ada atau tidak adanya ancaman nyata.

Dalam melaksanakan kepentingan pertahanan yang bersifat tetap, bangsa Indonesia senantiasa memegang prinsip sebagai bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta akan kemerdekaan dan kedaulatannya. Prinsip cinta damai tersebut diwujudkan dalam pergaulan internasional yang bebas aktif serta hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara lain.

Penggunaan kekuatan pertahanan untuk tujuan perang hanya merupakan jalan terakhir setelah usaha-usaha diplomatik sudah ditempuh dan mengalami jalan buntu. Dalam menyelesaikan setiap bentuk pertikaian dan persengketaan, bangsa Indonesia akan mengedepankan penggunaan cara-cara damai. Sejalan dengan prinsip tersebut, bangsa Indonesia menentang segala penjajahan dan intervensi bangsa lain terhadap suatu negara.

Dalam menjamin kepentingan yang bersifat permanen, penyelenggaraan pertahanan dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan



Semesta, yang melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya, serta sarana dan prasarana nasional sebagai satu kesatuan pertahanan. Keikutsertaan seluruh rakyat dalam pertahanan negara didudukkan dalam konteks hak dan kewajiban setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mencerminkan kehormatan bangsa merdeka dan berdaulat serta percaya akan kemampuan sendiri.

### *Keentingan Strategis yang Bersifat Mendesak*

Keentingan strategis pertahanan yang bersifat mendesak pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari kepentingan strategis pertahanan yang bersifat permanen, yakni terselenggaranya pertahanan negara untuk merespons setiap bentuk ancaman, baik yang bersifat nyata maupun potensial. Keentingan strategis yang bersifat mendesak juga mencakupi kewajiban dan komitmen Indonesia untuk ikut aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia dan regional.

Dari dinamika interaksi dengan bangsa-bangsa lain, serta implikasi dari perkembangan lingkungan strategis, terbentuk kondisi keamanan global, regional, dan dalam negeri yang penuh ketidakpastian. Bersamaan dengan itu, terdapat beberapa isu keamanan nyata yang memerlukan respons melalui fungsi pertahanan. Fungsi pertahanan negara menyadari bahwa setiap isu keamanan harus segera diatasi agar tidak berkembang menjadi ancaman yang besar yang mengganggu eksistensi dan kepentingan NKRI.

Wilayah Indonesia yang sangat luas menuntut pertahanan negara yang cukup kuat yang mampu menjangkau secara maksimal seluruh wilayah. Wilayah Indonesia yang luas dan dapat dimasuki dari segala penjuru berimplikasi terhadap potensi ancaman yang cukup tinggi.



Wilayah perairan dan dirgantara Indonesia menjadi salah satu fokus kepentingan pertahanan Indonesia yang mendesak.

Potensi pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain cukup tinggi sehingga memerlukan kesiapsiagaan kekuatan pertahanan untuk dapat mencegah dan menanganinya secara cepat dan tepat. Ancaman sabotase, pembajakan, atau perompakan terhadap instalasi penting dan objek vital di laut semakin mendapat perhatian serius. Untuk itu, keunggulan kekuatan pertahanan yang berintikkan kekuatan TNI diselenggarakan untuk memberikan efek penolakan yang maksimal terhadap setiap usaha yang mengganggu stabilitas keamanan di laut. Gelar kekuatan TNI juga diselenggarakan untuk memancarkan keunggulan kekuatan yang maksimal untuk memberikan efek penolakan terhadap aktivitas ancaman keamanan lintas negara yang berupa penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak serta barang-barang berbahaya dan terlarang lainnya. Penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan laut dan pembuangan limbah berbahaya masih terus berlangsung. Tindak kejahatan tersebut telah menguras kekayaan dan merugikan Indonesia dalam jumlah besar. Fungsi pertahanan berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang lebih intensif untuk mencegah dan menanganinya. Dalam hal ini kerja sama dengan fungsi-fungsi lain di luar pertahanan perlu dikembangkan secara terpadu dan sinergi.

Kepentingan strategis pertahanan yang bersifat mendesak juga diarahkan kepada pencegahan dan penanganan isu-isu ancaman dan gangguan berdimensi pertahanan, yang mencakupi ancaman separatis, terorisme, aksi radikalisme yang membahayakan keselamatan dan kehormatan bangsa. Terhadap isu-isu keamanan tersebut penyelenggaraan pertahanan lebih mengedepankan fungsi pencegahan.



Namun, kesiapsiagaan tetap dibangun sehingga pada waktunya dapat digerakkan ke tempat dan sasaran secara cepat.

Dalam lingkup kepentingan yang bersifat mendesak, pengamanan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar menjadi salah satu prioritas fungsi pertahanan negara. Pengamanan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar merupakan pelaksanaan fungsi pertahanan negara dalam menegakkan kedaulatan negara. Pada saat ini masih terdapat sejumlah segmen perbatasan, baik perbatasan darat maupun maritim, yang permasalahannya belum tuntas. Menegakkan kedaulatan NKRI adalah amanat segenap rakyat Indonesia untuk dilaksanakan melalui tindakan konkret, antara lain melalui kehadiran kekuatan pertahanan di wilayah-wilayah NKRI yang memerlukan pengamanan khusus, seperti wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Oleh karena itu, pemerintah masih menempatkan penanganan keamanan oleh TNI di wilayah-wilayah perbatasan dan penempatan pasukan TNI di pulau-pulau kecil terluar masih sebagai satu prioritas.

Wilayah perbatasan Indonesia baik darat maupun maritim membentang sangat panjang dan luas. Wilayah perbatasan maritim berbatasan dengan 10 negara. Wilayah perbatasan darat membentang sampai ribuan kilometer dan terbagi dalam tiga segmen, yakni di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, serta di Timor Barat yang berbatasan dengan Timor Leste. Seperti halnya pengamanan wilayah perbatasan, tugas pengamanan terhadap pulau-pulau kecil terluar merupakan bagian dari kepentingan pertahanan yang mendesak. Indonesia memiliki 92 pulau kecil dan terluar; dari pulau-pulau kecil terluar tersebut, 12 di antaranya menjadi prioritas. Kedua belas pulau kecil terluar tersebut adalah Pulau



Batek di Laut Sawu (Provinsi Nusa Tenggara Timur), Pulau Bras di Samudra Pasifik (Provinsi Papua), Pulau Dana di Samudra Hindia (Nusa Tenggara Timur), Pulau Fani di Samudra Pasifik (Irian Jaya Barat), Pulau Fanildo di Samudra Pasifik (Papua), Pulau Marampit, Pulau Marore, dan Pulau Miangas di Laut Sulawesi (Sulawesi Utara), Pulau Nipa di Selat Singapura (Kepulauan Riau), Pulau Rondo di Samudra Hindia (Nangroe Aceh Darussalam), Pulau Sebatik di Selat Makassar (Kalimantan Timur), dan Pulau Sekatung di Laut Cina Selatan (Kepulauan Riau).

Gelar kekuatan TNI di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar merupakan langkah untuk mendinamisasikan dan mengefektifkan pengamanan wilayah perbatasan. Kehadiran kekuatan di wilayah perbatasan sekaligus diarahkan untuk melaksanakan fungsi pembinaan teritorial dalam mendinamisasikan pelaksanaan bela negara untuk mewujudkan ketahanan masyarakat di wilayah perbatasan.

Tugas yang diemban oleh satuan-satuan TNI yang digelar untuk mengamankan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar adalah tugas yang penuh tantangan. Tugas tersebut membutuhkan kesungguhan dan dedikasi yang tinggi serta dukungan dari semua pihak.

Khusus untuk perbatasan darat dan pulau-pulau kecil terluar, karakteristik geografinya sangat sulit dijangkau dengan sarana transportasi biasa serta belum terjangkau oleh sarana komunikasi. Wilayah tersebut pada umumnya merupakan daerah yang tertinggal dari segi pembangunan sehingga infrastruktur di wilayah tersebut sangat minim. Bahkan, pulau kecil terluar banyak yang tidak dihuni penduduk sehingga pasukan yang digelar di pulau-pulau tersebut sangat terisolasi dari interaksi dengan masyarakat. Kondisi yang demikian memerlukan mental kejiwaan yang tangguh serta fisik yang prima untuk mengatasi alam yang keras dan





jauh dari kehidupan masyarakat.

Pada saat ini penanganan keamanan di wilayah perbatasan darat telah berjalan melalui gelar kekuatan TNI di wilayah perbatasan dengan Malaysia, yakni di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, wilayah perbatasan dengan Papua Nugini, yakni Provinsi Papua serta wilayah perbatasan dengan Timor Leste, yakni di Timor Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gelar kekuatan TNI juga telah dilaksanakan di pulau-pulau kecil terluar meskipun dari 92 pulau kecil terluar tersebut belum seluruhnya dapat ditempatkan Pos TNI, di antaranya karena kondisi pulau yang sangat kecil yang rawan terhadap gelombang laut sehingga sangat tidak mungkin untuk menempatkan kekuatan TNI, seperti di Pulau Dana (NTT) dan pulau-pulau kecil terluar lainnya.

Gelar kekuatan TNI tersebut telah memberikan efek penangkalan yang sangat besar. Kehadiran TNI di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar selain melaksanakan tugas pertahanan, dengan kegiatan pembinaan teritorial yang dilaksanakan di wilayah tersebut, telah ikut menggerakkan pembangunan, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang relatif terisolasi. Sementara itu, kegiatan pertahanan untuk mengamankan wilayah perbatasan maritim telah berjalan, antara lain melalui patroli TNI-AL dan TNI-AU secara periodik. Kegiatan ini selain memberikan efek penangkalan, sekaligus telah menurunkan tingkat ancaman keamanan lintas negara yang melalui jalur laut, seperti pencurian ikan, penyelundupan, dan perompakan. Gelar kekuatan TNI di wilayah perbatasan darat dan di pulau-pulau kecil terluar akan tetap dipertahankan. Besar dan jenis kekuatan TNI yang digelar di wilayah perbatasan disesuaikan dengan persoalan-persoalan keamanan yang menonjol.



Kepentingan strategis yang mendesak juga diarahkan untuk tugas-tugas bantuan, seperti penanggulangan dampak bencana alam, penanganan konflik komunal, serta tugas pencarian dan pertolongan (SAR). Dampak pemanasan global serta gejala alam lainnya berimplikasi terhadap potensi terjadinya bencana alam yang menjadi semakin tinggi. Dalam kondisi tersebut sektor pertahanan negara merupakan sektor yang paling siap untuk dikerahkan setiap saat.

### *Kepentingan Strategis di bidang Kerja sama Pertahanan*

Pertahanan negara bukanlah hal yang eksklusif. Meskipun Indonesia mengembangkan pertahanan yang mandiri dalam pengertian tidak menyandarkan kepentingan pertahanan pada negara lain, Indonesia tetap menganut prinsip menjalin hubungan dengan negara lain melalui kerja sama pertahanan. Sebagai negara yang cinta damai, Indonesia terus mengembangkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain di dunia. Kepentingan Indonesia di bidang kerja sama pertahanan dengan negara lain di waktu-waktu akan datang semakin penting ditingkatkan, seiring dengan perkembangan isu-isu keamanan di lingkup regional dan global yang memerlukan penanganan bersama.

Pada lingkup regional, kepentingan pertahanan Indonesia adalah terwujudnya kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang aman dan stabil, terbebas dari konflik antarsesama anggota kawasan. Indonesia adalah salah satu pemrakarsa Perjanjian Persahabatan dan Kerja sama (TAC) yang perwujudannya sangat menentukan hubungan antaranggota ASEAN di bidang pertahanan. Substansi TAC adalah bahwa setiap anggota ASEAN sepakat untuk tidak saling menyerang dan menyelesaikan



setiap konflik secara damai. Dalam kerangka itu, Indonesia akan selalu mendorong setiap usaha bersama untuk menjadikan ASEAN sebagai entitas yang solid, terutama dalam menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompleks. Sejauh ini ASEAN telah menunjukkan kinerja yang terus meningkat. Hal tersebut tampak dari perkembangan ASEAN yang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir, baik di kalangan anggota ASEAN maupun dengan negara-negara mitra, seperti ASEAN Plus Tiga, ASEAN Plus Enam, dan Forum Regional ASEAN.

Pada lingkup yang lebih luas, Indonesia menempatkan keamanan kawasan yang mengitari Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan pertahanan Indonesia secara utuh. Indonesia tidak mungkin dapat tenteram di kawasan sekitar yang kondisi keamanannya bergejolak. Kawasan sekitar yang tidak stabil selalu mengalirkan limbah persoalan keamanan, baik langsung maupun tidak langsung. Secara geografis, Indonesia berdampingan dengan sejumlah negara, baik sesama anggota ASEAN maupun di luar ASEAN. Dalam hubungan kepentingan karena posisi geografis yang berbatasan dengan wilayah Indonesia, stabilitas keamanan di negara-negara yang berdampingan dengan Indonesia menjadi prioritas perhatian Indonesia.

Indonesia telah mengambil banyak manfaat dari kerja sama pertahanan dengan negara lain. Sejak Indonesia merdeka, kerja sama pertahanan telah banyak memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional, yakni dalam menjamin tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa. Kerja sama pertahanan telah dapat mempererat hubungan Indonesia dengan banyak negara, baik sesama kawasan maupun di luar kawasan. Kerja sama pertahanan dalam berbagai bentuk telah mengangkat citra Indonesia di dunia internasional,



seperti yang dikembangkan melalui latihan bersama militer, patroli bersama pengamanan Selat Malaka, pertukaran informasi, penanganan bencana alam, dan tugas perdamaian dunia. Indonesia menempatkan kerja sama pertahanan sebagai salah satu media yang efektif, tidak saja untuk membangun saling percaya dengan negara lain, tetapi lebih dari itu agar hubungan antarnegara terjalin dalam suasana yang lebih konkret melalui tindakan nyata.

### **Sasaran Strategis Pertahanan Negara**

Pertahanan negara Indonesia bertujuan menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman dan gangguan, baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Dalam mencapai tujuan tersebut pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dengan Sistem Pertahanan Semesta, yang memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan yang semesta dan mandiri. Pengelolaan pertahanan negara Indonesia secara mandiri bertitik tolak dari sikap bangsa Indonesia yang tidak menggantungkan diri pada negara lain.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pertahanan negara dalam melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa, ditetapkan lima sasaran strategis yang saling terkait. Substansi dari kelima sasaran strategis tersebut mencakupi sasaran di bidang penangkalan, sasaran dalam menghadapi ancaman agresi militer, sasaran dalam mengatasi ancaman militer yang bentuknya bukan agresi militer, sasaran untuk mengatasi ancaman nirmiliter, serta sasaran dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional.



*Terselenggaranya pertahanan negara untuk menangkal segala bentuk ancaman dan gangguan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan seluruh bangsa Indonesia*

Kepentingan nasional Indonesia yang vital dan permanen adalah tetap tegak dan utuhnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam mewujudkan kepentingan nasional tersebut, pertahanan negara Indonesia diselenggarakan untuk menangkal dan mencegah segala bentuk ancaman dan gangguan, baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam negeri. Dalam mewujudkan komitmen bangsa Indonesia yang anti-penjajahan dan penindasan suatu bangsa terhadap bangsa yang lain, orientasi penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan untuk sebesar-besarnya mewujudkan daya tangkal bangsa yang handal.

Kondisi global yang dinamis dan penuh ketidakpastian menuntut bangsa Indonesia untuk mengutamakan penangkalan. Konsepsi penangkalan Indonesia dibangun dan dikembangkan dengan Sistem Pertahanan Semesta yang memadukan pertahanan militer dan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Penerapan penangkalan Indonesia diwujudkan dalam pembangunan kekuatan serta penampilan segenap sumber daya nasional sebagai sosok kekuatan pertahanan negara yang solid dan dinamis serta disegani kawan maupun lawan.

*Terselenggaranya pertahanan negara untuk menghadapi perang dari agresi militer oleh negara asing*

Bagi bangsa Indonesia, spektrum ancaman pertahanan negara yang terbesar walaupun kemungkinan kecil adalah agresi berupa penggunaan



kekuatan bersenjata yang dilakukan oleh suatu negara yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, Indonesia tidak akan membiarkan dirinya diancam, diintimidasi, atau diserang oleh bangsa lain.

Dalam kondisi Indonesia menghadapi tindakan agresi yang dilakukan oleh suatu negara, kekuatan pertahanan negara akan dikerahkan untuk menyelenggarakan peperangan yang pelaksanaannya dilakukan dengan operasi militer perang (OMP). OMP merupakan pilihan terakhir bagi Indonesia serta diselenggarakan untuk membela kepentingan nasional dan menjaga serta melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa.

*Terselenggaranya pertahanan negara untuk menanggulangi ancaman militer yang mengganggu eksistensi dan kepentingan NKRI.*

Ancaman pertahanan negara, selain yang berbentuk agresi juga terdapat ancaman militer yang berskala terbatas sehingga penanganannya dengan pendekatan tertentu yang berbeda dengan pendekatan untuk melawan agresi militer suatu negara. Bentuk ancaman militer dengan skala terbatas merupakan ancaman yang penanganannya dengan pendekatan melalui operasi militer selain perang (OMSP).

Penyelenggaraan pertahanan negara dengan pendekatan OMSP diarahkan kepada penanggulangan bentuk-bentuk ancaman, seperti pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, separatisme, pemberontakan bersenjata, dan perang saudara. Pendekatan penanganan dengan OMSP diselenggarakan dengan pengerahan dan



penggunaan kekuatan serta sumber daya nasional tertentu, yang berbeda dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan dalam konteks OMP.

*Terselenggaranya Pertahanan Negara dalam Menangani Ancaman Nirmiliter yang Berimplikasi terhadap Kedaulatan Negara, Keutuhan Wilayah NKRI, dan Keselamatan Bangsa Indonesia.*

Ancaman pertahanan negara yang membahayakan eksistensi bangsa dan negara dapat berbentuk ancaman nirmiliter. Ancaman nirmiliter tidak berbentuk fisik sehingga tidak dapat ditangani secara langsung dengan menggunakan pendekatan kekuatan pertahanan yang menggunakan kekuatan bersenjata. Ancaman nirmiliter tersebut pada dimensi tertentu dapat berakumulasi dan mengancam kepentingan nasional, bahkan mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa.

Kepentingan nasional serta eksistensi bangsa dan negara harus terlindungi dari ancaman nirmiliter yang berdimensi ideologi, politik, sosial budaya, kamtibmas, dan keselamatan umum. Ancaman nirmiliter tidak dapat dihadapi dengan penggunaan kekuatan pertahanan yang bersifat fisik sehingga apabila tidak ditangani, akan timbul risiko besar yang mengancam eksistensi NKRI. Berbagai upaya lintas departemen secara terpadu terus dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran jati diri bangsa dan semangat bela negara serta kemampuan nyata pertahanan nilai bangsa yang didukung kondisi masyarakat Indonesia yang demokratis, partisipatif dan dinamis. Ancaman nirmiliter terkait dengan stabilitas nasional sehingga sangat mendasar untuk ditempatkan sebagai salah satu sasaran pertahanan negara.



### *Terselenggaranya Pertahanan Negara untuk Mewujudkan Perdamaian Dunia dan Stabilitas Regional*

Dunia yang aman dan damai serta lingkungan regional yang stabil merupakan kepentingan nasional Indonesia yang diperjuangkan sepanjang waktu. Indonesia tidak dapat hidup dalam lingkungan global dan regional yang diwarnai oleh konflik yang berkecamuk. Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sejauh ini per-damaian dunia belum dapat diwujudkan. Di sejumlah negara masih terdapat konflik dan bentuk-bentuk penindasan yang harus ditangani secara bermartabat. Indonesia akan mengembangkan kerja sama pertahanan negara dengan negara lain sebagai wadah untuk bersama-sama dengan negara lain mempromosikan pandangan dan langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional.







## KEBIJAKAN STRATEGIS PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA

### **Penangkalan**

Pertahanan Indonesia diselenggarakan atas dasar keyakinan pada kekuatan sendiri. Indonesia tidak mungkin dapat menyandarkan keselamatan negara dan bangsa Indonesia kepada bangsa lain. Indonesia juga tidak berada dalam suatu pakta pertahanan dengan negara lain. Oleh karena itu, kemampuan penangkalan Indonesia menjadi tumpuan dalam mempertahankan diri di tengah dinamika lingkungan strategis. Pertahanan Indonesia dengan sistem pertahanan semesta dikembangkan dengan mengedepankan kemampuan penangkalan yang bertumpu pada kekuatan TNI sebagai Komponen Utama dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia dalam susunan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.

Penangkalan Indonesia dibangun dalam strategi pertahanan berlapis yang memadukan lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan. Lapis pertahanan militer mengandalkan kekuatan dan kemampuan TNI dengan Alutsista yang andal serta prajurit yang profesional untuk melaksanakan OMP maupun OMSP. Dalam rangka itu, TNI sebagai kekuatan bersenjata dibangun dan dikembangkan secara profesional untuk mencapai tingkat kekuatan yang mencapai standar penangkalan. Ukuran standar penangkalan adalah standar kekuatan di atas kekuatan pokok minimum yang mampu menjaga NKRI serta disegani minimal pada lingkup regional.



Upaya mewujudkan profesionalitas TNI diarahkan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan jiwa juang prajurit TNI serta peningkatan Alutsista disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan revolusi di bidang militer. Pertahanan militer dilaksanakan TNI secara Tri-Matra Terpadu bersama-sama pertahanan nirmiliter dengan pusat kekuatan berupa dukungan rakyat atas peran TNI sebagai satu kesatuan dan totalitas pertahanan Indonesia. Sebaliknya, lapis pertahanan nirmiliter mengandalkan kemampuan dan usaha pertahanan tidak bersenjata dengan mendayagunakan faktor-faktor diplomasi dan politik, ekonomi, psikologi, sosial budaya, dan teknologi.

Pemberdayaan dan pendayagunaan lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter pada masa damai, selain untuk tujuan penangkalan, juga diarahkan untuk memberikan efek stabilitas yang memungkinkan pembangunan nasional dapat terselenggara untuk mencapai tingkat kesejahteraan rakyat yang cukup tinggi.

### **Menghadapi Ancaman Militer**

Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, ancaman militer mendapat perhatian utama karena berakibat langsung terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, dalam menghadapinya diperlukan strategi pertahanan yang efektif untuk dapat melindungi NKRI dengan segala kepentingannya.

Strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman militer disesuaikan dengan sumber serta bentuk dan besarnya ancaman aktual yang mengancam Indonesia. Upaya menghadapi ancaman agresi, yakni invasi suatu negara terhadap Indonesia, dihadapi dengan strategi



pertahanan yang mendayagunakan segenap kekuatan pertahanan secara total karena yang dipertaruhkan adalah mati atau hidupnya NKRI. Sebaliknya, dalam menghadapi ancaman militer dengan jenis bukan invasi, penggunaan kekuatan pertahanan negara disesuaikan dengan skala ancaman serta tingkat risiko yang ditimbulkannya.

Fungsi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai Komponen Utama. Ancaman militer yang berbentuk agresi militer yang dilakukan suatu negara dengan tujuan menduduki sebagian atau seluruh wilayah NKRI dihadapi dengan strategi pertahanan berlapis. Meskipun TNI merupakan Komponen Utama pertahanan negara, dalam menghadapi ancaman militer, dalam menghadapi agresi militer suatu negara, lapis diplomasi tetap menjadi pilihan sebagai lapis pertama untuk sebesar-besarnya mencegah berkobarnya perang dengan kekuatan senjata. Lapis diplomasi diselenggarakan dengan didukung oleh lapis perlawanan tidak bersenjata dan lapis pertahanan militer dengan menyiagakan segenap kekuatan TNI di seluruh Indonesia.

Sebagai kelanjutan dari dan sekaligus memperkuat upaya-upaya diplomasi, lapis perlawanan tidak bersenjata diberdayakan sebesar-besarnya sebagai wujud penolakan bangsa Indonesia terhadap suatu negara yang hendak menyerang Indonesia. Lapis perlawanan tidak bersenjata dalam hal menghadapi agresi suatu negara dikembangkan melalui usaha-usaha perang psikologis, seperti unjuk rasa di seluruh wilayah Indonesia untuk menolak kekuatan militer yang hendak menyerang atau menginvasi Indonesia, serta usaha lain untuk membangkitkan nasionalisme bangsa Indonesia.

Apabila usaha diplomasi serta perlawanan tidak bersenjata gagal



atau tidak efektif sehingga tidak mencegah agresi militer yang dilakukan oleh suatu negara, lapis pertahanan militer, yakni kekuatan TNI menjadi pilihan terakhir dan yang paling menentukan. Dalam hal ini Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara mengerahkan kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi militer untuk perang guna menyelamatkan NKRI dari ancaman agresi militer negara lain. Selanjutnya, Presiden memobilisasi Komponen Cadangan untuk menjadi pengganda TNI, yang pendayagunaannya diatur lebih lanjut oleh Panglima TNI.

Berdasarkan putusan politik, dalam pengerahan kekuatan TNI untuk menyelenggarakan OMP, Panglima TNI selanjutnya menggunakan TNI dengan mengembangkan strategi militer untuk menghadapi dan mengatasi agresi kekuatan militer dari negara lain yang nyata-nyata sudah mengancam Indonesia. Untuk memelihara kesinambungan operasi militer yang diselenggarakan TNI, Panglima TNI menggunakan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang telah dimobilisasi sebagai pengganda kekuatan Komponen Utama. Penggunaan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung oleh Panglima TNI disesuaikan dengan kebutuhan dan strategi militer dalam operasi militer perang yang diselenggarakan.

Dalam menghadapi ancaman militer yang bentuknya bukan agresi militer, instrumen dan strategi yang digunakan disesuaikan dengan bentuk dan besarnya ancaman serta tingkat risiko yang ditimbulkannya.

### *Menghadapi Agresi Militer*

Ancaman militer dari suatu negara yang hendak menyerang Indonesia dalam bentuk agresi militer atau tindakan serangan preemptive



diposisikan dalam tingkatan prioritas paling tinggi. Ancaman militer tersebut adalah ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan dan keselamatan bangsa Indonesia. Upaya menghadapi ancaman militer dari negara lain dilaksanakan dengan mengerahkan seluruh kekuatan nasional. Pelaksanaannya dengan strategi pertahanan berlapis yang disusun secara mendalam.

Wujud pertahanan berlapis yang disusun secara mendalam dimulai dari pertahanan nirmiliter dengan melaksanakan fungsi-fungsi diplomasi dan perlawanan tanpa senjata serta diikuti pertahanan militer apabila upaya pertahanan nirmiliter tidak lagi efektif.

### *Lapis Diplomasi*

Indonesia bukan negara agresor. Indonesia menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatan setiap negara. Dalam setiap perselisihan atau konflik dengan negara lain akan selalu mengupayakan pengedepanan usaha-usaha diplomatik. Komitmen bangsa Indonesia dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa adalah tidak akan membiarkan negara lain menduduki atau menguasai setiap jengkal tanah di wilayah Indonesia.

Dalam menghadapi ancaman militer dari negara lain, bangsa Indonesia akan mengembangkan strategi pertahanan defensif aktif. Salah satu wujud pertahanan defensif aktif adalah mengedepankan diplomasi sebagai garis terdepan pertahanan negara. Perang harus dapat dicegah dengan pendekatan politik penjinakan, yakni mengintensifkan usaha-usaha diplomatik. Oleh karena itu, dalam sistem pertahanan, diplomasi sebagai lini terdepan pertahanan, merupakan modalitas yang



dikembangkan secara efektif untuk mencegah suatu negara menyerang Indonesia.

Usaha-usaha diplomasi berintikan peran pertahanan nirmiliter melalui politik dan ekonomi. Bersamaan dengan itu, pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter lainnya disiapsiagakan untuk memperkuat upaya diplomasi, sekaligus untuk melakukan tahapan lanjutan apabila diplomasi mengalami jalan buntu.

Keberhasilan usaha-usaha diplomasi sangat bergantung pada kualitas dan kemampuan komunikasi politik yang diperankan oleh unsur-unsur pertahanan nirmiliter, yakni pengemban politik luar negeri.

### *Lapis Perlawanan Rakyat Tidak Bersenjata*

Selain melalui diplomasi, usaha pertahanan untuk menghadapi serangan militer suatu negara dengan pendekatan perlawanan nonkekerasan masih dapat dikembangkan dalam lingkup yang lebih luas. Perlawanan Rakyat tanpa senjata untuk menolak usaha suatu negara yang hendak menyerang Indonesia merupakan salah satu lapisan pertahanan yang masih dapat dikembangkan.

Pelibatan rakyat dalam menghadapi ancaman militer suatu negara tidak dimaksudkan untuk menjadikan rakyat sipil sebagai "tameng hidup" atau menjadikan seluruh rakyat sebagai kombatan. Tetapi, ketika yang terancam adalah kelangsungan hidup bangsa, mati atau hidupnya NKRI, seluruh bangsa Indonesia harus memandang serangan militer negara lain atau invasi itu sebagai ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia, tanpa terkecuali. Perwujudannya adalah reaksi spontan dan menyeluruh dari bangsa Indonesia untuk menentang dan menolak



aksi serangan militer suatu negara. Penentangan dan penolakan setiap bentuk usaha negara lain yang menyerang Indonesia dapat melalui aksi turun ke jalan, mendorong aksi solidaritas antarsesama negara kawasan, sesama anggota organisasi negara-negara Islam, dan negara-negara anggota Gerakan Non-Blok dan Perserikatan Bangsa Bangsa.

### *Lapis Pertahanan Militer*

Lapis pertahanan militer adalah perlawanan dengan kekuatan senjata untuk menghadapi kekuatan militer negara lain. Pertahanan militer berintikan TNI sebagai kekuatan utama, didukung oleh kekuatan cadangan dan kekuatan pendukung.

Pengerahan kekuatan militer dilakukan apabila lapis pertahanan melalui diplomasi dan usaha-usaha *kekuatan tanpa senjata* lainnya telah mengalami jalan buntu. Tahapannya adalah pengerahan Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung dalam strategi pertahanan berlapis. Upaya pertahanan militer dikembangkan dalam pola OMP yang disusun dalam strategi pertahanan defensif aktif dan pertahanan berlapis untuk tujuan preventif, preemptif, dan koersif.

### *Menghadapi Ancaman Militer Berbentuk Bukan Agresi*

Ancaman militer yang bentuknya bukan agresi militer atau tindakan serangan preemptive dari negara lain tetap diposisikan sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan, dan keselamatan bangsa Indonesia; ini berarti bahwa yang terancam adalah seluruh bangsa Indonesia. Pengerahan kekuatan siap nasional dilaksanakan untuk menghadapi bentuk ancaman militer tersebut, dengan memperhatikan



besarnya ancaman. Kekuatan TNI, baik secara matra maupun secara gabungan dalam susunan Tri-Matra Terpadu, akan dikerahkan menghadapi ancaman militer yang berbentuk bukan agresi dan serangan preemptive, yang besarnya kekuatan disesuaikan dengan bentuk, derajat, dan besaran ancaman yang dihadapi; menggunakan strategi pertahanan yang telah ditetapkan.

Bentuk ancaman militer yang dimaksud antara lain pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan bersenjata, gerakan separatis bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri, atau oleh teroris dalam negeri, ancaman keamanan di laut atau udara yurisdiksi nasional dan konflik komunal.

### *Menangani Pelanggaran Wilayah*

Untuk menghadapi aksi pelanggaran wilayah oleh negara lain, dilaksanakan penggunaan kekuatan pertahanan militer sebagai wujud upaya penegakan kedaulatan negara dan kewibawaan pemerintah dan bangsa Indonesia. Bentuknya dilakukan melalui langkah-langkah militer sesuai dengan kewenangan dengan mengerahkan kekuatan militer yang disiagakan, dengan mengutamakan tindakan preventif atau koersif dan memperhatikan besar kekuatan yang dikerahkan terhadap ruang dan waktu serta besaran ancaman yang dihadapi.

Tindakan preventif atau koersif tersebut dikembangkan dalam pola OMP, yang pelaksanaannya terbatas dan terukur sehingga dapat mencegah konflik yang lebih luas. Tindakan tersebut dilakukan secara terbatas dan terukur dan mengedepankan tindakan preventif berupa





peringatan kepada pelaku, dan menggiringnya ke luar wilayah. Apabila kontak fisik tak dapat dihindari, tindakan koersif yang diambil merupakan jalan terakhir dan disesuaikan dengan aturan pelibatan yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran wilayah.

Peran pertahanan nirmiliter dengan lingkup upaya diplomasi merupakan lini terdepan pertahanan untuk mencegah menghadapi ancaman militer berupa pelanggaran wilayah oleh negara lain. Diplomasi dikembangkan secara efektif untuk mencegah dan mengatasi setiap bentuk pelanggaran oleh suatu negara terhadap wilayah Indonesia. Upaya diplomasi juga merupakan sarana untuk menyelesaikan bentuk-bentuk pelanggaran wilayah dengan menjunjung tinggi derajat Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pengerahan kekuatan TNI dalam memperkuat diplomasi dilakukan dalam skala terbatas dengan memperhatikan arahan dari pemerintah. Upaya nirmiliter selain diplomasi adalah melalui pembenahan perangkat hukum yang berkaitan dengan perbatasan antarnegara.

### *Mengatasi Gerakan Separatisme dan Pemberontakan Bersenjata*

Penggunaan kekuatan pertahanan militer dalam menghadapi ancaman separatisme dan pemberontakan bersenjata dilakukan berdasarkan putusan politik pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang. Penggunaan kekuatan TNI dilaksanakan melalui OMSP dengan mengembangkan strategi operasi yang tepat dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Peran pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman separatisme adalah mengefektifkan fungsi-fungsi pembangunan nasional



dengan akar masalah separatisme dapat diatasi melalui pendekatan kesejahteraan dan keadilan. Separatisme adalah ancaman yang keberadaannya memperlihatkan bahwa kelompok-kelompok tersebut terus melakukan proses regenerasi. Fenomena ini harus disadari dan diikuti perkembangannya dalam menyusun strategi pertahanan nirmiliter.

Momentum demokratisasi dimanfaatkan oleh kelompok separatis guna mencapai tujuannya dengan menggunakan pola perjuangan nonbersenjata serta berusaha mencari perhatian dan dukungan dari luar negeri. Untuk menghadapi kecenderungan ancaman separatisme, unsur pertahanan nirmiliter ke depan akan banyak berperan aktif untuk mencari dan menemukan solusi yang tepat dan efektif. Dalam hal ini tanggung jawab pemerintah dalam melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk menyadarkan kelompok separatis ataupun pemberontak semakin diperlukan.

Ancaman separatisme berakar pada faktor-faktor nirmiliter sehingga harus dihadapi pula dengan pendekatan nirmiliter. Muara dari pendekatan nirmiliter adalah bagaimana membawa seluruh warga negara Indonesia merasa nyaman tinggal di negaranya sendiri sehingga bibit-bibit separatisme tidak berkembang. Rasa kebanggaan rakyat Indonesia sebagai bangsa yang bersatu dalam wadah NKRI dan yang ber-*Bhinneka Tunggal Ika* harus terus ditanamkan dan dikembangkan.

*Penyelesaian Damai di Aceh.* Dalam *Buku Putih Pertahanan 2003*, langkah-langkah penyelesaian persoalan di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) digambarkan secara komprehensif. Langkah-langkah tersebut telah dilaksanakan dan membuahkan hasil yang memuaskan untuk membuka lembaran baru yang cerah bagi Aceh.



Pemerintah dan masyarakat di Aceh secara bermartabat telah mampu menyelesaikan permasalahan secara damai dengan pendekatan dialogis yang melibatkan semua pihak dan dalam wadah NKRI. Proses pembauran antara eks GAM dan warga lainnya di bumi Aceh sudah mulai berjalan.

Pemerintah bersungguh-sungguh untuk mewujudkan kondisi Aceh yang stabil, aman, dan demokratis dalam wadah NKRI. Kesungguhan pemerintah tersebut telah ditunjukkan dalam hak-hak politik yang diberikan seluas-luasnya kepada seluruh warga Aceh, tanpa ada perbedaan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Khusus di Aceh Tahun 2006, nuansa pemerintahan yang demokratis telah dapat diwujudkan di Provinsi NAD melalui pemilihan umum Gubernur, Kepala Daerah, dan Walikota yang sangat demokratis dan menjadi contoh bagi daerah lain di seluruh Indonesia.

Keberhasilan menyelesaikan persoalan di Aceh merupakan prestasi Indonesia secara menyeluruh dan menjadi modalitas dalam menyelesaikan persoalan serupa di wilayah Indonesia lainnya. Kondisi yang sudah membaik ini akan terus dikawal bersama dan menjadi modalitas dalam membangun masyarakat Aceh yang sejahtera, aman, dan berkeadilan. Bangsa Indonesia juga menghargai upaya masyarakat internasional yang secara tulus membantu proses penyelesaian damai di Aceh.

### *Menangani Sabotase*

Pertahanan militer dapat digunakan dalam mencegah dan mengatasi ancaman yang berupa sabotase. Penggunaan kekuatan militer dalam penanganan sabotase adalah dalam rangka pengamanan VVIP



dan untuk melindungi objek vital nasional strategis, instalasi pemerintah, atau instalasi militer.

Penanganan terhadap ancaman sabotase dilaksanakan dengan strategi dan pola operasi khusus dalam bentuk OMSP. Kekuatan yang dikerahkan disesuaikan dengan tingkatan risiko serta misi yang diemban.

Pertahanan nirmiliter juga mempunyai peran dalam mengatasi ancaman sabotase. Sesuai dengan fungsinya, unsur nirmiliter berperan dalam menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat untuk tanggap terhadap situasi yang berkembang di lingkungannya serta melaporkan secara dini kepada pihak yang berwenang apabila terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan sabotase. Pihak pengelola objek atau instalasi vital harus selalu memperhatikan keamanan objek vital dengan mengembangkan sistem keamanan internal secara komprehensif.

### *Menangani Aksi Spionase*

Aksi spionase merupakan jenis ancaman militer yang penanganannya dapat menggunakan kekuatan dan kemampuan militer. Strategi yang digunakan menghadapi aksi spionase adalah pola operasi khusus untuk membongkar, melumpuhkan dan membersihkan jaringan spionase.

Unsur pertahanan nirmiliter mempunyai peran signifikan dalam menghadapi spionase, sesuai dengan fungsinya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk berperan aktif sebagai lini terdepan dalam mengawasi kegiatan mencurigakan di lingkungannya dan melaporkannya kepada pihak berwajib. Pihak-pihak terkait sesuai dengan



fungsinya meningkatkan kehidupan sosial kemasyarakatan di berbagai aspek untuk menghindarkan masyarakat dari pengaruh kegiatan spionase yang memanfaatkan keterbelakangan kehidupan sosial masyarakat.

### *Menangani Ancaman Terorisme*

Untuk memberikan payung hukum dalam penanggulangan ancaman terorisme, Indonesia telah menetapkan undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Penerapan undang-undang tersebut cukup efektif dan memberikan efek tangkal yang besar. Sejalan dengan itu, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat juga telah meratifikasi dua konvensi internasional mengenai pemberantasan terorisme, yaitu Konvensi Internasional Pemberantasan Pemboman oleh Terorisme Tahun 1997 dan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999.

Dengan menyadari bahwa terorisme memiliki jaringan internasional, Indonesia menjalin kerja sama dengan negara-negara lain untuk menangani masalah terorisme. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk pertukaran informasi intelijen, pembangunan kapabilitas, serta pertemuan-pertemuan untuk membicarakan perkembangan ancaman terorisme dan langkah-langkah untuk mengatasinya.

Dalam hal penanganan terhadap aksi kejahatan terorisme melalui pendekatan pertahanan militer, secara hukum penanganan ancaman terorisme merupakan bagian dari fungsi pertahanan negara untuk melindungi segenap warga bangsanya.



Penanganan terhadap ancaman terorisme, baik terorisme internasional maupun terorisme dalam negeri merupakan bagian dari tugas TNI sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tugas tersebut dilaksanakan TNI dengan pola pendekatan preventif dan represif/*koersif*. Penanganan dengan pola preventif lebih diutamakan dengan mengintensifkan fungsi intelijen, penggunaan satuan-satuan khusus yang dipersiapkan sebagai kekuatan responsif, serta pemberdayaan Komando Kewilayahan TNI dan satuan-satuan TNI.

Fungsi intelijen yang dimiliki TNI dan jajarannya mempunyai tugas ikut dalam mengumpulkan informasi tentang kegiatan terorisme di seluruh wilayah kerja TNI dengan mendayagunakan kemampuan intelijen yang berbasis manusia serta intelijen teknik. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pelaku-pelaku aksi terorisme juga memanfaatkan kemajuan teknologi dalam melakukan aksinya. Dalam hal ini fungsi intelijen dalam penanganan terorisme harus mengoptimalkan kemampuan penginderaan dini berbasis *human intelligent* dan diperlengkapi dengan sarana teknologi yang mampu mendeteksi kegiatan dan keberadaan pelaku kejahatan terorisme.

Komando Kewilayahan (yang terdiri atas Komando Kewilayahan Darat, Komando Kewilayahan Laut, dan Komando Kewilayahan Udara) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, merupakan instrumen militer yang dapat difungsikan dalam menangkal ancaman terorisme. Keberadaan unsur-unsur kewilayahan dengan gelar kekuatan yang menjangkau sampai tingkat kecamatan, bahkan desa menjadi faktor penangkal yang cukup efektif untuk didayagunakan. Selanjutnya, keberadaan setiap unsur militer dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi faktor



penangkal untuk meniadakan setiap niat dan usaha pelaku kejahatan terorisme.

Upaya penggunaan kekuatan pertahanan militer untuk penanganan terorisme dilaksanakan dengan tidak melanggar hak asasi manusia dan tidak diskriminatif. Penanganan aksi terorisme internasional atau yang berkolaborasi dengan terorisme dalam negeri dilaksanakan secara lintas instansi dan terpadu serta dapat bekerja sama dengan negara lain berdasarkan garis kebijakan pemerintah dan politik luar negeri.

Pelibatan unsur-unsur nirmiliter dalam penanganan isu terorisme sesuai dengan fungsinya diperlukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya teroris. Pelibatan tersebut secara nyata diselenggarakan dengan memberdayakan instansi pemerintahan di semua lini untuk menertibkan administrasi kependudukan dalam rangka pengawasan kegiatan masyarakat. Khusus di pintu-pintu masuk Indonesia, seperti wilayah perbatasan, bandar udara internasional, dan pelabuhan internasional, pengawasan lalu lintas orang dan barang di seluruh pintu keluar-masuk wilayah Indonesia perlu dikembangkan dengan suatu sistem pengawasan yang terpadu.

### *Menangani Ancaman Keamanan di Laut dan Udara*

Penanganan terhadap ancaman keamanan di laut dan udara dilaksanakan untuk menjamin keamanan dan penegakan hukum. Strategi penanganannya melalui pendekatan militer dan nirmiliter. Dalam pendekatan dengan menggunakan kekuatan pertahanan militer, strategi yang digunakan disesuaikan dengan jenis ancaman yang dihadapi dengan mengaktifkan kemampuan TNI secara Tri-Matra Terpadu. Dalam hal memerlukan penanganan melalui kerja sama dengan negara lain, upaya-



upaya ditempuh berdasarkan putusan politik negara.

Pendekatan dengan menggunakan kekuatan pertahanan nirmiliter, diselenggarakan secara fungsional, antara lain dengan menyusun, menata, dan membenahi peraturan perundangan yang berlaku agar tidak tumpang tindih dalam implementasi di lapangan. Selain peraturan perundangan, juga diselenggarakan dengan penataan sistem. Penataan sistem meliputi sistem perambuan di alur pelayaran untuk kepentingan keamanan navigasi, penataan, dan penertiban penggunaan alur pelayaran laut untuk kepentingan keamanan lingkungan, serta penataan sistem koridor udara untuk kepentingan keamanan penerbangan.

### *Menangani Konflik Komunal*

Dalam penanganan konflik komunal, penggunaan kekuatan militer harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut. *Pertama*, penggunaan kekuatan militer dalam penanganan konflik komunal didasari oleh putusan politik. *Kedua*, pelaksanaannya dilakukan dengan OMSP. *Ketiga*, penggunaan kekuatan serta strategi disesuaikan dengan sifat operasi yang dilaksanakan, yakni OMSP, serta kondisi konflik komunal yang dihadapi.

Unsur pertahanan nirmiliter dalam penanganan konflik komunal mencakup hal berikut. *Pertama*, penanganan konflik komunal mengedepankan pendekatan hukum dan pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk menyadarkan kelompok-kelompok yang bertikai. *Kedua*, unsur-unsur terkait harus mampu mempelajari akar permasalahan yang menjadi penyebab konflik dan secara komprehensif mencari solusi terbaik yang





dapat diterima pihak-pihak yang bertikai. *Ketiga*, peningkatan kehidupan sosial masyarakat di berbagai aspek untuk menghindarkan masyarakat dari kesenjangan sosial, yang dapat menyulut konflik antarmasyarakat.

### **Menghadapi Ancaman Nirmiliter**

Ancaman nirmiliter merupakan golongan ancaman pertahanan yang sifatnya tidak secara langsung mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Namun, risiko yang ditimbulkan dari ancaman nirmiliter dapat berimplikasi mengganggu stabilitas nasional. Terganggunya stabilitas nasional tidak saja menghambat pembangunan nasional, tetapi lambat-laun dapat berkembang menjadi permasalahan kompleks yang mengancam kredibilitas pemerintah dan eksistensi bangsa. Ancaman nirmiliter sesuai dengan sifatnya dihadapi dengan pendekatan nirmiliter yang menempatkan departemen dan lembaga nondepartemen sebagai unsur utama dan TNI sebagai pendukung.

Dinamika politik dan keamanan yang terjadi di sejumlah negara serta krisis ekonomi dan sosiokultural telah menyebabkan tingkat kesenjangan yang makin lebar. Kondisi tersebut lambat laun berkembang dan menjalar melampaui batas-batas negara serta memunculkan aktor-aktor non-negara yang memanfaatkan titik-titik rawan di setiap negara.

Indonesia dengan posisi silang, serta dikelilingi oleh banyak negara yang sedang mengalami dinamika politik, keamanan, ekonomi, dan sosiokultural, seperti digambarkan di atas, tidak tertutup kemungkinan dampaknya akan mempengaruhi kondisi domestik Indonesia. Dampak dimaksud di antaranya dapat berwujud ancaman keamanan lintas negara, seperti aksi terorisme, gangguan keamanan di laut dan dirgantara, isu-isu keamanan di perbatasan, dan bentuk-bentuk ancaman keamanan



lintas negara lainnya. Tindak ancaman keamanan lintas negara tersebut harus ditangani agar kepentingan nasional dapat dilindungi dan stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia dapat ditegakkan. Untuk menangani ancaman nirmiliter tersebut, pertahanan nirmiliter dan pertahanan militer melaksanakan fungsi masing-masing secara proporsional sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

Ancaman dan gangguan keamanan yang berdimensi pertahanan yang timbul di dalam negeri menjadi fungsi pertahanan untuk menghadapinya. Bentuk-bentuk ancaman dan gangguan, seperti separatisme, pemberontakan, ancaman, dan gangguan terhadap objek vital nasional, ancaman terhadap keamanan Presiden dan Wakil Presiden, beserta keluarganya, serta tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing di Indonesia, termasuk dampak bencana alam, tergolong ke dalam domain fungsi pertahanan negara yang melibatkan unsur-unsur pertahanan baik militer maupun nirmiliter. Bentuk ancaman nirmiliter yang dihadapi sangat beragam sehingga dalam pelaksanaannya terdapat departemen/LPND yang akan menjadi penjurur, sedangkan departemen/LPND yang lain bersifat membantu.

### *Menghadapi Ancaman Berdimensi Ideologi*

Salah satu ancaman nirmiliter yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ancaman yang berdimensi ideologi. Upaya menghadapi atau menangkal ancaman ini adalah dengan kebijakan dan langkah-langkah politik yang tepat dan intensif untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila dan konsep penanganannya ditempatkan dalam kerangka upaya bela negara. Strategi menghadapi ancaman ini dihadapi dengan konsep pertahanan berlapis.



Lapis terdepan dalam konsep penanganannya terdiri atas unsur-unsur pertahanan nirmiliter, yakni departemen atau LPND yang membidangi ideologi.

Departemen serta unsur pemerintahan yang membidangi politik dalam negeri mengerahkan seluruh kekuatan politik serta instrumen pemerintahan dalam negeri mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah guna menghadapi ancaman berdimensi ideologi, sementara departemen serta unsur pemerintahan yang membidangi politik luar negeri mengerahkan jajarannya yang tersebar di setiap negara untuk penguatan langkah serta upaya diplomasi dalam menangkal usaha-usaha pihak lain yang mengancam ideologi Pancasila. Unsur pemerintah yang membidangi informasi mendinamisasikan kekuatan nasional di bidang informasi untuk melakukan "operasi informasiimbangan". Unsur pemerintah yang membidangi pendidikan memberikan pengajaran dan kesadaran akan ideologi Pancasila secara bertingkat dan berlanjut kepada para siswa dan mahasiswa di semua tingkat dan jenjang pendidikan. Unsur pemerintah yang membidangi agama memberdayakan para pemimpin agama untuk menjadi mitra pemerintah dalam menyinergikan strategi untuk membentengi masyarakat dari ancaman penetrasi ideologi asing yang membahayakan serta merusak harmonisasi kehidupan kebangsaan serta membahayakan keamanan negara.

Peran lapis pertahanan militer dalam hal ini dilaksanakan melalui program pelaksanaan bakti TNI yang secara intensif sesuai dengan wilayah kerja unit TNI. Titik berat pelaksanaannya adalah dengan peningkatan komunikasi sosial TNI yang bersinergi dengan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh unsur-unsur nirmiliter sesuai bidangnya masing-masing, terutama materi nonfisik. Komunikasi sosial TNI diselenggarakan dalam



format peningkatan kesadaran bela negara, dengan memanfaatkan program bela negara di lingkungan pekerjaan, pendidikan dan perumahan dalam rangka revitalisasi Pancasila.

### *Menghadapi Ancaman Berdimensi Politik*

Dalam menghadapi ancaman nirmiliter yang berdimensi politik, pertahanan nirmiliter di bidang politik menjadi unsur dan kekuatan utama yang dibantu oleh unsur nirmiliter lainnya, termasuk perkuatan dari unsur pertahanan militer. Langkah-langkah yang ditempuh menghadapi ancaman berdimensi politik dilaksanakan melalui dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan ke dalam, yaitu pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka negara demokrasi yang menghargai pluralisme bangsa Indonesia. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya stabilitas politik dalam negeri yang dinamis serta memberikan efek penangkal yang tinggi. Penataan ke dalam diwujudkan melalui pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang dikemas ke dalam penguatan Tiga Pilar berikut.

*Pertama*, penguatan penyelenggaraan pemerintahan negara yang sah, efektif, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab yang berkemampuan mewujudkan tujuan pembentukan pemerintah negara, seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

*Kedua*, penguatan lembaga legislatif sehingga menjadi lembaga yang berkualitas dan profesional pada bidangnya. Lembaga legislatif yang mampu bersinergi dengan pemerintah dalam memproses dan melahirkan produk-produk legislasi yang efektif dan kontekstual bagi kepentingan pembangunan nasional. Lembaga legislatif yang melaksanakan fungsi



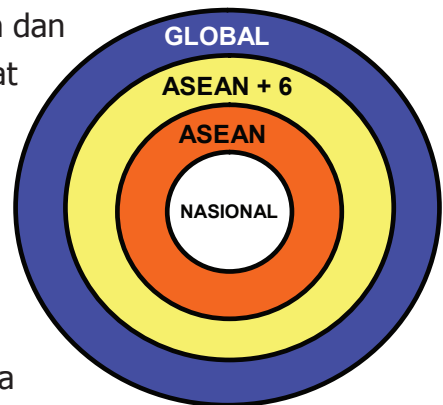
kontrol secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka kepentingan bangsa dan negara bukan atas kepentingan golongan atau pribadi, serta berdasarkan kaidah dan etika bernegara dalam negara demokrasi.

*Ketiga*, Penguatan kekuatan politik nasional baik partai politik maupun organisasi massa sebagai instrumen dalam pemberdayaan masyarakat sebagai subjek politik dan subjek pembangunan nasional. Kekuatan politik berkewajiban mewujudkan dan meningkatkan perannya dalam pendidikan politik bagi warga negara, terutama konstituennya sehingga menjadi warga negara yang sadar hukum yang memahami kewajiban dan hak sebagai warga negara.

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan keluar yang diarahkan untuk mendinamisasikan strategi dan upaya diplomatik melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun kerja sama dan saling percaya dengan negara-negara lain sebagai kondisi untuk mencegah atau mengurangi potensi konflik antarnegara, yang dimulai dari tataran internal, regional, supraregional, hingga global.

Pada lingkup internal, yaitu melalui penciptaan, pembangunan, dan peningkatan kondisi dalam negeri yang semakin mantap dan stabil, yang dibarengi dengan upaya-upaya peningkatan dan perbaikan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kuat serta penguatan dan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pada lingkup regional, politik dan diplomasi Indonesia diarahkan untuk selalu aktif dan berperan dalam membangun dan meningkatkan kerja sama dengan negara





lain dalam kerangka prinsip saling percaya, saling menghargai, dan tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri. Dalam lingkup Kawasan Asia Tenggara, dalam wadah dan semangat ASEAN, politik luar negeri Indonesia dikembangkan untuk bersama-sama menciptakan Kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan sejahtera serta memperkuat Perjanjian Persahabatan dan Kerja sama (*TAC*). Bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat ASEAN, yaitu Masyarakat Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi dan Perdagangan ASEAN, serta Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.

Pada lingkup supraregional, politik luar negeri dikembangkan untuk berperan dalam penguatan ASEAN plus Enam yang terdiri atas 10 negara anggota ASEAN bersama-sama dengan Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru, melalui hubungan bilateral yang harmonis dan terpelihara serta diwujudkan dalam kerja sama yang lebih konkret. Dalam kerangka penguatan ASEAN plus Enam tersebut, kinerja politik luar negeri Indonesia harus mampu membangun hubungan dan kerja sama yang memberikan jaminan atas kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, tidak adanya intervensi, terutama jaminan tidak adanya agresi terhadap wilayah kedaulatan Indonesia.

Pada lingkup global, politik luar negeri harus memainkan perannya secara maksimal dalam memperjuangkan kepentingan nasional melalui keberadaan Indonesia sebagai anggota PBB, Gerakan Non-Blok, Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Forum Regional ASEAN (ARF). Peran diplomasi harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi ancaman berdimensi politik yang mengancam kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia serta melakukan langkah-langkah pencegahan.

Lapis pertahanan militer dalam menghadapi ancaman politik yang



membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, mengembangkan strategi pertahanan militer dalam konteks memperkuat usaha-usaha diplomasi yang dilakukan unsur pertahanan nirmiliter. Implementasi upaya pertahanan militer dalam konteks menghadapi ancaman berdimensi politik dapat berwujud pertemuan tahunan para Menteri Pertahanan seluruh ASEAN (ADMM) para Panglima Tentara seluruh ASEAN (CDFIM) dan berbagai pertemuan para pejabat tinggi militer lainnya.

### *Menghadapi Ancaman Berdimensi Ekonomi*

Dalam menghadapi ancaman berdimensi ekonomi, sistem dan upaya pertahanan negara yang ditempuh adalah dengan membangun ketahanan di bidang ekonomi melalui penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing. Sasaran pembangunan bidang ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi bagi perwujudan stabilitas ekonomi yang memberikan efek kesejahteraan dan penangkalan yang efektif sekaligus mampu menjadi pemenang dalam era globalisasi.

Aspek ekonomi dalam kerangka pertahanan negara memiliki peran vital. Ekonomi dengan pertumbuhan yang cukup tinggi akan memungkinkan terselenggaranya pembangunan pertahanan yang berdaya tangkal. Bahkan, kondisi perekonomian nasional yang cukup tinggi tersebut menjadi daya tangkal pertahanan yang cukup efektif.

Tantangan perekonomian Indonesia ke depan diperhadapkan dengan era komunitas bebas ASEAN 2015, dengan produk-produk asing akan masuk secara bebas dan bersaing dengan produk dalam negeri. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan upaya akselerasi pembangunan perekonomian nasional yang berdaya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.



Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari internal, prioritas kebijakan dapat berupa penciptaan lapangan kerja padat karya sebagai solusi memberantas kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan pemilihan teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja.

Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari eksternal, Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara utama dalam tatanan ekonomi-politik dunia. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dunia sangat penting dalam upaya peningkatan kemajuan ekonomi dalam negeri.

Lapis pertahanan militer dalam menghadapi ancaman berdimensi ekonomi, mengembangkan pilihan strategis untuk membantu unsur utama dari pertahanan nirmiliter. Dalam hal ini keterlibatan lapis pertahanan militer diwujudkan dalam meningkatkan usaha pertahanan untuk menciptakan kondisi keamanan nasional yang terkendali, membantu kelancaran distribusi komoditas dan kebutuhan pokok masyarakat, terutama di daerah-daerah pedalaman dan terisolasi yang tidak dapat dijangkau dengan sarana transportasi umum. Program Bakti TNI yang melibatkan kerja sama dengan unsur pertahanan nirmiliter lainnya lebih ditingkatkan pada perbaikan sarana prasarana masyarakat yang membawa dampak pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.

### *Menghadapi Ancaman Berdimensi Sosial Budaya*

Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas





ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut menjadi titik pangkal segala permasalahan, seperti separatisme, terorisme, kekerasan yang melekat berurat berakar, bencana sebagai akibat perbuatan manusia. Isu-isu tersebut lama-kelamaan menjadi "kuman penyakit" yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Watak kekerasan yang melekat dan berurat berakar berkembang, seperti api dalam sekam di kalangan masyarakat yang menjadi pendorong konflik-konflik antar masyarakat atau konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Konflik horizontal yang berdimensi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) pada dasarnya timbul sebagai akibat masih melekatnya watak kekerasan. Watak kekerasan itu pula yang mendorong tindakan kejahatan, termasuk perusakan lingkungan dan bencana buatan manusia. Faktor-faktor tersebut berproses secara meluas serta menghasilkan efek domino sehingga dapat melemahkan kualitas bangsa Indonesia.

Ancaman dari luar berupa penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung mempengaruhi tata nilai sampai pada tingkat lokal. Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan dunia menjadi desa global tempat interaksi antarmasyarakat terjadi secara langsung. Yang terjadi tidak hanya transfer informasi, tetapi juga transformasi dan sublimasi nilai-nilai luar secara serta-merta dan sulit dikontrol. Sebagai akibatnya, terjadi benturan tata nilai sehingga lambat-laun nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa semakin terdesak misalnya oleh nilai-nilai individualisme, konsumerisme dan hedonisme. Diakui bahwa nilai-nilai luar tidak semuanya negatif; banyak pula nilai positif yang memberikan efek kemajuan untuk diterapkan. Nilai-nilai luar yang positif,



antara lain kedisiplinan, keuletan bekerja dan belajar, serta pemanfaatan waktu untuk hal-hal yang produktif sehingga masyarakatnya menjadi sejahtera. Nilai-nilai positif tersebut patut diadopsi dan diterapkan dalam membangun masyarakat Indonesia. Dimensi sosial budaya yang menjadi ancaman yang melemahkan bangsa Indonesia di antaranya adalah peredaran narkoba dan obat terlarang yang mengancam generasi muda Indonesia. Di samping itu, peredaran media pornografi serta perdagangan wanita selain mengancam moral juga menjadi media penyebaran virus HIV/AIDS. Penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung sering kali menyebabkan terjadinya benturan peradaban yang mengancam nilai-nilai serta kearifan lokal maupun nasional, sehingga ketahanan nilai-nilai budaya merupakan suatu keniscayaan.

### *Menghadapi Ancaman Berdimensi Berbasis Teknologi dan Informasi*

Unsur pertahanan nirmiliter yang membidangi teknologi dan informasi merupakan unsur utama dalam menghadapi ancaman teknologi dan informasi. Peran unsur utama adalah mendinamisasikan kekuatan dan kemampuan teknologi nasional untuk mengimbangi tekanan pihak luar yang menggunakan faktor teknologi yang melemahkan daya tangkal bangsa.

Pengelolaan teknologi dan informasi untuk mempercepat pengembangan sumber daya manusia yang menguasai dan memahami teknologi dan informasi juga merupakan peran yang dilaksanakan oleh unsur pertahanan nirmiliter. Guna menghadapi ancaman teknologi dan informasi secara konkret, strategi pembangunan nasional di bidang teknologi dan informasi diselenggarakan untuk mewujudkan kemandirian



industri nasional yang berdaya saing di dunia internasional sehingga mampu mengatasi ketergantungan teknologi dari negara-negara lain. Upaya kemandirian tersebut dikembangkan melalui penguasaan pasar domestik oleh produk-produk nasional serta mampu menerobos pasar regional dan supraregional dalam kerangka Indonesia menjadi pemain dalam era globalisasi ekonomi dan perdagangan.

Dalam bidang pertahanan, pembangunan teknologi pertahanan ditujukan untuk mewujudkan daya tangkal bangsa, yakni kemampuan untuk memproduksi sendiri kebutuhan pertahanan yang meliputi persenjataan, amunisi dan propelan, alat komunikasi pertahanan, serta bidang otomotif dengan memproduksi mesin-mesin kendaraan taktis hingga kendaraan tempur berat. Dalam pembangunan industri pertahanan, informasi mempunyai peran vital untuk keberhasilan upaya pertahanan sehingga secara bertahap akan dikembangkan kemampuan menuju *network centric warfare*.



Lapis pertahanan militer dalam menghadapi ancaman nirmiliter yang berdimensi teknologi dan informasi berperan untuk memberikan bantuan perkuatan terhadap unsur utama pertahanan nirmiliter. Pemberdayaan bidang-bidang penelitian dan pengembangan teknologi yang dimiliki dalam mendeteksi ancaman serta membantu mengakselerasi usaha-usaha kemandirian industri pertahanan dalam negeri merupakan strategi yang dipilih untuk menghadapi ancaman berdimensi teknologi



dan informasi. Pilihan strategi dimaksud juga dikembangkan melalui komitmen untuk sebesar-besarnya memanfaatkan produk dalam negeri dalam pembangunan kapabilitas pertahanan negara sebagai stimulus yang mendorong industri dalam negeri untuk lebih bergairah mengembangkan usahanya.

### *Menghadapi Ancaman Berdimensi Keselamatan Umum*

Ancaman terhadap keselamatan umum dalam sistem pertahanan negara menempatkan unsur-unsur pemerintahan di bidang keselamatan umum sebagai unsur utama dalam menghadapinya. Fungsi keselamatan umum bersifat multi-instansi yang mencakupi, antara lain, penanganan terhadap penanggulangan dampak bencana alam dan bencana buatan manusia, penyakit pandemi, keselamatan transportasi, serta pengungsian.

Tersedianya suatu manajemen yang mengintegrasikan fungsi-fungsi pemerintahan dan nonpemerintahan dalam satu kesatuan pengendalian merupakan strategi penanganan terhadap bahaya yang mengancam keselamatan umum. Peringatan dini, mitigasi, penanganan mulai tanggap darurat sampai dengan rehabilitasi merupakan strategi yang digunakan dalam menghadapi ancaman tersebut.

Untuk menghadapi wabah penyakit pandemik yang merupakan salah satu ancaman terhadap keselamatan umum, instrumen penanganan yang dikedepankan berasal dari unsur kesehatan, atau pertanian, bergantung pada titik berat bahaya yang dihadapi serta dibantu unsur-unsur dari sektor yang lain.

Untuk penanggulangan dampak bencana alam, unsur utama



bertindak untuk mendinamisasikan kekuatan nasional untuk penanganan pengungsian, pencarian korban, serta usaha-usaha konkret untuk mengatasi dampak bencana serta langkah-langkah rekonstruksi. Unsur utama tersebut berasal dari pertahanan nirmiliter yang mempunyai fungsi penanggulangan bencana alam dan didukung oleh unsur-unsur lainnya.

Lapis pertahanan militer dalam hal keselamatan umum yang menyangkut penanganan dampak bencana alam dengan skala besar adalah menggerakkan TNI sebagai kekuatan yang siap dikerahkan dan digunakan untuk membantu unsur-unsur pertahanan nirmiliter lainnya. Pelibatan TNI dalam penanganan bencana alam pelaksanaannya dalam kerangka OMSP. Dalam penanggulangan dampak bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, kinerja sektor pertahanan merupakan fungsi pemerintahan yang selama ini telah ditunjukkan secara baik. Peran aktif TNI dalam menanggulangi dampak bencana yang menimpa sejumlah wilayah di Indonesia selama ini membuktikan bahwa TNI memiliki kemampuan, keterampilan, dan kesungguhan untuk tampil sebagai instrumen negara yang diandalkan.

Untuk menghadapi kemungkinan pelibatan TNI dalam tugas-tugas serupa di masa datang, pemberdayaan kemampuan TNI yang meliputi bidang manajemen, keterampilan prajurit, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai merupakan prioritas pemerintah. Dalam bidang manajemen, upaya peningkatan diarahkan pada penataan organisasi, mekanisme kerja, sistem komando dan pengendalian serta hubungan antar departemen/lembaga. Dalam bidang keterampilan prajurit, upaya yang dilaksanakan adalah melalui peningkatan fungsi dan peran kelembagaan TNI yang mampu membekali prajurit dengan keterampilan yang diperlukan dalam tugas-tugas tersebut. Dalam hal dukungan sarana



dan prasarana, pemerintah akan memperlengkapi TNI dengan Alutsista yang menjamin mobilitas TNI serta alat peralatan modern, yang dapat digunakan selain untuk kepentingan pertahanan dalam menghadapi ancaman militer, juga dapat dimanfaatkan

dalam tugas-tugas penanggulangan bencana alam, pengungsian, dan bantuan kemanusiaan.

### **Pertahanan Militer dalam Menghadapi Ancaman Nirmiliter Bersifat Lintas Negara**

Ancaman nirmiliter yang bersifat lintas negara adalah ancaman keamanan lintas negara yang terorganisir yang melibatkan pelaku-pelaku dari negara lain. Bentuk ancaman dimaksud antara lain aksi terorisme internasional, gangguan keamanan di wilayah laut, gangguan keamanan dirgantara, dan gangguan keamanan di sepanjang garis perbatasan darat. Bentuknya berupa penyelundupan senjata, penyelundupan manusia dan bahan peledak, perompakan dan pembajakan, pembalakan liar, penangkapan ikan secara tidak sah, dan lain-lain. Unsur pertahanan militer, yakni satuan-satuan TNI, dapat didayagunakan untuk mengatasi bentuk-bentuk ancaman nirmiliter yang bersifat lintas negara yang dilakukan oleh aktor nonnegara dari negara lain maupun yang bekerja sama dengan aktor-aktor di Indonesia. Pada tingkat tertentu di mana ancaman keamanan lintas negara dapat membahayakan keselamatan



bangsa Indonesia serta mengancam kepentingan nasional Indonesia, pemerintah dapat menggunakan kekuatan TNI untuk mengatasinya.

Pendayagunaan unsur pertahanan militer dalam mengatasi bentuk ancaman nirmiliter yang bersifat lintas negara ditempatkan dalam lingkup tugas pelibatan TNI yang mencakup pengamanan di wilayah-wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terdepan, keamanan laut dan perairan, keamanan wilayah udara, bandar udara, dan pelabuhan.



Penanganan ancaman keamanan tersebut oleh unsur-unsur TNI berupa unjuk kekuatan sebagai penggentar dalam rangka pencegahan, unsur penindakan awal, termasuk juga dalam kekuatan gabungan bersama-sama dengan unsur-unsur nirmiliter.

Mengatasi ancaman keamanan lintas negara pada dasarnya merupakan tugas TNI yang dilaksanakan melalui OMSP. Dalam hal penegakan keamanan di laut, TNI memiliki kewenangan polisional untuk menangani bentuk-bentuk ancaman keamanan lintas negara yang mengganggu keamanan di perairan Indonesia sampai Zona Ekonomi Eksklusif.

Bentuk-bentuk penanganan oleh TNI untuk menegakkan keamanan di laut meliputi penyelidikan, pengejaran, penangkapan, dan penyidikan terhadap para pelaku tindak kejahatan di laut. Dalam kerangka fungsi polisional, TNI tidak melakukan fungsi pengadilan yang menjadi fungsi penegak hukum dari unsur nirmiliter.

Penegakan keamanan di udara adalah bagian yang sulit dipisahkan



## DEPARTEMEN PERTAHANAN RI

---

dari fungsi TNI dalam menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Penegakan keamanan di udara di samping untuk menjaga wilayah udara dari segala bentuk pelanggaran kedaulatan di udara juga memberikan efek bagi keselamatan penerbangan sipil yang merupakan ranah otoritas sipil. TNI memiliki kemampuan untuk menegakkan keamanan di udara melalui sistem peralatan dan personel yang dimilikinya. Dalam mengatasi ancaman dan gangguan keamanan di udara, TNI melakukan tugas OMSP sesuai dengan batas-batas kewenangan TNI.







## PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN NEGARA

### BAGIAN KESATU

## GARIS BESAR PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG BIDANG PERTAHANAN NEGARA

### Kondisi Umum Pertahanan Negara

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia serta dalam dinamika penyelenggaraan pembangunan nasional telah terbukti bahwa Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta menjadi sistem yang mampu melawan penjajah dan berhasil menjadikan Indonesia negara merdeka dan berdaulat. Karena itu Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta harus tetap dipertahankan dan dikembangkan untuk menegakkan kedaulatan NKRI, menjaga keutuhan wilayah negara, dan menjamin keselamatan bangsa. Untuk menjamin tegaknya NKRI, fungsi pertahanan negara sangat berperan dan menjadi salah satu fungsi pemerintahan untuk menjaga kelangsungannya.

Dalam menyelenggarakan pembangunan nasional, pemerintah masih menempatkan aspek kesejahteraan sebagai prioritas. Dari alokasi APBN sampai dengan Tahun Anggaran 2007, pertahanan negara belum menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2008, sektor



Pertahanan Negara masih berada pada urutan prioritas ke-empat di bawah fungsi pelayanan umum, pendidikan, dan ekonomi. Sasaran pokok yang ingin dicapai dalam upaya meningkatkan kemampuan pertahanan pada tahun 2008 diarahkan pada kapabilitas pertahanan, peningkatan jumlah dan kondisi kesiapan operasional pertahanan, modernisasi Alutsista, serta teknologi dan industri pertahanan dalam negeri. Hingga saat ini, selain jumlah maupun kandungan teknologi alat utama sistem senjata (Alutsista) yang masih memprihatinkan, bahkan di bawah standar penangkalan, juga kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraannya masih rendah. Di samping itu, kebutuhan pemenuhan, pemeliharaan, maupun suku cadang Alutsista TNI masih bergantung pada negara-negara lain. Tantangan pembangunan nasional, seperti digambarkan di atas berimplikasi terhadap pelaksanaan pembangunan sektor Pembangunan Pertahanan Negara yang hingga kini belum mampu mencapai kekuatan pertahanan minimal. Kondisi tersebut berdampak terhadap kemampuan dan profesionalisme TNI dalam melaksanakan fungsinya sebagai Komponen Utama sistem Pertahanan Negara.

Reformasi yang menghendaki perubahan secara total di segala bidang penyelenggaraan negara telah berhasil menuntaskan pemisahan TNI dan Polri dengan penataan perannya masing-masing. Pemisahan tersebut berdampak pada penanganan keamanan dalam negeri yang belum efektif. Reformasi di bidang Pertahanan dan Keamanan Negara tidak hanya menyangkut pemisahan antara TNI dan Polri, tetapi juga mengenai penataan lebih lanjut hubungan kelembagaan antara keduanya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tataran kewenangan masing-masing.



### **Tantangan yang Dihadapi**

Perubahan geopolitik internasional, yang ditandai dengan menguatnya pendekatan unilateralisme, berdampak terhadap berkembangnya doktrin pertahanan serangan preemptive, yang dapat menembus batas-batas yurisdiksi suatu negara di luar kewajaran hukum internasional. Selain itu, menguatnya kemampuan militer negara tetangga yang secara signifikan melebihi kemampuan pertahanan Republik Indonesia telah melemahkan posisi tawar dalam ajang diplomasi internasional. Oleh karena itu, salah satu tantangan utama pembangunan kemampuan pertahanan negara yang harus dihadapi pada masa akan datang adalah membangun kekuatan pertahanan di atas kekuatan pertahanan minimal sehingga memiliki efek penangkalan di kawasan regional maupun internasional.

Pembangunan kekuatan pertahanan dengan kemampuan penangkalan tersebut seharusnya telah dapat dicapai sesuai dengan penahapan dalam pembangunan nasional. Namun, tantangan pembangunan nasional untuk memulihkan kondisi ekonomi yang mengalami krisis hebat sejak tahun 1998 telah berdampak terhadap perlambatan pembangunan di bidang-bidang yang lain, termasuk bidang pertahanan. Di samping itu, konflik berintensitas rendah, antara lain terorisme, separatisme, konflik komunal, ancaman keamanan transnasional, serta terkurasnya kekayaan negara, terutama hasil laut dan hasil hutan akibat tindakan ilegal, telah menghambat pencapaian pembangunan kekuatan pertahanan tersebut karena banyak menyita perhatian dan biaya.

Tantangan lain dalam pembangunan pertahanan negara adalah



tuntutan kebutuhan untuk membangun TNI yang profesional sehingga menjadi kekuatan nasional yang mampu mengemban fungsinya di era globalisasi dengan hakikat ancaman yang semakin kompleks. Usaha pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI serta menjamin keselamatan bangsa dari setiap ancaman akan sangat berat dilakukan tanpa didukung oleh Alutsista yang modern. Oleh karena itu, tantangan dalam membangun TNI yang profesional pada hakikatnya adalah membangun kemampuan pertahanan negara dengan meningkatkan jumlah dan kondisi Alutsista TNI untuk mencapai kekuatan melampaui kekuatan pokok minimum sesuai dengan kemajuan teknologi.

Kondisi riil TNI saat ini harus diakui masih berada di bawah standar profesionalisme. Kekuatan TNI dari segi Alutsista masih diperhadapkan dengan kondisi keterbatasan dan kekurangan dari segi jumlah dan ketidaksiapan sebagai akibat dari Alutsista yang ada saat ini pada umumnya merupakan aset yang sudah ketinggalan teknologi, sementara proses regenerasinya berjalan sangat lambat.

Paralel dengan kemajuan teknologi pertahanan tersebut, negara-negara lain melakukan modernisasi kekuatan pertahanannya di bidang Alutsista, sementara Indonesia relatif tertinggal dalam bidang ini. Ketertinggalan pembangunan pertahanan Indonesia saat ini pada dasarnya merupakan akumulasi dari kebijakan pembangunan nasional di masa lalu yang lebih mengutamakan aspek kesejahteraan daripada aspek pertahanan. Sebagai akibatnya, ketertinggalan pembangunan pertahanan tersebut tanpa disadari telah berdampak terhadap rendahnya posisi tawar Indonesia dalam lingkup internasional. Bahkan, pada lingkup Asia Tenggara sekalipun, kekuatan pertahanan Indonesia sudah jauh tertinggal oleh negara-negara lain yang dahulu kemampuannya berada di bawah Indonesia.



Dalam rangka itu, membangun TNI yang profesional bukan saja kebutuhan TNI semata, tetapi juga menjadi kebutuhan seluruh bangsa Indonesia dalam mengangkat posisi tawar Indonesia dalam menghadapi ketatnya persaingan di era globalisasi. Pembangunan kekuatan pertahanan dalam beberapa tahun akan datang masih berorientasi pada penggantian Alutsista TNI yang umumnya sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan. Untuk meregenerasi Alutsista TNI yang sudah ketinggalan teknologi tersebut dibutuhkan waktu paling sedikit 20 tahun.

Usaha pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI serta menjamin keselamatan bangsa dari setiap ancaman akan sangat berat dilakukan tanpa didukung oleh Alutsista yang modern. Oleh karena itu, tantangan dalam membangun kemampuan pertahanan negara adalah meningkatkan jumlah dan kondisi Alutsista TNI untuk mencapai kekuatan melampaui kekuatan pertahanan minimal sesuai dengan kemajuan teknologi.

Di sisi lain, penyelenggaraan pertahanan Indonesia yang menganut Sistem Pertahanan Semesta hingga kini belum dapat diwujudkan. Dari tiga komponen pertahanan yang membentuk Sistem Pertahanan Semesta, baru Komponen Utama yang jelas keberadaannya, yakni TNI. Dua komponen pertahanan yang lain, yakni Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung, belum dapat diwujudkan sebagai suatu kekuatan pertahanan yang nyata. Dengan menyadari hal tersebut, sasaran pembangunan pertahanan dalam beberapa tahun akan datang adalah membentuk Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung sebagai langkah dalam merealisasikan hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara.

Sejalan dengan pembentukan Komponen Cadangan dan Komponen



Pendukung, keberadaan industri pertahanan nasional yang menopang kemandirian Indonesia di bidang pertahanan merupakan kebutuhan strategis yang kontekstual. Pengembangan industri pertahanan nasional pada dasarnya tidak saja untuk kepentingan pertahanan secara eksklusif, tetapi juga salah satu menjadi instrumen pembangunan ekonomi nasional yang andal. Pengembangan industri pertahanan bukanlah suatu konsep yang baru yang dimulai dari titik nol. Indonesia telah memiliki sejumlah industri pertahanan yang memiliki kemampuan untuk memproduksi sejumlah alat peralatan dan kebutuhan pertahanan, tetapi belum menjadi industri pertahanan yang kuat, yang memiliki daya saing dalam memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas. Kebutuhan akan industri pertahanan nasional semakin urgen mengingat kebutuhan untuk memodernkan Alutsista sangat rentan terhadap isu-isu politik yang berdampak terhadap pemberlakuan embargo oleh suatu negara produsen peralatan militer.

### **Arah Pembangunan Jangka Panjang Bidang Pertahanan Negara.**

Pembangunan pertahanan mencakup Sistem dan strategi pertahanan, kapabilitas dan struktur pertahanan, Profesionalisme TNI, serta pengembangan Teknologi pertahanan dalam mendukung ketersediaan Alutsista, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung. Pembangunan tersebut diarahkan untuk mewujudkan kemampuan pertahanan yang melampaui kekuatan pertahanan minimal.

Ukuran kemampuan yang menjadi arah pembangunan jangka panjang adalah kemampuan pertahanan yang dapat menjamin kedaulatan negara, keselamatan bangsa, serta keutuhan wilayah NKRI yang meliputi wilayah darat yang tersebar dan beragam, termasuk pulau-pulau kecil



terdepan, wilayah yurisdiksi laut hingga meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan landas kontinen serta ruang udara nasional. Dalam masa damai, arah pembangunan pertahanan adalah mewujudkan kemampuan pertahanan yang memiliki efek penangkalan yang disegani di tingkat regional serta mendukung posisi tawar Indonesia dalam ajang diplomasi.

Dalam kerangka yang utuh, sistem dan strategi pertahanan negara secara terus-menerus disempurnakan untuk mewujudkan Sistem Pertahanan yang bersifat Semesta untuk mencapai kemampuan mengatasi ancaman dan memiliki efek penangkalan. Dalam sistem tersebut, pertahanan nasional akan dirancang agar mempunyai kemampuan menangkal ancaman sejak di bagian terluar wilayah Indonesia dan kemampuan untuk mempertahankan teritori Indonesia baik laut, udara, dan daratan, serta kemampuan untuk mengawasi dan melindungi segenap sumber daya yang berada di wilayah Indonesia.

Kapabilitas dan struktur pertahanan negara diarahkan untuk dapat menjawab berbagai kemungkinan ancaman, tantangan, dan permasalahan aktual di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan kemampuan jangka panjang disesuaikan dengan kondisi geografis dan dinamika masyarakat serta perkembangan teknologi.

Kapabilitas dan struktur matra darat diarahkan untuk memberikan efek penangkalan yang tinggi di bidang kekuatan pertahanan darat, serta mampu mengatasi setiap ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dengan kondisi medan dan topografi Indonesia yang beragam. Dalam menghadapi dan mengatasi ancaman nyata, kekuatan matra darat mampu melakukan pergerakan cepat antar wilayah dan antar pulau dalam kerangka operasi Tri-Matra



Terpadu, serta mampu melaksanakan perang berlarut tanpa mengenal menyerah sebelum kemenangan diraih.

Kapabilitas dan struktur matra laut diarahkan untuk memberikan efek penangkalan yang tinggi di bidang kekuatan pertahanan laut dengan kemampuan yang melingkupi dan mengatasi luasnya wilayah laut Nusantara, baik di permukaan maupun di bawah permukaan. Dalam menghadapi ancaman nyata, kapabilitas dan struktur matra laut mampu menghadapi dan mengatasi ancaman nyata serta memberikan dukungan dan kompatibilitas terhadap pergerakan matra darat dan udara dalam kerangka operasi Tri-Matra Terpadu.

Kapabilitas dan struktur matra udara diarahkan untuk memberikan efek penangkalan yang tinggi di bidang kekuatan pertahanan udara dengan kemampuan manuver dan jelajah yang tinggi. Dalam menghadapi ancaman nyata, kapabilitas, dan struktur matra udara mampu mengawasi ruang udara nasional dan keseluruhan teritori Indonesia, mampu melampaui kebutuhan minimal penjagaan ruang udara nasional, memulai pemanfaatan ruang angkasa, mampu melaksanakan operasi dan memberikan dukungan dalam kerangka Tri-Matra Terpadu.

Kapabilitas dan struktur yang dikembangkan ke depan bercirikan peningkatan profesionalisme TNI. Profesionalisme TNI diwujudkan dalam komitmen untuk melepaskan diri dari kegiatan politik praktis, keterlibatan dalam kegiatan bisnis serta memusatkan diri pada tugas-tugas pertahanan dalam bentuk Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam konteks ini fokus pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan Alutsista menjadi agenda mendesak.

Sebagai Komponen Utama pertahanan negara, sumber daya manusia TNI disiapkan dengan memenuhi kecukupan jumlah personel





setiap matra yang diwujudkan dalam kondisi terdidik dan terlatih dengan baik. Indikator TNI yang terdidik dan terlatih dengan baik adalah memiliki penguasaan lapangan yang tinggi, memiliki penguasaan operasional dan perawatan peralatan perang modern, penguasaan terhadap doktrin dan didukung organisasi TNI yang solid namun fleksibel dalam menghadapi perubahan. Di bidang manajemen, mewujudkan sistem dan metode yang efektif dilaksanakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi secara maksimal, serta penggunaan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Dalam bidang kepemimpinan, mampu melahirkan sosok pimpinan yang cakap, berwibawa, dan kompeten.

Peningkatan profesionalisme TNI tersebut tidak dipisahkan dari imbangannya peningkatan kesejahteraan melalui kecukupan gaji, penyediaan fasilitas rumah tinggal, jaminan kesehatan, peningkatan pendidikan, dan penyiapan skema asuransi masa tugas. Perbaikan kesejahteraan prajurit TNI menjadi kewajiban pemerintah agar tidak menghalangi upaya untuk mewujudkan TNI yang profesional.

Peningkatan kondisi dan jumlah Alutsista setiap matra dilaksanakan menurut validasi Kapabilitas dan Struktur Pertahanan Negara untuk dapat melampaui kebutuhan kekuatan pertahanan minimal. Pemenuhan kebutuhan Alutsista dipenuhi secara bertahap yang diproyeksikan dapat dicapai dalam 20 tahun sejalan dengan kemampuan keuangan negara atas dasar perkembangan teknologi, prinsip kemandirian, kemudahan interoperabilitas dan perawatan, serta aliansi strategis.

Pengembangan Alutsista diarahkan dengan strategi akuisisi alat teknologi tinggi dengan efek penangkalan dan pemenuhan kebutuhan dasar operasional secara efektif dan efisien dengan mendayagunakan dan mengembangkan potensi dalam negeri, termasuk industri pertahanan nasional dalam prinsip keberlanjutan.



Pembentukan dan pematapan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung pertahanan negara diarahkan untuk terwujudnya pertahanan nirmiliter yang berkesadaran bela negara yang tinggi dan diselenggarakan dalam kerangka perwujudan Sistem Pertahanan Semesta. Pembentukan Komponen Cadangan lebih berorientasi pada aspek kewilayahan yang setiap daerah memiliki kekuatan cadangan yang nyata dan dikembangkan secara bertahap dan berlanjut sampai mencapai kekuatan yang proporsional.

Perwujudan Komponen Pendukung dilaksanakan sejalan dengan pembentukan Komponen Cadangan dan diarahkan untuk terselenggaranya dukungan pertahanan melalui penguasaan kemampuan pemanfaatan kondisi sumber daya alam dan buatan, sinkronisasi pembangunan sarana dan prasarana nasional terhadap kepentingan pertahanan, partisipasi masyarakat madani dalam penyusunan kebijakan pertahanan negara, serta mantapnya kesadaran masyarakat dalam hal bela negara. Aspek yang bernilai vital dalam bidang pertahanan adalah membangun kondisi mutualisme industri nasional bagi berkembangnya industri strategis pertahanan negara yang secara nyata mengakselerasi perwujudan kemandirian sarana pertahanan Indonesia.

Perlindungan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, wilayah laut dan udara Indonesia ditingkatkan dalam upaya melindungi sumber daya laut sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam konteks tersebut upaya perlindungan dimaksud dilakukan dengan meningkatkan kekuatan dan kemampuan pertahanan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum internasional maupun hukum nasional serta meningkatkan kemampuan penangkalan, deteksi, dan pencegahan dini.



## **BAGIAN KEDUA**

### **REFORMASI PERTAHANAN NEGARA**

Reformasi pertahanan negara adalah kebutuhan strategis bangsa Indonesia untuk mewujudkan pertahanan negara yang efektif dalam mengawal NKRI dengan segala kepentingannya. Reformasi pertahanan negara yang telah berlangsung lebih dari satu dekade merefleksikan komitmen pemerintah dan bangsa Indonesia dalam merespons tantangan dan tuntutan perubahan, baik dari tataran global dan regional maupun domestik. Fungsi pertahanan yang diselenggarakan dalam format negara demokrasi yang berdasarkan kaidah hukum serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas diyakini sudah berada dalam koridor yang tepat dan telah mendapat dukungan positif dari semua pihak. Dukungan tersebut telah membangun suatu kondisi kondusif yang memungkinkan segenap agenda dan substansi reformasi dapat terlaksana dan dengan hasil-hasil yang cukup positif.

Penataan peran dan fungsi TNI sebagai alat negara untuk melaksanakan tugas-tugas negara dalam bentuk OMP dan OMSP, telah dapat diregulasikan melalui perangkat perundang-undangan yang disusun oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam bingkai negara demokrasi. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah mendorong berlangsungnya perubahan signifikan dalam penyelenggaraan fungsi pertahanan negara. Dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah dan DPR akan bekerja sama untuk menyelesaikan peraturan perundang-undangan



yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sampai dengan tahun 2009, telah diagendakan dalam program legislasi nasional penyusunan sejumlah rancangan undang-undang dan peraturan pemerintah yang terkait dengan bidang pertahanan negara, di antaranya RUU Perbantuan TNI, RUU Pengerahan dan Penggunaan Kekuatan TNI, RUU Hukum Disiplin Prajurit TNI, dan RUU tentang Komponen Cadangan.

Kemajuan yang dicapai tidak saja menyangkut profesionalisme TNI yang semakin meningkat, tetapi juga pada tataran politis dan strategis dengan semakin efektifnya pelaksanaan fungsi kebijakan yang diselenggarakan pemerintah. Kemajuan berarti juga dicapai dalam penyelenggaraan fungsi *check and balance* oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta ruang publik yang semakin terbuka bagi terselenggaranya kontrol masyarakat dalam ikut mengantarkan penyelenggaraan pertahanan negara yang berorientasi pada misi, transparan, dan akuntabel.

### *TNI yang Profesional*

Membangun TNI yang profesional merupakan komitmen pemerintah yang ditempatkan ke dalam sasaran utama reformasi pertahanan. Sebagaimana dinyatakan dalam *Buku Putih Pertahanan Tahun 2003*, TNI yang profesional adalah TNI yang tidak berpolitik, yang berada di bawah kekuasaan pemerintah, yang dipilih oleh rakyat berdasarkan cara-cara demokratis dan konstitusional, TNI yang terdidik dan terlatih dengan baik, TNI yang terlengkapi kebutuhannya dengan baik, serta prajurit TNI yang dicukupi kesejahteraan dan pendapatannya



secara layak. TNI yang profesional juga diikuti oleh loyalitas untuk mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, dan tunduk pada hukum. Sejak dikumandangkannya reformasi pertahanan dan reformasi internal TNI, TNI telah menuntaskan seluruh agenda untuk tidak lagi berpolitik praktis. TNI juga dengan tekad dan kemauan yang bulat telah berada di bawah kekuasaan pemerintah yang dipilih oleh rakyat berdasarkan cara-cara demokratis dan konstitusional dan tunduk pada kebijakan politik negara. Artinya adalah bahwa agenda reformasi yang menjadi kewajiban TNI telah dapat diwujudkan.

Komitmen TNI dalam mereformasi dirinya diwujudkan antara lain melalui kegiatan untuk merevisi Doktrin, Strategi, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya. Sampai dengan saat ini, Mabes TNI telah menerbitkan *Doktrin Tri Dharma Eka Karma* (Tridek) yang menggantikan *Doktrin Catur Dharma Eka Karma* (Cadek) yang tidak sesuai lagi. Pada tingkat Angkatan, juga telah melakukan perubahan terhadap doktrinnya masing-masing. TNI AD telah menerbitkan *Doktrin Kartika Eka Paksi*, TNI AL menerbitkan *Doktrin Eka Sasana Jaya*, dan TNI AU menerbitkan *Doktrin Swa Bhuana Paksa*.

Dalam usaha untuk mewujudkan TNI yang profesional, di samping keberhasilan yang sudah dicapai, juga terdapat sejumlah agenda yang belum dapat diwujudkan. TNI telah dapat memosisikan diri sebagai alat negara yang tunduk pada keputusan politik pemerintah serta menjalankan tugas-tugas negara yang diembankan kepadanya. Kebijakan untuk menjadikan TNI yang profesional dalam arti tidak berpolitik praktis telah dapat dituntaskan, bahkan realisasinya lebih cepat dari yang direncanakan. Apabila di masa lalu TNI banyak terlibat



dalam urusan-urusan pemerintahan, kini TNI tidak lagi melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik praktis atau mencampuri urusan lain di luar fungsi dan kewenangannya.

Reformasi pertahanan juga mencatat keberhasilan dengan melepaskan TNI dari aktivitas bisnis yang bukan fungsi utamanya. Sejak tahun 2005, pemerintah telah melakukan langkah konkret untuk mengambil alih unit-unit usaha yang dimiliki atau dikelola oleh TNI. Kegiatan pengambilalihan unit usaha tersebut dilaksanakan oleh Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI yang diketuai oleh Sekretaris Kementerian BUMN dengan keanggotaan yang bersifat multidepartemental, yang terdiri atas Kementerian Negara BUMN, Departemen Keuangan, Depkumham, Dephan, dan TNI. Tim tersebut telah bertugas dan menyelesaikan beberapa tahap, antara lain inventarisasi dan verifikasi terhadap semua bisnis yang dimiliki dan dikelola TNI. Tim tersebut telah pula melakukan sosialisasi kepada Komisi I DPR RI dan di jajaran TNI. Tahap verifikasi juga telah dilaksanakan ke seluruh daerah yang hasilnya akan ditindaklanjuti untuk menentukan rencana akhir ke depan dalam menuntaskan seluruh peralihan bisnis TNI. Berkat sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh TNI selama ini, semua tahapan kegiatan Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI dapat terlaksana bahkan lebih cepat dari rencana, seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.

Reformasi di bidang peradilan militer dilaksanakan dengan menata sistem peradilan militer disesuaikan dengan semangat reformasi nasional. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2004, Panglima TNI telah melaksanakan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung yang dikukuhkan dengan



Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/5/VIII/2004 tanggal 31 Agustus 2004. Acara serah-terima tersebut dilaksanakan oleh Panglima TNI dan Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 1 September 2004, bertempat di Gedung Mahkamah Agung di Jakarta.

Pemerintah dan DPR juga sedang memproses rancangan undang-undang (RUU) untuk mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Presiden telah menunjuk Menteri Pertahanan serta Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU dengan DPR. Posisi TNI terhadap proses RUU tersebut adalah tidak mencampuri dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPR selaku pihak yang mengemban kewenangan legislasi untuk mengambil keputusan terbaik.

Langkah-langkah untuk mewujudkan TNI yang profesional terdidik dengan baik dan terlatih dengan baik terus ditingkatkan, baik melalui wadah pendidikan di jajaran TNI maupun dalam tugas sehari-hari. Penyempurnaan sistem pendidikan di seluruh jenjang pendidikan di lingkungan TNI menampakkan hasil yang semakin baik, meskipun masih dirasakan kekurangannya, terutama dalam bidang keterampilan prajurit. Kekurangan dalam bidang keterampilan terjadi karena ketersediaan Alutsista terbaru, baik di lembaga pendidikan maupun di satuan-satuan TNI, masih sangat minim, bahkan banyak Alutsista yang sudah ketinggalan teknologi tetapi belum ada penggantinya.

Upaya dalam mewujudkan TNI yang profesional juga sering terkendala oleh kesejahteraan prajurit TNI yang masih berada jauh di bawah standar kelayakan untuk seorang prajurit. Profesionalisme prajurit tidak dapat dipisahkan dari aspek kesejahteraan yang layak. Prajurit yang tidak dicukupi kesejahteraannya tidak mungkin akan menjadi



profesional. Penghasilan prajurit yang dialokasikan oleh negara melalui gaji dan tunjangan sampai saat ini masih sangat rendah. Selain gaji yang tidak mencukupi, perumahan masih sangat terbatas, serta layanan kesehatan yang belum memadai.

Peningkatan kesejahteraan prajurit sangat mempengaruhi keberhasilan tugas TNI. Kita bersyukur bahwa dengan kesejahteraan yang terbatas, prajurit TNI masih tetap terjaga kedisiplinan dan kepatuhannya. Namun, kondisi seperti ini tidak mungkin dibiarkan terus berlangsung tanpa ada langkah mendasar yang dilakukan pemerintah.

### *Peran Pihak Lain di Luar Bidang Pertahanan dalam Reformasi Pertahanan*

Reformasi pertahanan tidak bersifat eksklusif yang bergantung hanya pada lingkup institusional pertahanan. Keberhasilan reformasi pertahanan juga sangat ditentukan oleh komponen bangsa di luar bidang pertahanan. Komponen bangsa tersebut terdiri atas kelompok eksekutif, legislatif, yudikatif, ilmuwan, dan masyarakat. Di samping itu, suksesnya reformasi pertahanan juga bergantung pada perkuatan lembaga baik institusi sipil maupun partai politik. Reformasi militer yang efektif membutuhkan kapasitas institusional yang kuat dari partai politik dan institusi sipil yang memiliki pemahaman secara baik tentang bidang pertahanan. Pemahaman tersebut akan mewarnai keputusan-keputusan serta mekanisme *check and balance* dalam membangun kekuatan pertahanan yang profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada kenyataannya, agenda reformasi dalam mewujudkan TNI yang profesional juga terkendala oleh faktor-





faktor di luar TNI. Sejauh ini reformasi TNI banyak disoroti dari sisi TNI, sementara sisi di luar TNI cenderung terabaikan. Pelaksanaan reformasi TNI tidak hanya bergantung pada TNI, tetapi unsur-unsur di luar TNI tidak kalah vitalnya untuk ikut direformasi.

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis memerlukan institusi sosial dan ekonomi yang kuat yang dapat memfasilitasi penguatan organisasi sipil dan partai politik. Masalah umum dalam pemerintahan demokratis harus segera diatasi dengan serius, terutama pada saat angka kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat. Tanpa adanya kepemimpinan politik sipil yang berkualitas serta pembangunan partai yang jelas, bersatu, dan konsisten, stabilitas nasional akan selalu relatif dan fluktuatif. Tanpa adanya institusi sipil yang kuat, reformasi militer juga akan mengalami kesulitan untuk mencapai keberhasilan. Konsekuensi dari penguatan institusi sipil dan partai politik juga menuntut adanya kebutuhan untuk meninjau ulang dan memperbaiki semua peraturan yang dibutuhkan bagi pengelola keamanan nasional sebagai suatu sistem yang dikelola dalam manajemen nasional tempat pertahanan negara berada di dalamnya.

Reformasi pertahanan juga telah dapat menyelesaikan dokumen-dokumen strategis yang baru, seperti Doktrin pertahanan negara, Strategi pertahanan negara dan Rencana Pembangunan Kapabilitas Pertahanan Negara. Dokumen-dokumen strategis tersebut menekankan penyelenggaraan pertahanan negara Indonesia dalam konteks sistem pertahanan semesta yang memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh. Ditetapkannya Doktrin Pertahanan Negara merupakan langkah maju yang dicapai dalam mengisi kekosongan doktrin yang terjadi sebagai



akibat dari Doktrin Pertahanan dan Keamanan Negara Tahun 1991 yang sudah tidak sesuai lagi. Demikian pula halnya dengan penetapan Strategi Pertahanan Negara yang baru; dapat memberikan arah yang jelas bagi para penyelenggara pertahanan negara dalam membangun pertahanan negara ke depan.

Sebagai bagian dari reformasi pertahanan, Departemen Pertahanan juga telah menyelesaikan penyusunan Postur Pertahanan Negara untuk 20 tahun ke depan. Dengan Postur Pertahanan Negara tersebut, pembangunan kapabilitas pertahanan akan lebih terarah dengan tahapan-tahapan prioritas lima tahunan sampai tahun 2029. Melalui keberadaan Postur Pertahanan Negara tersebut, perencanaan jangka panjang Indonesia akan lebih mudah dirancang. Postur Pertahanan Negara tersebut sekaligus memberikan pijakan untuk kegiatan perencanaan pertahanan, anggaran, manajemen, operasi, dan pengembangan teknologi pertahanan. Dalam bidang pembangunan kekuatan, Postur Pertahanan Negara akan memberikan tuntunan bagi pelaksanaan kegiatan perencanaan pengadaan, terutama dalam memilih sistem senjata yang diperlukan, serta perwujudan Komponen Cadangan untuk mencapai tingkat kekuatan yang dibutuhkan.

Pertahanan nirmiliter juga menjadi bagian dari postur pertahanan negara Indonesia yang dikembangkan ke depan. Pertahanan negara di masa lalu lebih berorientasi kepada kekuatan pertahanan militer ke depan sistem pertahanan negara akan menyinergikan secara proporsional fungsi pertahanan militer dengan fungsi pertahanan nirmiliter. Pertahanan negara yang hanya berorientasi pada pertahanan militer tidak akan menjadi solusi terbaik dalam menghadapi tantangan bangsa yang semakin kompleks. Pertahanan negara harus dapat



didudukkan dalam konteks sebagai bentuk pelayanan publik yang penting, yang juga mencakupi keamanan ketersediaan pasokan energi dan jaminan beroperasinya sistem distribusinya secara baik, pelabuhan yang aman, bandara yang aman dan efisien, pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta jaminan keamanan sosial. Dari konteks tersebut, jelas bahwa dimensi pertahanan negara tidak saja bersifat fisik yang berorientasi pada fungsi pertahanan militer yang mengandalkan kekuatan senjata, tetapi semua aspek kehidupan memiliki dimensi pertahanan negara yang dapat disinergikan.



## **BAGIAN KETIGA**

### **PEMBANGUNAN KAPABILITAS PERTAHANAN NEGARA**

#### **Kerangka Pokok Kapabilitas Pertahanan Negara**

Kapabilitas pertahanan negara yang dikembangkan untuk mewujudkan Sistem Pertahanan yang bersifat semesta mengintegrasikan kapabilitas pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Kapabilitas pertahanan negara disusun berdasarkan Strategi Pertahanan Negara yang merefleksikan kemampuan, kekuatan, dan gelar kekuatan pertahanan dan sumber daya nasional. Dalam rangka melaksanakan Strategi Pertahanan Negara, kapabilitas pertahanan negara dikembangkan untuk mencapai standar penangkalan, yakni kapabilitas pertahanan negara yang mampu menangkal dan mengatasi ancaman agresi terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Dalam lingkup tersebut, kapabilitas pertahanan negara dikembangkan untuk menghadapi kondisi terburuk berupa perang. Jika kapabilitas pertahanan negara dibangun dengan standar konvensional untuk mampu mempertahankan diri dari agresi, niscaya tugas-tugas pertahanan lainnya akan mampu diemban.

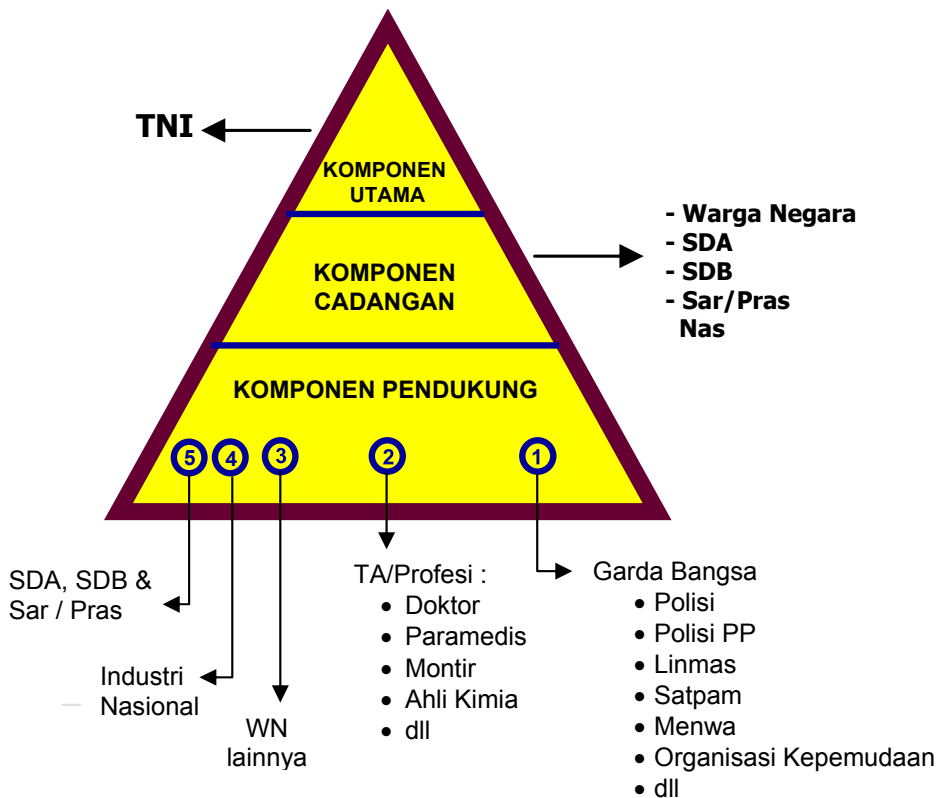
#### **Pengorganisasian Kekuatan Pertahanan**

Kekuatan pertahanan negara Indonesia memadukan kekuatan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Pertahanan militer diorganisasikan ke dalam Komponen Utama, yakni TNI, yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pengorganisasian



pertahanan nirmiliter dibedakan atas dasar hakikat dan jenis ancaman yang dihadapi. Dalam menghadapi ancaman militer, pertahanan nirmiliter diorganisasikan ke dalam Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang dipersiapkan untuk menjadi penganda Komponen Utama.

**GAMBAR 2 KOMPONEN PERTAHANAN NEGARA**



Dalam menghadapi ancaman nirmiliter, pengorganisasian pertahanan nirmiliter disusun ke dalam pertahanan sipil untuk mencegah dan menghadapi ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Dalam kerangka menghadapi ancaman yang



berdimensi keselamatan umum, bentuk pertahanan sipil dilaksanakan melalui fungsi-fungsi keamanan, antara lain penanggulangan dampak bencana alam dan bencana yang ditimbulkan manusia, operasi kemanusiaan, SAR, wabah penyakit dan kelaparan, gangguan pada pembangkit tenaga listrik, transportasi, dan aksi pemogokan. Struktur pengorganisasian pertahanan sipil dalam kerangka pertahanan nirmiliter berbeda dengan struktur sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer. Pada pertahanan sipil sebagai bentuk pertahanan nirmiliter bersifat fungsional dan berada dalam lingkup kewenangan instansi pemerintah di luar bidang pertahanan (Gambar 3).

### GAMBAR 3





## Strategi Perancangan Kapabilitas Pertahanan Negara

Perancangan Kapabilitas Pertahanan Negara didasarkan atas enam faktor utama:

**Pertama**, perkiraan ancaman terhadap Indonesia dan segala kepentingannya, yakni ancaman yang menjadi domain fungsi pertahanan, termasuk tugas-tugas pelibatan pertahanan yang sah.

**Kedua**, Strategi Pertahanan Negara yang menyinergikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan negara yang utuh dan menyeluruh.

**Ketiga**, tingkat penangkalan yang memenuhi standar penangkalan agar dapat menangkal ancaman yang diperkirakan.

**Keempat**, tingkat probabilitas kerawanan tertinggi bagi Indonesia yang menjadi sumber-sumber ancaman atau sumber-sumber konflik di masa datang.

**Kelima**, luas wilayah dan karakteristik geografi Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau dengan wilayah perairan yang luas dan terbuka.

**Keenam**, kemampuan rasional negara dalam membiayai pertahanan negara, termasuk dalam pembangunan kapabilitas pertahanan negara dengan tidak mengorbankan sektor-sektor lain.

## Pertahanan Militer

Kapabilitas pertahanan militer yang dibangun di masa akan datang tidak diprioritaskan pada kapabilitas TNI selaku komponen utama pertahanan negara. Sasaran pembangunan kapabilitas TNI diarahkan pada



penataan organisasi dengan modernisasi Alutsista sesuai pembangunan postur TNI dan tidak diarahkan pada penambahan personel. Penataan organisasi diarahkan untuk dapat mewujudkan strategi militer yang bersifat Tri-Matra Terpadu. Pembentukan organisasi baru atau pengembangan organisasi tidak otomatis berimplikasi terhadap penambahan personel untuk memperbesar kekuatan tetapi lebih dititikberatkan pada efektivitas dan pemanfaatan teknologi.

Jumlah kekuatan personel TNI yang ada pada saat ini akan dipertahankan dan relatif tidak dilakukan penambahan. Pengisian personel untuk unit organisasi bentuk baru atau yang bersifat pengembangan dilaksanakan melalui efisiensi dari kekuatan yang ada. Pelaksanaannya diintegrasikan dengan penataan Markas Besar (termasuk Departemen Pertahanan), Balakpus (Badan Pelaksana Pusat), dan Mako (Markas Komando) di tingkat Kotama (Komando Utama). Penataan organisasi pada tingkat tersebut diarahkan untuk merampingkan organisasi sehingga menjadi efektif dan berbasis kinerja melalui perubahan sistem padat manusia menjadi padat teknologi serta diawaki oleh personel yang berkualitas tinggi.

Organisasi pada tingkatan tersebut tidak mengikuti model piramida personel TNI dengan pangkat rendah atau pegawai negeri sipil dengan golongan rendah dan dengan latar belakang pendidikan SMA ke bawah sangat sedikit dibutuhkan. Pengisian organisasi pada tingkatan tersebut adalah yang berkualifikasi pendidikan tinggi setingkat Pascasarjana yang sesuai dengan bidang atau fungsi yang diembannya. Untuk itu, pola rekrutmen prajurit/pegawai harus benar-benar selektif, disesuaikan dengan persyaratan sejalan dengan tugas dan fungsinya.

Pada tingkatan operasional, yakni kesatuan-kesatuan setingkat





Brigade dan jajarannya, penataan organisasi menggunakan model piramida.

### Arah Pembangunan Matra Darat

Luasnya wilayah tanggung jawab TNI Angkatan Darat belum diimbangi dengan gelar kekuatan yang ada, sehingga organisasi TNI Angkatan Darat yang ada saat ini relatif belum menjawab kebutuhan. Gelar kekuatan masih terpusat di



Pulau Jawa, yang menyebabkan ketimpangan kekuatan di wilayah di luar Pulau Jawa. Alutsista untuk pertahanan matra darat sebagian besar sudah sangat tua, sementara proses regenerasinya berjalan sangat lambat. Revolusi di bidang pertahanan banyak mengubah doktrin matra darat dan Indonesia tertinggal cukup jauh di bidang ini.

Pembangunan pertahanan matra darat dalam waktu-waktu akan datang diprioritaskan untuk memperkecil ketimpangan pertahanan di daerah-daerah di luar Pulau Jawa, baik secara organisasi maupun Alutsistanya. Berdasarkan perkembangan kemajuan teknologi di bidang pertahanan yang berpengaruh terhadap perubahan doktrin matra darat, pembangunan kapabilitas ke depan diarahkan pada pembangunan unit-unit matra darat yang dengan cepat dapat digerakkan ke sasaran. Kemampuan pertahanan matra darat pada saat ini masih mengandalkan kemampuan jelajah secara individual dan belum beralih kepada kemampuan jelajah yang berbasis mekanis, seperti yang sudah lama



diterapkan di negara-negara lain. Kekurangan ini akan diatasi secara bertahap dengan mewujudkan kemampuan pertahanan matra darat untuk mengatasi dan menjelajahi daerah hutan gunung, rawa, sungai, dan pantai. Dalam rangka itu, kemampuan pertahanan matra darat akan dikembangkan ke dalam tiga kategori, yakni kemampuan lintas udara, mobilitas udara, mobilitas mekanis dan raiders.

### *Kekuatan TNI AD*

Kekuatan Kopassus yang ada saat ini tetap dipertahankan. Perubahan organisasi Kopassus dapat dilakukan dengan menitikberatkan pada validasi organisasi berdasarkan evaluasi terhadap organisasi yang ada. Validasi yang berakibat terhadap penghapusan atau penambahan organisasi ditujukan pada peningkatan efektivitas dan keandalan Kopassus serta ciri pasukan khusus. Kekuatan Kostrad akan dikembangkan melalui pembentukan Divisi Infanteri baru. Struktur Kesatuan Infanteri Kostrad akan disusun ke dalam Yonif (Batalyon Infanteri) Linud, Yonif Raiders, Yonif Mobud, dan Yonif Mekanis. Satuan-satuan Kostrad dikembangkan untuk dapat digelar di daerah-daerah operasi dengan karakteristik yang ada di Indonesia. Yonif reguler yang ada saat ini akan dikembangkan secara bertahap ke arah Yonif Mekanis guna menyesuaikan perkembangan global bidang militer yang berpengaruh terhadap strategi perang dan strategi militer. Satuan





Kavaleri Kostrad secara bertahap akan diperbarui dengan titik berat pengadaan Kendaraan Tempur yang dilengkapi dengan sistem senjata yang menjamin efektivitas serta daya gerak dan daya tembak.

Satuan Artileri Medan Kostrad secara bertahap diperbarui dengan mengutamakan sistem senjata Armed generasi baru untuk menggantikan sistem senjata generasi lama yang kurang layak pakai dan tidak efektif untuk dipertahankan atau digunakan dalam perang modern. Satuan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) Kostrad secara bertahap diperbarui dengan sistem senjata Arhanud generasi baru untuk menggantikan sistem senjata generasi lama yang kurang layak pakai dan tidak efektif lagi untuk digunakan dalam perang modern. Kemampuan Arhanud Kostrad dikembangkan dalam sistem keterpaduan atau interoperabilitas dengan sistem pertahanan udara nasional maupun matra laut dan matra udara. Yon Zipur secara bertahap divalidasi dari satuan yang padat manusia menjadi padat teknologi.

Pengembangan organisasi TNI AD juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembentukan Komando Kewilayahan Pertahanan yang menggambarkan keterpaduan ketiga matra (Tri-Matra Terpadu). Kekuatan kewilayahan yang sudah ada tetap dipertahankan. Organisasi Komando Daerah Militer (Kodam) akan disesuaikan dengan perkembangan organisasi TNI yang pelaksanaannya dilakukan secara fleksibel. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas, setiap Kodam akan dilengkapi masing-masing dengan 1 (satu) Brigade Infanteri (Brigif) dengan perkuatannya. Satuan-satuan Brigif Kodam dikembangkan sesuai dengan kondisi geografi daerah yang menjadi daerah operasi satuan-satuan tersebut. Yonif Kodam yang ada juga akan dikembangkan secara bertahap menjadi Yonif Mekanis terutama satuan-satuan yang berada di area perkotaan, guna menyesuaikan dengan perkembangan strategi



perang secara global.

Batalyon Zeni Tempur Kodam dan Batalyon Zeni Konstruksi secara bertahap divalidasi dari kondisi satuan yang padat manusia menjadi padat teknologi. Organisasi Kodam dilengkapi dengan unsur Penerbad (Penerbangan Angkatan Darat) untuk mendukung mobilitas. Satuan-satuan Bantuan Administrasi (Banmin) Kodam secara bertahap ditata kembali dengan padat teknologi. Satuan-satuan jajaran Komando Kewilayahan (Kowil) di tingkat provinsi ditingkatkan minimal menjadi Korem. Penambahan Kowil baru atau pengembangan Kowil yang sudah ada dapat diselenggarakan didasarkan pada perkembangan daerah dengan tidak mengakibatkan penambahan jumlah personel baru. Pelaksanaannya sedapat mungkin ditempuh melalui pergeseran personel yang ada pada wilayah Kodam yang bersangkutan.

### *Kekuatan Dukungan*

Kekuatan dukungan terdiri atas Komando Pendidikan dan Latihan (Kodiklat), Badan Pelaksana Pusat (Balakpus), serta Pusat Kecabangan Fungsi (Puscabfung). Rancang bangun kekuatan dukungan diarahkan sebagai berikut.

*Pertama, perampingan* organisasi dari padat manusia menjadi padat teknologi. Jumlah personel yang mengisi kesatuan-kesatuan tersebut tidak perlu besar, tetapi lebih mengutamakan kualitas.

*Kedua,* Lembaga Pendidikan direvitalisasi untuk menjadi pusat keunggulan sehingga benar-benar dapat melaksanakan fungsinya sebagai dapur yang mencetak sumber daya manusia pertahanan yang berkualitas. Revitalisasi ditujukan pada tenaga pendidik, kurikulum,



sarana, dan prasarana pendidikan yang memadai. Kesejahteraan dan karier tenaga pendidik yang ditugasi di lembaga pendidikan diperbaiki secara bertahap sampai pada tingkatan yang layak.

*Ketiga*, Satuan Penerbad dikembangkan untuk mencapai kekuatan yang mampu melayani Kodam-Kodam dengan kekuatan 1 Skuadron Komposit di tiap Kodam. Kekuatan Satuan Penerbad berintikan pada keunggulan heli terdiri atas Heli Serbu, Angkut, Heli Intai/Komando, dan Heli Latih serta kemampuan pesawat sayap tetap sesuai dengan kebutuhan.

### *Pengembangan Alutsista*

Pengembangan materiil /Alutsista TNI AD secara bertahap diarahkan pada pembaharuan dengan Alutsista generasi baru, menggantikan Alutsista generasi lama yang tidak efektif untuk membangun daya tangkal. Materiil/Alutsista berupa senjata Infanteri, senjata Artileri, senjata Kavaleri, amunisi, kendaraan tempur (Ranpur), pesawat udara, alat angkut air, dan Materiil Zeni (Matzi) secara bertahap ditambah untuk memenuhi kebutuhan Tabel Organisasi dan Peralatan/Daftar Susunan Personel dan Peralatan (TOP/DSPP). Pengadaan senjata-senjata strategis pertahanan darat termasuk kendaraan tempur diarahkan pada memperbaiki Satuan Kavaleri (Satkav), Yonif Mekanis, serta Sat Armed yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai kekuatan minimum.





### *Pangkalan*

Pangkalan berupa kantor, asrama, dan perumahan (khususnya satuan-satuan tempur) secara bertahap akan dilengkapi untuk dapat menjamin kesiapsiagaan.

### Arah Pembangunan Matra Laut



Perairan yurisdiksi Indonesia yang sangat luas membutuhkan pengamanan guna menjamin kepentingan nasional. Namun, kondisi faktual pertahanan matra laut banyak yang sudah melampaui batas ambang operasional, mobilitasnya sangat rendah

sehingga mengalami kesulitan untuk menjelajahi perairan yurisdiksi Indonesia. Biaya pemeliharaan untuk Alutsista tersebut sangat besar dan menyedot anggaran pertahanan dalam jumlah yang cukup besar sehingga memerlukan upaya penggantian Alutsista baru dalam jumlah dan jenis yang cukup signifikan.

Alutsista matra laut banyak yang berada pada kondisi kritis atau ambang batas pemakaian sudah melebihi. Dengan keterbatasan anggaran pertahanan yang dialokasikan pemerintah, pembangunan kapabilitas pertahanan matra laut diprioritaskan untuk memodernisasi Alutsista dengan skema penambahan beberapa kapal selam dan penggantian Alutsista yang berada dalam kondisi kritis.



### *Kekuatan TNI AL*

Kapal Republik Indonesia (KRI) merupakan kekuatan vital terdepan pertahanan Indonesia untuk mengawal wilayah maritim NKRI dengan segala kepentingannya. Prioritas diarahkan untuk pengadaan Kapal Patroli cepat hingga mencapai keseimbangan kekuatan di tiap wilayah. Pengadaan kapal selam secara bertahap mewujudkan kekuatan pokok minimum, khususnya dalam mengamankan jalur-jalur pelintasan (ALKI). Kekuatan KRI untuk memenuhi standar kekuatan pokok minimum adalah 274 kapal yang terdiri dari berbagai jenis. KRI disusun dalam tiga kelompok kekuatan, yakni kekuatan Tempur Pemukul, Kekuatan Tempur Patroli, dan Kekuatan Dukungan.

Kekuatan Tempur Pemukul diproyeksikan untuk mencapai kekuatan pokok minimum dengan susunan Kapal Perusak Kawal, Kapal Perusak Kawal Rudal, Kapal Selam, Kapal Cepat Rudal, Kapal Cepat Torpedo, dan Kapal Buru Ranjau. Kekuatan Tempur Patroli diproyeksikan untuk mewujudkan kemampuan satuan-satuan operasional TNI AL dalam menyelenggarakan patroli dan pengamanan wilayah perairan Nusantara dengan Kapal Patroli dari berbagai jenis.

Kekuatan Tempur Pendukung secara bertahap akan ditingkatkan kemampuannya agar mampu menyelenggarakan fungsinya yang terdiri atas Kapal Markas, Kapal Angkut Tank, Kapal Penyapu Ranjau, Kapal Angkut Serba Guna, Kapal Tanker, Kapal Tunda Samudra, Kapal Hidro Oseanografi, Kapal Bantuan Umum, Kapal Angkut Personel, dan Kapal Latih.

Pesawat Udara (Pesud) merupakan salah satu unsur kekuatan laut yang vital untuk penyelenggaraan fungsi pengendalian laut, penegakan



hukum di laut, serta dukungan proteksi bagi kekuatan darat. Wilayah perairan Nusantara yang luasnya mencapai lebih dari 6 juta kilometer persegi membutuhkan 137 unit Pesud dari jenis sayap tetap dan sayap putar untuk memenuhi standar kekuatan minimum. Pesud dengan kekuatan 137 unit tersebut diproyeksikan mampu melaksanakan patroli maritim dalam rangka fungsi pengendalian laut dan penegakan hukum di laut, serta sebagai sarana angkut terbatas dan untuk kebutuhan latihan.

Kekuatan Marinir merupakan salah satu andalan kekuatan laut Indonesia dalam penyelenggaraan operasi amfibi dan anti-amfibi, serta tugas-tugas operasi lainnya. Kekuatan Marinir diproyeksikan untuk mampu digelar di wilayah-wilayah yang strategis, dan secara bertahap kekuatan Marinir, terutama Alutsistanya, diperbarui dengan generasi baru untuk mengganti aset lama yang sudah tidak efektif lagi.

### *Pangkalan dan Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan)*

Berdasarkan fungsinya, terdapat empat kategori pangkalan, yakni Pangkalan Utama (Lantamal), Pangkalan Angkatan Laut (Lanal), Stasiun Angkatan Laut (Sional), dan Detasemen Angkatan Laut (Denal). Pengembangan pangkalan dan Fasharkan disesuaikan dengan pengembangan organisasi TNI AL. Khusus tentang pengembangan Fasharkan dilaksanakan secara bertahap dari padat manusia menjadi padat teknologi.

### Arah Pembangunan Matra Udara

Wilayah udara nasional Indonesia yang sangat luas merupakan tantangan bagi kekuatan pertahanan matra udara untuk





mengamankannya. Hal itu disebabkan oleh kondisi Alutsista yang sebagian besar sudah melampaui dan akan berakhir masa pakainya. Alutsista pertahanan matra udara memiliki kekhasan yang sangat terikat dengan ketentuan kelaikan operasional yang ditentukan pabrik pembuatnya sehingga tidak mungkin menunda-nunda penggantian atas Alutsista berkategori demikian.

Alutsista pertahanan matra udara yang akan berakhir masa pakainya adalah pesawat tempur F-5E/F Tiger II yang akan berakhir pada tahun 2010, Hawk Mk.53 pada 2011, OV-10 Bronco sebagian besar sudah *grounded*, C-130B Hercules pada 2008, F-27 pada 2008, heli Bell-47G Soloy pada 2008, heli Sikorsky S-58T pada 2009, pesawat latih, pesawat angkut, dan heli VVIP pada 2008.



Di samping Alutsista yang usianya kritis, seperti diuraikan di atas, pertahanan matra udara tidak mungkin mengandalkan kemampuan pesawat tempur semata, tetapi juga harus didukung oleh alat penginderaan jarak jauh. Satuan radar untuk pertahanan udara belum dapat tercukupkan sampai dengan saat ini sehingga pengamatan terhadap ruang udara belum maksimal.

Bersamaan dengan usaha-usaha untuk penggantian terhadap Alutsista yang telah habis masa pakainya, juga diarahkan untuk mengisi kekosongan sistem pengamatan udara jarak jauh bagi unsur-unsur satuan radar pertahanan udara.



### *Kekuatan TNI AU*

Kekuatan TNI AU dikembangkan dengan membangun kekuatan udara yang berdaya tangkal yang mampu memberikankan perlindungan bagi matra darat dan laut. Dalam bidang organisasi, kekuatan operasional TNI AU dengan dua Koopsau (Komando Operasi Angkatan Udara) belum menjadi kekuatan yang secara minimum dapat mengamankan wilayah udara NKRI. Dalam rangka memenuhi kekuatan minimum, sasaran pembangunan kekuatan TNI AU diarahkan pada pengembangan organisasi Koopsau yang lebih rasional, termasuk secara bertahap memperbarui pesawat-pesawat dan Alutsistanya yang kebanyakan sudah jauh ketinggalan. Dalam hal ini, pesawat-pesawat tempur yang telah habis masa pakainya diprioritaskan penggantiannya. Dalam bidang kemampuan, meningkatkan satuan buru sergap, satuan angkut, satuan radar, dan satuan latih menjadi perhatian untuk ditingkatkan. Satuan buru sergap dibangun untuk mencapai sembilan Skadron Tempur yang terdiri dari pesawat-pesawat tempur yang berdaya sergap tinggi, yang didukung dengan satuan pendukung yang andal.

Kekuatan Satuan Angkut TNI AU menjadi tumpuan dalam penyelenggaraan operasi militer yang bersifat Tri-Matra. Kondisi satuan angkut TNI AU sangat jauh dari tuntutan kebutuhan, terutama karena aset yang ada sudah sangat tua. Pembangunan Satuan Angkut dilaksanakan dengan memaksimalkan pengadaan pesawat dan peralatan pendukungnya dari produksi dalam negeri.

Skadron Heli dan Skadron Latih dikembangkan untuk mencapai kekuatan di atas kekuatan minimum. Pembangunan Skadron Heli ditujukan untuk mengganti pesawat yang telah habis usia pakainya, dan secara bertahap sampai mencapai 4 Skadron. Pengembangan Skadron



Latih diarahkan untuk dilengkapi dengan sistem simulasi, agar frekuensi penggunaan pesawat canggih dalam latihan dapat ditekan serendah mungkin. Fungsi skuadron Latih harus mampu menjamin kesiapan tempur personel TNI AU secara maksimal.



Satuan radar yang meliputi radar titik, terminal, dan wilayah ditingkatkan jarak capainya sehingga seluruh wilayah Indonesia berada dalam cakupan efektif sistem radar yang digelar. Penambahan satuan radar baru diarahkan untuk digelar wilayah yang belum ada satuan radarnya serta wilayah-wilayah yang mempunyai nilai strategis. Satuan radar dikembangkan melalui interkoneksi dengan sistem satelit sehingga terwujud integrasi antara radar, pesawat, pengintaian, kapal, dan sistem roket yang dimiliki setiap angkatan.

Pangkalan secara bertahap ditingkatkan guna mendukung operasional TNI AU dengan memproyeksikan pada Lanud (Pangkalan Udara) Induk. Pengembangan kemampuan Kohanudnas (Komando Pertahanan Udara Nasional) dilaksanakan secara bertahap menjadi empat Kosek (komando sektor) dengan memaksimalkan satuan-satuan radar yang berkemampuan tinggi serta satuan rudal dan satuan meriam. Pengembangan kemampuan penangkis serangan udara (PSU) dilaksanakan dalam rangka mewujudkan strategi penangkalan yang mampu memberikan perlindungan secara maksimal terhadap wilayah Indonesia dari serangan udara lawan.



Kekuatan Pasukan Khas TNI AU (Paskhasau) tetap dipertahankan jumlahnya sebagai bagian dari Strategi Penangkalan. Pengorganisasian Paskhasau dalam tiga Wing Paskhas untuk menjalankan fungsi sebagai Skwadron Paskhas, Flight Berdiri Sendiri, fungsi pendidikan, anti teror serta fungsi kawal protokol. Detasemen Bravo akan terus ditingkatkan kemampuannya, bersama-sama dengan satuan antiteror matra lain yang menjadi andalan dalam menanggulangi ancaman terorisme.



Kemampuan Komando Pemeliharaan Materil TNI AU (Koharmatau) bertumpu pada Depo-Depo Pemeliharaan, yang selanjutnya akan dikembangkan secara bertahap untuk beralih dari pola padat manusia ke pola padat teknologi. Fungsi Pendidikan yang diemban oleh Lembaga Pendidikan TNI AU, direvitalisasi sehingga menjadi pusat keunggulan serta melaksanakan fungsinya sebagai dapur untuk mencetak sumber daya manusia pertahanan yang berkualitas. Sasaran revitalisasi ditujukan untuk kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta kesejahteraan dan karier tenaga pendidik yang ditugaskan di lembaga pendidikan.

### Tri-Matra Terpadu

Konsep pengembangan pertahanan ke depan diarahkan untuk terwujudnya keterpaduan dari seluruh matra TNI (Tri-Matra Terpadu). Konsep Tri-Matra Terpadu dilaksanakan dalam konteks Operasi Gabungan yang menyinergikan kemampuan dan doktrin masing-masing matra TNI



untuk memberikan hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan. Dalam hal ini, Departemen Pertahanan dan Mabes TNI akan bekerja sama untuk menyusun konsep Tri-Matra Terpadu untuk diaplikasikan dalam berbagai bidang yang menyentuh organisasi, pendidikan dan latihan, sistem logistik, komando, kendali, komunikasi, intelijen, pengamatan, dan pengintaian.

### **Pertahanan Nirmiliter**

Kekuatan pertahanan nirmiliter diwujudkan dalam Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang dirancang untuk menghadapi ancaman militer. Untuk pertahanan nirmiliter dalam konteks pertahanan sipil dikembangkan oleh masing-masing departemen/lembaga di luar pertahanan sesuai dengan fungsi masing-masing.

#### *Komponen Cadangan*

Kekuatan Komponen Cadangan terdiri atas warga negara yang telah dilatih, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana, serta wilayah negara yang telah dipersiapkan untuk menjadi pengganda Komponen Utama melalui mobilisasi. Sebagai pengganda, besar kekuatan Komponen Cadangan disesuaikan dengan kebutuhan setiap matra.

Pembentukan Komponen Cadangan diselenggarakan dengan memperhatikan hak-hak sipil serta kewajiban warga negara dalam pembelaan negara dan pertahanan negara sebagaimana diatur dengan undang-undang. Proses rekrutmen warga negara untuk menjadi Komponen Cadangan dilakukan secara selektif dengan mengutamakan



faktor keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memperkuat Komponen Utama.

Dengan mengingat Komponen Cadangan setelah dimobilisasi akan menjadi kombatan, selain keahlian dan keterampilan yang dimiliki, syarat-syarat yang dituntut untuk menjadi kombatan harus dipenuhi dalam proses perekrutan warga negara, antara lain persyaratan kesehatan dan kesamaptaan jasmani. Komponen Cadangan sebelum dimobilisasi menjadi rakyat terlatih dengan status tetap sebagai rakyat sipil biasa yang diperlakukan sama dengan rakyat lainnya.

Warga negara yang direkrut untuk menjadi Komponen Cadangan pengganda matra darat disesuaikan dengan fungsi dan tugas matra darat. Dalam rangka itu diprioritaskan pada bidang keahlian dan keterampilan, seperti dokter, para medis, ahli kimia, montir/ahli kendaraan, ahli elektronika, dan ahli konstruksi.

Kebutuhan untuk pengganda matra laut, warga negara yang direkrut untuk menjadi Komponen Cadangan disesuaikan dengan fungsi dan tugas matra laut. Dalam rangka itu, rekrutmen diprioritaskan pada warga negara yang memiliki keahlian dan keterampilan, seperti ahli navigasi/nakhoda, masinis kapal, ahli elektronika, dokter, paramedis, ahli kimia, dan ahli konstruksi. Unsur-unsur keahlian tersebut direkrut beserta peralatan penunjang profesinya masing-masing yang dapat dimobilisasi. Embrio Komponen Cadangan untuk matra laut di antaranya dari unsur-unsur jajaran Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut).

Warga negara yang direkrut untuk menjadi Komponen Cadangan pengganda matra udara disesuaikan dengan fungsi dan tugas matra udara. Rekrutmen diprioritaskan pada warga negara yang memiliki keahlian dan keterampilan, seperti pilot, ahli mesin pesawat udara, ahli



elektronika, dokter dan paramedis, ahli kimia, montir/ahli kendaraan, dan ahli konstruksi. Rekrutmen juga termasuk alat peralatan yang terkait dengan profesinya masing-masing yang dapat dimobilisasi.

Komponen Cadangan bersifat lokal atau kedaerahan yang dibentuk, ditempatkan dan dibina berdasarkan daerah domisili yang bersangkutan. Sifat lokal Komponen Cadangan tersebut didasarkan pada pertimbangan efisiensi serta hak-hak perorangan dari warga negara yang terikat dengan profesi dan pekerjaannya masing-masing, serta masa bhakti Komponen Cadangan yang terbatas. Besarnya kekuatan Komponen Cadangan sampai dengan 20 tahun akan datang diproyeksikan untuk mencapai 160.000 personel yang dialokasikan untuk cadangan TNI AD cadangan TNI AL dan Cadangan TNI AU.

Selain unsur manusia, kekuatan Komponen Cadangan mencakup pula sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana. Unsur-unsur Komponen Cadangan tersebut adalah milik negara, badan swasta, atau perorangan, termasuk para awaknya. Jumlah dan jenis unsur yang direkrut sebagai Komponen Cadangan didasarkan atas kebutuhan komponen pengganda. Rekrutmen Komponen Cadangan harus memenuhi persyaratan serta uji kelayakan sebagai peralatan dan alat utama sistem senjata.

Di bidang sumber daya alam, target sampai 2029 adalah transformasi sumber daya alam dan sumber daya buatan untuk memenuhi logistik pertahanan, terutama terwujudnya logistik wilayah





di setiap daerah, sedangkan untuk sarana/prasarana, target sampai 2029 adalah terbinaanya sarana/prasarana nirmiliter yang bernilai taktis dan strategis bagi pertahanan untuk setiap saat dapat dimobilisasi sebagai pengganda kekuatan Komponen Utama. Sarana dan prasarana dimaksud, antara lain kapal laut dan pesawat komersial, gedung untuk gudang logistik, rumah sakit, bengkel otomotif, galangan kapal, hanggar pesawat, telekomunikasi, dan industri.

Pengorganisasian Komponen Cadangan sampai dengan tahun 2029 diarahkan kepada terwujudnya satu Batalyon Cadangan di tiap Kabupaten/Kota. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dimulai dari pembentukan satu Kompi Cadangan di tiap Kodim pada Tahap I, kemudian dua Kompi pada Tahap II, dan 1 Batalyon pada Tahap III. Pengisian struktur Komando di tiap Batalyon Cadangan dipegang oleh personel Kowil.

### *Komponen Pendukung*

Kekuatan Komponen Pendukung berupa warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana, serta wilayah negara yang telah dipersiapkan untuk didayagunakan menjadi pendukung Komponen Utama dan Komponen Cadangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan pertimbangan status sebagai pendukung Komponen Utama dan Komponen Cadangan seluruh sumber daya nasional dapat menjadi Komponen Pendukung.

Pembentukan Komponen Pendukung didasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara dan kepentingan pertahanan yang diselenggarakan dengan memperhatikan hak-hak sipil serta hak-hak kepemilikan masyarakat. Proses rekrutmen warga negara





untuk menjadi Komponen Pendukung dilakukan secara sukarela dengan memperhatikan faktor keahlian dan keterampilan yang dimiliki untuk mendukung Komponen Utama dan Komponen Cadangan.



Warga negara yang menjadi Komponen Pendukung disusun dalam tiga kategori: rakyat terlatih, tenaga ahli dan tenaga profesi, serta warga negara lainnya. Rakyat terlatih terdiri atas unsur-unsur Kepolisian, termasuk di antaranya Brimob, Menwa,

Satpam, Hansip, tenaga Sarnas, Pramuka, sedangkan Tenaga Ahli dan Profesi termasuk di antaranya, dokter, para medis, montir, ahli kimia, wartawan, dosen, guru, ustad, pendeta, pastor, peneliti, dan laboran.

Selain warga negara, kekuatan Komponen Pendukung juga mencakup industri nasional serta sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana. Dalam rangka pertahanan negara, kekuatan industri nasional selain merupakan faktor ekonomi untuk kepentingan kesejahteraan juga memiliki peran vital dalam mendorong industri pertahanan. Produk-produk industri nasional baik secara langsung maupun tidak langsung dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan.

Sarana dan prasarana nasional bernilai vital sebagai Komponen Pendukung sehingga memerlukan penataan sejak dini, di antaranya sarana radar sipil, jalan, pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, pabrik, hanggar pesawat, galangan kapal, dan stasiun pengisian bahan bakar. Sarana dan



prasarana tersebut dalam perancangannya perlu diintegrasikan dengan kepentingan pertahanan sehingga pada waktu dibutuhkan dapat dengan mudah dialihfungsikan menjadi sarana dan prasarana pertahanan.

Target pembentukan Komponen Pendukung sampai dengan 20 tahun yang akan datang adalah berikut.

*Pertama*, terkoordinasinya Pembangunan Nasional di bidang sumber daya manusia dalam mewujudkan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam pembelaan negara.

*Kedua*, terkoordinasinya Pembangunan Nasional di bidang pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara seimbang untuk kesejahteraan dan pertahanan.

*Ketiga*, terkoordinasinya Pembangunan Nasional di bidang industri nasional dan teknologi untuk mewujudkan kemandirian sarana pertahanan.

### **Standar Kesejahteraan Prajurit**

Pembangunan kekuatan pertahanan diarahkan pada aspek kemampuan, yakni TNI yang profesional. Untuk menjadi TNI yang profesional, syarat utama dilatih dan diberi perlengkapan dengan baik serta dicukupi kebutuhannya. Prajurit yang bergaji rendah tidak akan pernah profesional. Prajurit yang tidak profesional bukan saja gagal dalam pencapaian tujuan melainkan lebih dari itu akan menjadi sumber malapetaka.

Prajurit TNI, seperti halnya prajurit-prajurit yang lain, adalah kelompok masyarakat yang hak-hak sipilnya dikurangi secara sah untuk kepentingan negara. Namun, bila kesejahteraannya belum layak, itu



akan berakibat terhadap terhambatnya profesionalisme prajurit. Oleh karena itu, secara bertahap akan dilakukan langkah-langkah konkret untuk menetapkan standar kesejahteraan prajurit yang layak dengan memperbaiki sistem penggajian, layanan kesehatan, perumahan, dan jaminan hari tua.



## **BAGIAN KEEMPAT**

### **KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN**

#### **Umum**

Dalam rangka membangun kerja sama di bidang pertahanan dengan negara lain, ada tiga substansi yang menjadi sasaran sekaligus tahapan yang dikembangkan: membangun saling percaya, mencegah konflik, dan bersama-sama mencari solusi terbaik apabila terdapat atau terjadi perselisihan sehingga tidak berkembang menjadi konflik. Dalam rangka itu, ke depan, diplomasi pertahanan semakin penting untuk dikembangkan. Indonesia dalam membangun kerja sama di bidang pertahanan mengedepankan bentuk-bentuk kerja sama yang bersifat jangka panjang dengan negara-negara sesama anggota ASEAN dan para mitra lainnya, seperti ASEAN Plus Tiga, ASEAN Plus Enam dan yang tergabung dalam ARF.

Indonesia dalam membangun kerja sama di bidang pertahanan dengan negara lain dilaksanakan secara kenyal sesuai dengan prinsip pertahanan yang dianut, yakni defensif aktif. Namun, di dalam pelaksanaannya kerja sama di bidang pertahanan harus melalui suatu perjanjian kerja sama untuk memayungi setiap bentuk kegiatan operasional, seperti pembicaraan antarmiliter, latihan bersama antarangkatan bersenjata, atau antarangkatan kedua negara.

#### **Kerja Sama di Bidang Pertahanan di Kawasan Asia Tenggara**

Dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama, yakni menyangkut stabilitas dan keamanan Kawasan Asia Tenggara, Indonesia



bersama-sama dengan semua negara anggota ASEAN memberdayakan wadah kolektif, seperti Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (*ADMM*), untuk membicarakan berbagai isu keamanan kawasan serta isu-isu keamanan global yang berdampak terhadap kawasan. Indonesia mendorong pemberdayaan forum-forum *ADMM* sebagai wadah pejabat tinggi yang memberikan efek penanganan isu-isu keamanan di Kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga memperjuangkan kepentingan kawasan dalam forum-forum antarbangsa yang lebih luas.

Implementasi dari kesungguhan Indonesia dalam mendorong pemberdayaan kebersamaan komunitas pertahanan ASEAN melalui *ADMM Retreat Pertama* di Bali pada bulan Maret 2007 mendapat respons positif dari Menteri Pertahanan ASEAN dan memperkuat kesepakatan sebelumnya, yakni salah satu agenda tahunan para Menteri Pertahanan ASEAN. Meskipun *ADMM Retreat* bukan merupakan forum formal untuk membuat suatu komunikasi bersama, dari pertemuan di Bali tersebut, para Menteri Pertahanan ASEAN sepakat untuk meningkatkan kerja sama pertahanan dalam dua level: bilateral dan dalam kerangka ASEAN.

Pada lingkup bilateral, kerja sama di bidang pertahanan diwujudkan dalam peningkatan kerja sama antarangkatan bersenjata serta pertukaran siswa dan perwira muda. Selain itu, negara anggota ASEAN berkewajiban meningkatkan kerja sama di bidang penanggulangan dampak bencana alam, kerja sama keamanan maritim, tugas pemeliharaan perdamaian, memerangi terorisme, dan penanganan isu-isu keamanan bersama lainnya. Indonesia dalam pertemuan tersebut mendorong agar perwujudan masyarakat keamanan ASEAN, seperti yang telah disepakati di *Bali Concorde-II* pada Oktober 2003, harus diletakkan pada konsep keamanan yang komprehensif yang mencakupi ekonomi, sosial, lingkungan, dan



aspek-aspek lainnya. Pilar ASC mendorong lebih mengedepankan perwujudan komitmen untuk membangun kerja sama pertahanan yang lebih konkret/nyata dan praktis yang menyentuh permasalahan yang benar-benar dihadapi.

### **Pengamanan Selat Malaka**

Sebagaimana dinyatakan dalam *Buku Putih Pertahanan 2003*, pentingnya kerja sama antarnegara di kawasan dan di luar Kawasan Asia Tenggara dalam memerangi ancaman keamanan lintas negara di Selat Malaka telah dapat diwujudkan melalui kerja sama negara-negara pantai. Dalam rangka itu, kegiatan patroli bersama yang dilaksanakan oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura (*Malsindo Coordinated Patrol*) dan didukung oleh penginderaan dengan sandi *Eye on the Sky* telah dapat menekan tingkat ancaman keamanan lintas negara sampai dengan level paling rendah. Keberhasilan yang dicapai oleh tiga negara tersebut merupakan hasil keseriusan yang ditopang oleh kemampuan dalam menangani isu-isu keamanan bersama. Sejauh ini ada beberapa negara yang telah menyampaikan keinginannya untuk mengambil bagian dalam kegiatan pengamanan di Selat Malaka. Indonesia menyambut baik keinginan tersebut sebagai bentuk kepedulian yang patut dihargai. Indonesia memandang bahwa pelaksanaan pengamanan oleh negara-negara pantai di wilayah perairan Selat Malaka masih efektif untuk dilanjutkan. Namun, keterlibatan secara langsung dari kekuatan lain di luar kekuatan negara-negara pantai yang ada belum diperlukan. Dalam pandangan Indonesia, partisipasi negara-negara lain tersebut dapat disalurkan ke dalam wujud pembangunan kemampuan untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan kegiatan dalam penanganan keamanan di Selat Malaka.



Dalam lingkup bilateral, penanganan keamanan perbatasan menjadi salah satu kepentingan nasional Indonesia dalam bidang pertahanan, terutama dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Kerja sama pertahanan tersebut mencakup antara lain kegiatan dalam rangka penegasan batas wilayah negara, penanganan pelintas batas, penanganan permasalahan sosial ekonomi masyarakat perbatasan, dan penanganan ancaman keamanan lintas negara di wilayah perbatasan.

### *Kerja sama di Bidang Pertahanan dengan Thailand.*

Hubungan dan kerja sama di bidang pertahanan dengan Thailand telah berlangsung lama dan terjalin dalam suasana yang harmonis dan konstruktif. Selama ini hubungan dan kerja sama kegiatan di bidang pertahanan kedua negara berada pada level yang cukup baik. Kedua negara telah mengembangkan kerja sama kegiatan di bidang pertahanan yang saling membangun dalam berbagai bentuk, seperti latihan bersama, pendidikan, pertukaran informasi, dan pertukaran kunjungan di tingkat pejabat tinggi pertahanan dan Angkatan Bersenjata. Khusus dalam penanganan isu terorisme internasional, dan ancaman keamanan lintas negara, kerja sama pertahanan dengan Thailand di masa-masa akan datang penting untuk dikembangkan dan diwujudkan dalam bentuk yang lebih teknis antarmiliter dan antarangkatan.

### *Kerja Sama di Bidang Pertahanan dengan Malaysia*

Kerja sama di bidang pertahanan dengan Malaysia telah berlangsung cukup lama sejak ditandatanganinya perjanjian keamanan (*security arrangement*) pada tahun 1972. Kerja sama pertahanan kedua



negara banyak dipengaruhi oleh faktor nonpertahanan yang mengemuka serta permasalahan perbatasan yang belum selesai. Dalam pengaturan di bidang keamanan di wilayah perbatasan kedua negara, persetujuan yang ditandatangani kedua negara pada tanggal 3 Desember 1982 sudah ditanggihkan karena tidak sesuai lagi. Kegiatan pengamanan perbatasan diselenggarakan kedua negara dalam wadah Komite Perbatasan yang membahas isu-isu perbatasan. Model-model kegiatan yang sudah ada, di antaranya, adalah kegiatan kerja sama di bidang intelijen dan operasi dalam wadah Komite Perbatasan Malaysia-Indonesia (GBC Malindo).

### *Kerja sama di Bidang Pertahanan dengan Singapura*

Hubungan kerja sama pertahanan Indonesia-Singapura telah lama dirintis melalui kunjungan para pejabat serta pertukaran siswa, pendidikan, dan latihan bersama antarangkatan bersenjata. Pada tingkat kebijakan, kerja sama kegiatan di bidang pertahanan dengan Singapura difasilitasi melalui Departemen Pertahanan RI-Mindef Singapore Policy Talks. Kerja sama antara TNI dan Singapore Armed Forces dilaksanakan dalam bentuk latihan bersama (Latma) antar angkatan, yakni Latma Safkar-Indopura antara TNI Angkatan Darat dengan Angkatan Darat Singapura, Latma antar-Angkatan Laut dan Angkatan Udara kedua negara dengan sandi Sea Eagle-Indopura dan Elang-Indopura.

### *Kerja sama di Bidang Pertahanan dengan Filipina*

Filipina dan Indonesia telah menandatangani Persetujuan tentang Kegiatan Bersama di Bidang Pertahanan dan Keamanan pada tanggal 27 Agustus 1997. Persetujuan tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia





menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007. Sebelumnya, pada tahun 1993, telah ditandatangani Nota kesepahaman mengenai pembentukan Komisi Bersama Indonesia-Filipina, dengan menghasilkan berbagai kesepakatan kerja sama pertahanan, termasuk di bidang pendidikan. Dalam aspek perbatasan, kerja sama kedua negara telah berlangsung cukup efektif melalui kegiatan, seperti patroli perbatasan, komunikasi, pengaturan lintas batas, dan intelijen dalam wadah Komite Perbatasan Bersama Indonesia-Philipina (JBC). Kedua negara telah menjalin kerja sama penanganan ancaman keamanan lintas negara, terutama penanganan terorisme.

### *Kerja sama di Bidang Pertahanan dengan Brunei*

Perjanjian kerja sama pertahanan yang ditandatangani Menteri Pertahanan Indonesia dan Menteri Pertahanan Brunei pada tanggal 10 April 2003 di Jakarta tentang kerja sama pertahanan. Walaupun belum diratifikasi oleh DPR, namun sejumlah kegiatan kerja sama pertahanan ke dua negara pada setiap tahun berada pada level yang cukup signifikan, antara lain melalui kunjungan antar-pimpinan Departemen Pertahanan dan Angkatan Bersenjata, serta Latihan Bersama TNI Angkatan Bersenjata Brunei.

### *Kerja Sama di Bidang Pertahanan dengan Anggota ASEAN Lainnya*

Seperti dikemukakan dalam *Buku Putih Pertahanan 2003*, selain negara-negara yang disebutkan di atas, kerja sama di bidang pertahanan dengan negara-negara anggota ASEAN yang lain tetap penting. Melalui Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM) dilakukan pertukaran



pandangan terhadap isu-isu pertahanan dan keamanan di kawasan dan global.

### **Kerja Sama di Bidang Pertahanan di Luar ASEAN**

#### *Kerja Sama di Bidang Pertahanan dengan Amerika Serikat*

Kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat meningkat cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, baik di bidang pendidikan dan latihan bersama antarangkatan bersenjata, terutama Angkatan Laut kedua negara, maupun dalam bidang pengadaan Alutsista. Kedua negara telah membentuk forum dialog dalam wadah Dialog Keamanan Indonesia-Amerika (IUSSD) yang dilaksanakan setiap tahun dan hingga kini memberikan kontribusi penting dalam membangun kerja sama pertahanan. Forum dialog tersebut memiliki nilai yang sangat strategis tidak saja bagi kedua negara, tetapi dalam lingkup yang lebih luas bermanfaat dalam menghadapi isu-isu keamanan global dan regional.

Salah satu hasil dari IUSSD adalah pembentukan forum bilateral antarangkatan bersenjata, yakni Dialog Pertahanan Bilateral Amerika-Indonesia (USIBDD). USIBDD merupakan forum kerja sama pertahanan pada tingkat yang lebih teknis menyangkut bidang intelijen, operasi, logistik, dan komunikasi. Dalam konteks memerangi terorisme, kerja sama di bidang pertahanan dikembangkan secara konkret melalui wadah peningkatan kemampuan dan pertukaran informasi intelijen.

Dalam konteks pembangunan kapabilitas dan peningkatan profesionalisme TNI, kedua negara melakukan kerja sama yang cukup



erat baik, antara lain melalui kerja sama pendidikan dalam wadah Pendidikan dan Latihan Militer Internasional (IMET), *Foreign Military Sales* (FMS) maupun latihan antarangkatan kedua negara. Kerja sama di bidang pertahanan dan militer tersebut penting artinya bagi pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia yang kuat dan profesional tidak saja untuk kepentingan Indonesia, tetapi juga untuk kepentingan keamanan kawasan.

### *Kerja Sama di Bidang Pertahanan dengan Australia*

Hubungan kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Australia lebih banyak dipengaruhi oleh pasang-surutnya hubungan politik kedua negara. Saat ini kedua negara telah mempunyai wadah strategis berupa Forum Dialog Pertahanan Strategis Indonesia-Australia (IADSD) yang memfasilitasi dialog dalam bidang pertahanan. Forum dialog tersebut telah menunjukkan kinerjanya sebagai wadah yang cukup produktif serta efektif dalam mengkomunikasikan kepentingan pertahanan dan merancang kerja sama kegiatan di bidang pertahanan kedua negara.

Kedua negara telah menandatangani Persetujuan Kerangka Kerja sama di Bidang Keamanan pada tanggal 13 November 2006 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Persetujuan yang telah diratifikasi parlemen kedua negara mewadahi sembilan bidang kerja sama, antara lain bidang kerja sama pertahanan, kontra terorisme, dan keamanan maritim. Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kerja sama pertahanan di antara kedua negara ini.



### *Kerja Sama di Bidang Pertahanan dengan Cina.*

Kerja sama kegiatan di bidang pertahanan Indonesia-Cina diselenggarakan dalam konteks kepentingan nasional Indonesia untuk membangun kemampuan pertahanan serta penanganan isu-isu keamanan bersama kedua negara. Pada 25 April 2005, Presiden RI dan Presiden Cina menandatangani *RI-PRC Joint Statement on Strategic Partnership* yang di antaranya mencakupi kerja sama di bidang pertahanan. Sebagai realisasi dari kemitraan strategis di bidang pertahanan, pada Juli 2006 di Jakarta dilangsungkan *RI-PRC Bilateral Defense Dialogue*, yang membahas berbagai isu keamanan kawasan. Kerja sama pertahanan tersebut akan menjadi wadah untuk mengkomunikasikan kepentingan nasional kedua negara, terutama dalam menyamakan pandangan tentang isu-isu keamanan global dan regional, serta bersama-sama mendorong penyelesaian konflik di kawasan Asia Pasifik. Perkembangan terakhir pada tanggal 7 November 2007 di Beijing telah ditanda tangani persetujuan tentang kerjasama di bidang Aktivitas oleh kedua Menteri Pertahanan.

### *Kerja Sama di Bidang Pertahanan dengan India*

Kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan India diwadahi dalam persetujuan yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2001, yang berisi kegiatan-kegiatan kerja sama di bidang pertahanan. Persetujuan tersebut oleh Indonesia telah diratifikasi pada tanggal 29 Desember 2007 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006. Dalam beberapa tahun terakhir, kerja sama keamanan Indonesia-India mengalami kemajuan dibandingkan era sebelumnya, antara lain melalui dialog pertahanan, patroli terkoordinasi di Laut Andaman, kerja sama di bidang pendidikan dan latihan, pertukaran kunjungan pejabat



pertahanan/militer, dan pengembangan industri pertahanan. Kerja sama tersebut akan terus ditingkatkan dan dikembangkan di tahun-tahun yang akan datang.

### *Kerja Sama di Bidang Pertahanan dengan Korea Selatan*

Korea Selatan telah menjadi salah satu mitra Indonesia dalam pembangunan kapabilitas pertahanan dan peningkatan profesionalitas prajurit TNI. Dalam kaitan tersebut Indonesia dan Korea Selatan telah menyepakati kerja sama kegiatan di bidang pertahanan, antara lain melalui nota kesepahaman dan perjanjian di bidang logistik, kerja sama industri serta barang dan jasa untuk kepentingan pertahanan. Indonesia dan Korea Selatan juga telah lama mengembangkan kerja sama pendidikan, antara lain pertukaran perwira untuk mengikuti pendidikan pengembangan. Dalam beberapa tahun terakhir, pertukaran kunjungan pejabat tinggi pertahanan dan militer kedua negara berlangsung cukup baik; ini mengindikasikan bahwa hubungan pertahanan kedua negara semakin penting.

### *Kerja Sama di Bidang Pertahanan dengan Jepang*

Kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang untuk meningkatkan dialog dan konsultasi bilateral tidak hanya pada bidang kerja sama ekonomi, tetapi juga politik merupakan modalitas dalam membangun hubungan kerja sama kegiatan di bidang pertahanan kedua negara. Kerja sama pertahanan kedua negara yang telah terjalin selama ini, antara lain, adalah kerja sama intelijen, pelatihan teknis, serta pendidikan dan latihan.



### *Kerja sama di Bidang Pertahanan dengan Rusia.*

Kerja sama pertahanan Indonesia dengan Rusia dilaksanakan sejak 1996 dalam bidang pengadaan Alutsista, logistik, dan bantuan teknis. Pada tanggal 1 Desember 2006, ditandatangani nota kesepahaman tentang asistensi dalam penerapan kerja sama Indonesia-Rusia di bidang teknologi militer dan perlindungan hak cipta. Kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan terus kerja sama yang lebih operasional di waktu yang akan datang.

### *Kerja Sama di Bidang Pertahanan dengan Uni Eropa*

Hubungan kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan negara-negara anggota Uni Eropa meliputi bidang pendidikan dan pelatihan, pembelian peralatan militer, dan alih teknologi. Dalam kaitan tersebut, Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman dan persetujuan dengan negara-negara yang memiliki keunggulan di bidang teknologi pertahanan, di antaranya Jerman, Inggris, Prancis, Belanda, Italia, Spanyol, dan beberapa negara Eropa Timur. Indonesia tetap memelihara hubungan kerja sama bidang pertahanan dengan beberapa negara anggota Uni Eropa dan di waktu-waktu yang akan datang akan lebih diarahkan untuk kepentingan alih teknologi dan industri pertahanan.

### ***Kerja Sama Pertahanan di Bidang Penanganan Bencana Alam***

Fenomena global yang terjadi dewasa ini menunjukkan kecenderungan bahwa negara-negara di Kawasan Asia Tenggara juga menghadapi tantangan berupa bencana alam yang diperkirakan akan terus dialami di waktu-waktu akan datang, seperti tsunami, gempa



bumi tektonik, dan bahaya banjir. Untuk menghadapi tantangan tersebut semakin dibutuhkan keterlibatan unsur militer sebagai kekuatan yang paling siap untuk dikerahkan.

Pengalaman Indonesia dalam penanganan bencana gempa bumi dan tsunami di Nias dan Aceh pada bulan Desember 2004, serta bencana-bencana lainnya, seperti di Yogya, Pangandaran, dan Bengkulu, telah membawa implikasi terhadap model kerja sama militer antarnegara dalam menyelenggarakan operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana alam. Bagi Indonesia, keterlibatan negara-negara baik anggota ASEAN maupun di luar ASEAN melalui pengiriman pasukan ataupun logistik sangat dihargai oleh pemerintah dan bangsa Indonesia.

Sebaliknya, pada saat terjadi bencana alam yang menimpa negara lain, Indonesia juga mengambil peran aktif dengan mengirimkan bantuan, baik berupa pasukan TNI, maupun tenaga relawan dan logistik, seperti yang pernah dilakukan di Iran, Pakistan dan Filipina. Untuk menghadapi tugas-tugas serupa di masa akan datang baik yang bersifat domestik maupun bantuan ke negara lain, kemampuan pasukan TNI dipersiapkan secara khusus, antara lain dalam bentuk pelatihan personel, penyusunan prosedur standar operasional, pengadaan Alutsista dan peralatan khusus lainnya, serta organisasi dan manajemen. Ke depan, kerja sama dengan negara-negara lain dalam konteks ini menjadi salah satu substansi yang dikembangkan Indonesia tidak hanya terbatas di kalangan ASEAN, tetapi juga dalam lingkup lintas kawasan.

Konsekuensi dari pelibatan kekuatan militer dalam bencana alam adalah mengemukakan kebutuhan tentang penerapan Prosedur Operasi Standar yang mengintegrasikan pertahanan militer dan nirmiliter baik dalam skala nasional maupun internasional. Indonesia dalam



melaksanakan tugas kemanusiaan dan penanganan dampak bencana alam menerapkan konsep kemanunggalan TNI-Rakyat sebagai cara yang efektif dalam untuk menyinergikan kemampuan militer dan nirmiliter.

### **Tugas Perdamaian Dunia**

Peran serta Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian (OPP) merupakan amanat UUD 1945 kepada pemerintah dan rakyat Indonesia untuk ikut aktif mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keterlibatan Indonesia dalam membangun stabilitas dan perdamaian dunia diwujudkan melalui pengiriman pasukan perdamaian di bawah bendera PBB ke sejumlah negara di berbagai kawasan yang dilanda konflik.

Sejak keikutsertaan Indonesia pertama kali dalam kontingen PBB, yakni di dalam tugas perdamaian di Mesir tahun 1957 (UNEF 1957), Indonesia terus mengambil bagian dalam memperkuat kontingen PBB untuk tugas-tugas pengawasan perdamaian, gencatan senjata, perlindungan keamanan dan keselamatan, serta bantuan kemanusiaan. Berbagai operasi yang dilaksanakan oleh kontingen Indonesia di antaranya melaksanakan operasi untuk memelihara perdamaian, operasi pencegahan konflik, menciptakan perdamaian, memperkuat perdamaian, membangun perdamaian, evakuasi, dan operasi kemanusiaan atau operasi penanggulangan dampak bencana alam. Sampai dengan saat ini Indonesia telah mengirimkan 43 Kontingen Garuda dengan total kekuatan mencapai 18.381 personel, ke lebih dari 20 negara yang tersebar di tiga benua, yakni Asia, Afrika, dan Eropa. Seperti halnya Kontingen Garuda,





PERAN SERTA PERSONIL TNI DALAM RANGKA PERDAMAIAN DUNIA			
NO	NEGARA	TAHUN	JUMLAH
1.	MESIR	1957. 1979	5.805 PERSONEL
2.	KONGO	1960. 2006	5.113 PERSONEL
3.	VIETNAM	1973. 1975	795 PERSONEL
4.	IRAK-IRAN	1988. 1990	30 PERSONEL
5.	NAMIBIA	1989. 1998	50 PERSONEL
6.	IRAK-KUWAIT	1991. 2002	66 PERSONEL
7.	KAMBOJA	1992. 1993	3.967 PERSONEL
8.	SOMALIA	1992. 1995	12 PERSONEL
9.	BOSNIA HERZEGOVINA	1992. 1997	821 PERSONEL
10.	MOZAMBIK	1994	15 PERSONEL
11.	FHILIPINA	1994. 2002	67 PERSONEL
12.	KROASIA	1995	136 PERSONEL
13.	GEORGIA	1994-2006	66 PERSONEL
14.	SLOVENIA TIMUR	1996. 1997	120 PERSONEL
15.	MACEDONIA	1996. 1998	58 PERSONEL
16.	TAJIKISTAN	1997	8 PERSONEL
17.	PREVLAKA	1998. 2001	6 PERSONEL
18.	SIERRA LEONE	2001. 2004	213 PERSONEL
19.	LIBERIA	2003. 2005	11 PERSONEL
20.	SUDAN	2005. 2006	17 PERSONEL
21.	LEBANON	2006. 2007	1700 PERSONEL

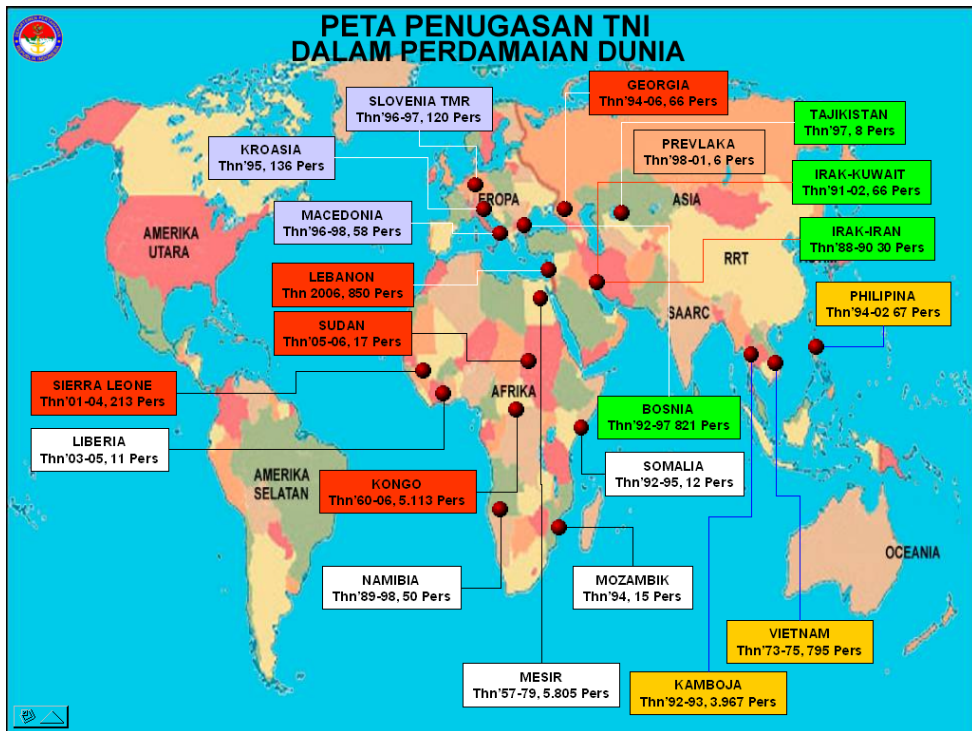
Indonesia juga hingga kini telah mengirimkan sebanyak 47 tim pengamat militer dengan total kekuatan 957 perwira ke berbagai negara.

Pasukan Indonesia yang masih bertugas hingga saat ini berada di Kizi Kongo (MONUC), pengamat militer di Sierra Leone (UNAMSIL), Liberia (UNMIL), Georgia (UNOMIG), dan 1 Yon Mekanis UNIFIL di Lebanon. Pengiriman OPP di bawah bendera PBB menunjukkan komitmen yang kuat bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka cinta



damai. Dari penugasan tersebut, Indonesia mencatat berbagai prestasi yang membanggakan dan mengharumkan nama bangsa Indonesia, sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat internasional serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Partisipasi Indonesia dalam OPP telah mengangkat posisi Indonesia dalam lingkup hubungan antarbangsa, terutama dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia serta pengalaman tugas selama terlibat dalam tugas perdamaian dunia menuntut untuk terus membenahi kemampuan dan mempersiapkan secara prima pasukan TNI yang akan dilibatkan dalam tugas perdamaian dunia.





Sejalan dengan itu, Indonesia telah membentuk Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP TNI) di dalam struktur organisasi Markas Besar TNI yang organisasinya akan diberdayakan dan diperlengkapi sehingga mampu mengemban tugasnya secara maksimal. PMPP TNI bertugas mempersiapkan pasukan TNI yang akan melaksanakan tugas operasi perdamaian.



### **BAGIAN KELIMA**

### **PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN**

Industri pertahanan merupakan salah satu komponen vital dari kemampuan pertahanan. Industri pertahanan yang kuat mempunyai dua efek utama, yakni efek langsung terhadap pembangunan kemampuan pertahanan, dan efek terhadap pembangunan ekonomi dan teknologi nasional. Dalam bidang pembangunan kemampuan pertahanan, industri pertahanan yang kuat menjamin pasokan kebutuhan Alutsista dan sarana pertahanan secara berkelanjutan. Ketersediaan pasokan Alutsista secara berkelanjutan menjadi prasyarat mutlak bagi keleluasaan dan kepastian untuk menyusun rencana pembangunan kemampuan pertahanan dalam jangka panjang, tanpa adanya kekhawatiran akan faktor-faktor politik dan ekonomi, seperti embargo atau restriksi. Industri pertahanan dapat memberikan efek pertumbuhan ekonomi dan industri nasional, yakni ikut menggairahkan pertumbuhan industri nasional yang berskala internasional, penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup signifikan, transfer teknologi yang dapat menggairahkan sektor penelitian, dan pengembangan sekaligus memenuhi kebutuhan sektor pendidikan nasional di bidang sains dan teknologi.

#### ***Menuju Kemandirian Sarana Pertahanan***

Indonesia selama ini memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap luar negeri di bidang teknologi pertahanan sehingga sangat sulit untuk dapat menyusun rencana pembangunan pertahanan jangka panjang yang memiliki kepastian. Ketergantungan terhadap produk luar negeri sangat rentan terhadap faktor politik, seperti restriksi dan embargo.



Permasalahan lain yang muncul dari ketidakmandirian pengadaan sarana pertahanan adalah melemahnya kesiapan dan kemampuan penangkalan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Secara politik, kondisi tersebut akan mengakibatkan Indonesia rentan terhadap tekanan politik negara lain, yang dapat berakibat pada kemungkinan terkena embargo atau pembatasan-pembatasan terhadap peralatan tertentu yang menghambat pembangunan dan pemeliharaan sarana pertahanan.

Kemandirian pengembangan dan pengadaan sarana pertahanan secara mutlak disadari tidak mungkin dilaksanakan. Bahkan, tidak ada negara di dunia yang 100 persen bersandar pada kemampuannya sendiri, selalu ada ketergantungan dari negara lain. Namun, adanya industri pertahanan yang mandiri tetap diakui manfaatnya dalam penyelenggaraan pertahanan yang efektif. Pemberdayaan industri strategis untuk kepentingan pertahanan nasional tidak berarti bahwa Indonesia ambil bagian dalam kegiatan perlombaan persenjataan, tetapi untuk mencapai kemandirian dalam pengadaan sarana pertahanan nasional demi kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara dalam rangka menjaga keutuhan wilayah dan integritas Indonesia.

Pembangunan industri pertahanan nasional merupakan hal yang vital dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana pertahanan yang mampu dioperasionalkan secara maksimal dalam penyelenggaraan pertahanan. Kebutuhan sarana pertahanan yang bergantung dari produksi luar negeri akan menimbulkan permasalahan dan mempengaruhi kemampuan dan kesiapan TNI dalam menjalankan tugas-tugas operasi di masa akan datang.

Untuk menyikapi keadaan ini, sangat diperlukan pemberdayaan industri nasional untuk pengembangan dan penyedia sarana pertahanan



nasional. Namun, perwujudan suatu industri pertahanan yang sesungguhnya tidak dapat dilaksanakan oleh sektor pertahanan secara sepihak, tanpa keterlibatan sektor-sektor yang lain. Pemberdayaan industri nasional untuk pembangunan pertahanan memerlukan kerja sama di antara tiga pilar industri pertahanan, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan serta Perguruan Tinggi, Industri, dan pihak Dephan/TNI, dengan dibentengi oleh kebijakan nasional yang jelas untuk menggunakan produk-produk hasil dari putra-putra terbaik bangsa.

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 merupakan langkah awal pembangunan industri strategis, termasuk industri pertahanan. Keppres tersebut membidani lahirnya PT IPTN (yang saat ini menjadi PT DI), yang



kemudian membidangi industri pertahanan bidang kedirgantaraan, PT PAL yang membidangi industri kemaritiman, PT PINDAD yang membidangi persenjataan dan amunisi, PT DAHANA yang membidangi bahan peledak, dan PT LEN yang membidangi alat-alat elektronika dan komunikasi pertahanan.

Sejauh ini industri strategis tersebut telah menghasilkan berbagai produk Alutsista bagi pembangunan kemampuan pertahanan. PT PINDAD telah memproduksi senjata ringan, senjata berat, amunisi kaliber kecil, amunisi kaliber besar, amunisi khusus, bahkan mampu memproduksi kendaraan tempur. PT PAL telah mampu memproduksi kapal-kapal



jenis korvet, kapal patroli, galangan pendaratan, tanker, serta dok pemeliharaan kapal perang. PT DI telah memproduksi pesawat transpor sayap tetap, helikopter, pesawat patroli maritim, pesawat pengintai, simulator pesawat, serta pemeliharaan dan perbaikan pesawat. PT LEN telah memproduksi sistem kendali peralatan militer, sistem deteksi, radar dan sonar, serta peralatan komunikasi militer. Demikian pula, PT DAHANA telah memproduksi berbagai jenis bahan peledak.

Kiprah industri-industri strategis dimaksud mengalami pasang surut sehingga perlu pembenahan secara komprehensif menyangkut kebijakan, kemampuan sumber daya manusia serta dukungan anggaran yang memadai. Pembenahan di berbagai bidang diharapkan akan meningkatkan kemampuan daya saing kualitas produk yang dihasilkan serta mendorong pemenuhan kebutuhan sarana pertahanan dalam negeri sehingga tercipta kemandirian dalam pengembangan industri pertahanan.

Salah satu ciri kemandirian industri pertahanan adalah adanya pola hubungan kerja sama industri yang kokoh dan kuat serta didukung oleh jaringan kemitraan yang luas. Sistem pengelompokan industri yang saling berkaitan secara intensif dan seirama, baik sebagai industri vertikal maupun horizontal, sangat diperlukan untuk menumbuhkan dan tetap menjaga kemampuan berkompetisi dengan industri lainnya.

### ***Mewujudkan Industri Pertahanan Dalam Negeri***

Upaya pengembangan industri pertahanan merupakan bagian dari penyelenggaraan pertahanan secara utuh, serta juga bagian dari pembangunan nasional secara menyeluruh. Konsep pengembangan



industri pertahanan melibatkan pihak pengguna (Departemen Pertahanan dan TNI), pihak yang memproduksi, perancang, penguji, peneliti yang kompeten, serta perencana yang tepat dalam kerangka konsep Tiga Pilar Pelaku Industri Pertahanan. Konsep Tiga Pilar Pelaku Industri Pertahanan memadukan pengembangan industri pertahanan, yakni antara perguruan tinggi dan komunitas Litbang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengkajian dan pengembangan iptek pertahanan, Industri Strategis yang mendayagunakan iptek, serta Dephan dan TNI sebagai pengguna. Dephan dan TNI selaku pengguna tidak hanya menerima dan menggunakan hasil produksi dari industri strategis, tetapi juga terlibat dalam pengembangan desain sampai menghasilkan prototipe menurut kebutuhan. Keterlibatan pengguna dalam hal ini diemban oleh badan-badan Litbang yang dimiliki Dephan dan TNI untuk meneliti dan mengembangkan Alutsista dan sarana prasarana yang tepat menurut kebutuhan pertahanan. Peran Litbang sebagai jembatan antara pengguna dan industri sangat penting dalam mewujudkan kemandirian industri bidang pertahanan.

Departemen Pertahanan bertekad untuk mengembangkan industri pertahanan di bidang daya gerak, daya tempur, Pendukung K4I (Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, dan Informasi), dan Bekal. Hal ini tertuang dalam kebijakan pembangunan industri pertahanan sebagai dasar hukum bagi perwujudan kemandirian pertahanan. Pengembangan industri pertahanan ini tidak berarti upaya pengembangan kekuatan persenjataan dalam rangka perlombaan persenjataan tetapi untuk lebih memberdayakan dan menggiatkan industri pertahanan dalam pengadaan senjata secara mandiri.





### ***Kerja Sama dalam Pengembangan Industri Pertahanan***

Sebagai penjabaran dari upaya pengembangan dimaksud, telah dijajaki beberapa kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan luar negeri, misalnya dengan Jerman, sedangkan beberapa negara lain juga sudah menyampaikan keinginannya untuk membantu Indonesia. Kerja sama pengembangan industri pertahanan dengan pihak luar negeri akan dilaksanakan dalam bidang riset dan pengembangan teknologi pengayaan sumber-sumber energi, bahan metal dan semikonduktor serta propelan maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembahasan kerja sama ini diikuti juga oleh industri pertahanan dan beberapa universitas yang lebih banyak diisi oleh diskusi kerja sama di bidang riset dan teknologi serta kunjungan ke laboratorium dan fasilitas industri pertahanan, kemungkinan pemberian bea siswa pendidikan yang diprioritaskan pada pengembangan sumber energi, seperti bahan peledak yang risetnya direncanakan mulai dilaksanakan pada 2008. Untuk pengembangan sumber daya manusia akan juga diadakan program magang. Mereka akan dikirim ke beberapa fasilitas pemerintah asing dalam bidang pengayaan energi dan Litbang semikonduktor.

Kerja sama dengan pihak di dalam negeri juga terus dikembangkan. Kerja sama dengan pihak dalam negeri, selain untuk kepentingan pertahanan, juga sebagai bentuk kontribusi pertahanan dalam menggairahkan kemampuan dalam negeri, yakni dari segi pengembangan sains dan teknologi dalam negeri, perekonomian, perdagangan, dan ketenagakerjaan.



Dalam rangka pengembangan industri pertahanan, Departemen Pertahanan akan menyusun kebijakan pembinaan teknologi dan industri pertahanan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Departemen Pertahanan akan melibatkan pihak di dalam negeri, meliputi perguruan tinggi, sektor swasta, maupun dengan Badan Usaha Milik Negara, BPPT, TNI, atau lembaga lain yang memiliki kemampuan dalam bidang sains dan teknologi.





## ANGGARAN PERTAHANAN

### Dukungan Anggaran Pertahanan Saat ini

Penyelenggaraan pertahanan negara sangat bergantung pada besarnya anggaran pertahanan yang dialokasikan pemerintah. Selama ini penentuan jumlah anggaran pertahanan banyak didasarkan pada faktor kemampuan keuangan negara dan prioritas pembangunan. Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005--2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005--2009 menempatkan bidang pendidikan sebagai prioritas pertama dalam pembangunan nasional, diikuti oleh pembangunan infrastruktur. Apabila diukur dari nilai Pendapatan Domestik Bruto (PDB), rata-rata anggaran pertahanan dalam beberapa dekade terakhir relatif konstan, yakni berada di bawah 1%.

Secara nominal, anggaran pertahanan mengalami kenaikan. Namun, rasio terhadap PDB sejak tahun 2006 terus mengalami penurunan,

### REALISASI ANGGARAN PERTAHANAN TH. 2005-2008

Dalam Miliar Rupiah

Tahun	Jumlah	% PDB	% APBN	Anggaran Pemb		Rutin	
				RP	KE	BEL.PEG	NON BEL.PEG
2005	23.108,10	1,05	5,81	4.310,96	4.784,52	9.529,04	4.483,58
2006	28.229,18	0,93	4,36	5.147,40	4.450,52	12.140,60	6.490,66
2007	32.640,06	0,92	4,27	5.718,20	4.220,51	14.641,17	8.060,18
2008	33.678,99	0,79	4,23	6.248,05	4.220,50	15.044,01	8.166,43
RATA2	27.815,71	0,95	4,88	5.106,92	4.249,16	12.149,61	6.309,91



bahkan pada tahun 2008 berada pada rasio 0,79% terhadap PDB, seperti ditunjukkan pada Tabel di bawah ini, kenaikan nilai nominal anggaran pertahanan terjadi pada anggaran rutin, sementara kenaikan anggaran pembangunan dalam jumlah yang sangat kecil sehingga kenaikan tersebut tidak memberikan efek signifikan terhadap pembangunan kekuatan.

Dari alokasi anggaran pertahanan tersebut, sekitar 67% merupakan anggaran rutin, sedangkan untuk pembangunan pertahanan hanya sekitar 33%. Dari anggaran yang teralokasi untuk pembangunan pertahanan, sekitar 83%-nya atau sekitar 16% dari total anggaran pertahanan berbentuk kredit ekspor yang pengelolaannya sangat kompleks dan sering mengalami kesulitan untuk mencairkannya.

Anggaran pertahanan yang riil untuk membiayai kegiatan operasi, pemeliharaan Alutsista, dan pembangunan kekuatan pertahanan berada di bawah kebutuhan minimal. Tugas-tugas pertahanan dalam negeri, yakni dalam kerangka mengatasi konflik yang berdimensi keutuhan wilayah NKRI, menjaga perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia serta membantu pemerintah dalam penanganan dampak bencana alam di sejumlah daerah semakin menyadari betapa pentingnya kesiap-siagaan pertahanan, baik personel maupun Alutsista, serta dukungan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan operasi. Di sisi lain, kenyataan bahwa Alutsista TNI banyak berusia tua, tetapi masih dipertahankan karena proses regenerasi berupa pengadaan Alutsista generasi baru untuk menggantikan Alutsista yang sudah usang berjalan sangat lambat.

### **Proyeksi ke Depan**

Tantangan pertahanan pada tahun-tahun yang akan datang diperkirakan akan lebih kompleks. Tugas mengawal NKRI yang berdimensi



kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa tetap menjadi prioritas penyelenggaraan pertahanan negara. Wilayah Indonesia yang sangat luas, yakni sekitar 8 juta kilometer persegi, serta karakteristik geografi sebagai negara kepulauan dengan 17.504 pulau dengan wilayah maritim yang luasnya hampir 6 juta kilometer persegi membutuhkan alokasi anggaran pertahanan yang proporsional dengan tingkat risiko yang dihadapi. Dengan alokasi anggaran pertahanan di bawah 1% dari PDB menjadi tantangan yang tidak mudah dalam penyelenggaraan pertahanan dalam mengawal NKRI.

Pada sisi lain, fungsi pertahanan negara juga dihadapkan dengan kecenderungan global dalam penanganan ancaman terorisme, ancaman keamanan lintas negara, terutama kegiatan ilegal di wilayah perairan Indonesia yang menguras kekayaan alam, seperti perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, dan gangguan keamanan maritim lainnya. Di samping itu, dampak pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang ekstrem sehingga kemungkinan terjadinya bencana alam di kawasan dan di dalam negeri diperkirakan akan meningkat. Dalam kondisi tersebut intensitas pelibatan kekuatan TNI dalam penanggulangan dampak bencana alam akan semakin tinggi pula. Keterlibatan Indonesia dalam tugas-tugas perdamaian dunia serta di kawasan diperkirakan akan meningkat atau minimal sama dengan kondisi pada tahun 2007. Sebagai bagian dari kepentingan nasional Indonesia, misi perdamaian dunia dan pelibatan di kawasan menuntut kesiapan yang prima sektor pertahanan negara yang harus ditonjolkan.

Untuk menghadapi tantangan tugas pertahanan tersebut, pembangunan pertahanan diprioritaskan pada pembangunan kekuatan dan peningkatan profesionalisme prajurit dengan ketersediaan



Alutsista yang mampu mendukung kesiapsiagaan dan mobilitas. Dalam konteks tersebut, Kekuatan Pokok Minimum mendesak realisasinya (perwujudannya). Untuk mewujudkan Kekuatan Pokok Minimum tersebut, proyeksi anggaran pertahanan dalam dua sampai tiga tahun yang akan datang diharapkan dapat berada di atas 1% dari GDP dan meningkat secara bertahap dalam 10 tahun yang akan datang. Kebutuhan anggaran pertahanan yang rasional dalam 15-20 tahun akan datang diproyeksikan minimal 2% dari GDP. Proyeksi tersebut merupakan kalkulasi yang cermat dan rasional, tanpa mengganggu keseimbangan pembangunan pada sektor-sektor pembangunan lainnya di luar bidang pertahanan. Sebagai bahan perbandingan, negara-negara maju mengalokasikan anggaran pertahanannya rata-rata di atas 2% dari GDP-nya masing-masing. Bahkan, pada lingkup Kawasan Asia Tenggara, kebanyakan dari negara-negara tetangga mengalokasikan anggaran pertahanan di atas 2 persen dari PDB-nya.

Disadari bahwa tantangan pemerintah dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi dan upaya untuk menggali sumber-sumber pemasukan negara merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertahanan. Namun, penentuan alokasi anggaran pertahanan tidak cukup hanya berdasarkan kondisi ekonomi nasional, tetapi juga perlu *didasarkan pada rasio kebutuhan pertahanan dengan memperhatikan tingkat risiko yang dihadapi*. Pemenuhan anggaran pertahanan pada rasio yang proporsional akan membangun kemampuan pertahanan yang berdaya tangkal sekaligus memberikan efek stabilitas yang mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi dan kesejahteraan.